

**KOMUNIKASI
POLITIK
PEMERINTAHAN**

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KOMUNIKASI POLITIK PEMERINTAHAN

Amalia Syauket | Ratna Indriasari
Rahadi Budi Prayitno | Definitif Endrina Kartini Mendrofa
Cornelia Evelin Cabui



KOMUNIKASI POLITIK PEMERINTAHAN

Penulis: Amalia Syauket
Ratna Indriasari
Rahadi Budi Prayitno
Definitif Endrina Kartini Mendrofa
Cornelia Evelin Cabui

ISBN: 978-623-127-205-8

Copyright ©Februari 2024
Ukuran: 15,5 cm X 23 cm; hlm.: x + 126

Penyelaras Aksara: Bela Ardiyanti
Desainer sampul: Kelvin Syuhada Lunivananda
Penata isi: Kelvin Syuhada Lunivananda

Cetakan I: Februari 2024

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
CV. Literasi Nusantara Abadi
Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang
Telp : +6285887254603, +6285841411519
Email: penerbitlitnus@gmail.com
Web: www.penerbitlitnus.co.id
Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian atau keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.



Prakata

Di tengah lautan informasi yang terus berkembang, komunikasi politik telah menjadi suatu keharusan bagi setiap pemerintahan yang ingin membangun hubungan yang kuat dengan masyarakatnya. Dari kampanye politik hingga tindakan pemerintah sehari-hari, komunikasi politik memainkan peran yang tak terbantahkan dalam membentuk persepsi publik, memperkuat legitimasi, dan memastikan arah kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat

Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa komunikasi politiknya efektif, transparan, dan inklusif. Hal ini tidak hanya mencakup penyampaian informasi secara jelas dan akurat, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan keputusan.

Dengan memperhatikan peran penting komunikasi politik, pemerintah berkomitmen untuk senantiasa membuka ruang dialog dan diskusi yang konstruktif dengan masyarakat. Melalui kolaborasi yang erat, diharapkan tercipta pemahaman yang mendalam tentang kebijakan-kebijakan pemerintah dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai.

Dengan adanya komunikasi politik yang efektif dan inklusif, pemerintah dan masyarakat dapat bersinergi dalam membangun negara yang lebih baik, adil, dan berkelanjutan bagi semua pihak. Penulis berharap bahwa buku ini

tidak hanya menjadi bacaan yang informatif bagi para akademisi dan praktisi komunikasi politik, tetapi juga dapat menjadi panduan yang berguna bagi para pemimpin pemerintahan yang ingin meningkatkan hubungan mereka dengan masyarakat melalui komunikasi yang efektif dan berdaya.



Daftar Isi

Prakata v
Daftar Isi vii

BAB I

KONSEP DASAR KOMUNIKASI POLITIK 1
 Definisi Komunikasi Politik 1
 Politik dan Komunikasi 6
 Fungsi Komunikasi Politik 11
 Unsur-Unsur Komunikasi Politik 14
 Hubungan Sistem Politik dan Sistem Komunikasi 19
 Komunikasi Politik Kontemporer Indonesia 21

BAB II

TEORI KOMUNIKASI DAN MEDIA 25
 Makna Komunikator Politik 25
 Komunikasi Politik dalam Kajian Empiris 29
 Ragam Komunikator Politik 31
 Informasi Politik dari Media 34

BAB III

| | |
|--|----|
| MAKNA KOMUNIKASI DAN EFEK POLITIK DALAM KOMUNIKASI POLITIK | 39 |
| Efek Politik dalam Proses Komunikasi Politik..... | 39 |
| Komponen Efektivitas Komunikator Politik..... | 43 |
| Efek Langsung atau Tidak Langsung Komunikasi Politik..... | 50 |

BAB IV

| | |
|-------------------------------------|----|
| ETIKA KOMUNIKASI PEMERINTAHAN | 57 |
| Perspektif Etika Komunikasi | 57 |
| Konsep Etika Pemerintahan | 59 |
| Etika dalam Pemerintahan | 69 |

BAB V

| | |
|---|----|
| ELITE POLITIK DALAM PROSES KOMUNIKASI POLITIK | 75 |
| Definisi Elite Politik..... | 75 |
| Klasifikasi Elite Politik..... | 77 |

BAB VI

| | |
|---|----|
| KOMUNIKASI POLITIK DALAM PEMERINTAHAN | 83 |
| Komunikasi Politik: Pemerintah dan Kebijakan..... | 83 |
| Pola Komunikasi Politik Pemerintah | 88 |

BAB VII

| | |
|--|-----|
| KOMUNIKASI POLITIK GLOBAL | 95 |
| Komunikasi Politik dan Hubungan Internasional..... | 95 |
| Komunikasi Politik dan Globalisasi | 101 |
| Isu-Isu Komunikasi Politik Global | 104 |

BAB VIII

STUDI KASUS: KOMUNIKASI POLITIK

DI ERA MEDIA SOSIAL 107

Daftar Pustaka..... 117

Profil Penulis 121



BAB I

KONSEP DASAR KOMUNIKASI POLITIK

Definisi Komunikasi Politik

Komunikasi politik dapat dijabarkan sebagai suatu bentuk komunikasi yang memiliki tujuan untuk mencapai pengaruh tertentu di dalam suatu sistem politik. Dalam konteks ini, upaya komunikasi politik dilakukan dengan fokus pada pembahasan masalah-masalah yang dapat mengikat seluruh warga masyarakat melalui sanksi-sanksi yang telah ditetapkan bersama melalui lembaga politik.

Rush dan Althoff (1997) memberikan definisi yang menggambarkan komunikasi politik sebagai sebuah proses, di mana informasi politik yang relevan diidentifikasi dan disampaikan dari satu bagian sistem politik ke bagian lainnya, serta antara sistem sosial dengan sistem politik. Dengan kata lain, komunikasi politik menjadi sarana penting dalam mengalirkan informasi politik yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Menurut pandangan Gabrel Almon, komunikasi politik merupakan salah satu fungsi yang secara konsisten ada dalam setiap sistem politik. Proses komunikasi politik ini terjadi bersamaan dengan enam fungsi lainnya, yakni sosialisasi dan rekrutmen politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, pembuatan peraturan, aplikasi peraturan, dan adjudikasi peraturan. Dengan demikian, komunikasi politik tidak hanya menjadi elemen terpisah, melainkan secara inheren terkandung dalam setiap fungsi dari sistem politik itu sendiri.

Meriam Budiardjo (1982) mengartikan komunikasi politik sebagai salah satu fungsi partai politik, di mana fungsi tersebut melibatkan penyampaian beragam pendapat dan aspirasi masyarakat. Partai politik bertugas untuk mengatur pendapat-pendapat tersebut sedemikian rupa agar dapat dijadikan dasar kebijakan politik. Dalam konteks ini, komunikasi politik menjadi instrumen penting untuk mentransformasikan berbagai pandangan menjadi kebijakan politik yang dapat dijalankan oleh pemerintahan.

Maswadi Rauf menekankan dalam Heryanto dan shulhan (2013) bahwa komunikasi politik merupakan bagian dari kajian ilmu politik. Pesan-pesan yang disampaikan dalam proses komunikasi memiliki ciri politik, terkait dengan kekuasaan politik negara, pemerintah, dan aktivitas komunikasi dalam peran sebagai pelaku kegiatan politik. Komunikasi politik dapat dibagi menjadi dua dimensi, yakni kegiatan politik yang melibatkan penyampaian pesan berunsur politik oleh aktor politik kepada pihak lain dan kegiatan ilmiah yang terjadi dalam konteks sistem politik.

Susanto menyatakan dalam Heryanto dan shulhan (2013) bahwa komunikasi politik adalah bentuk komunikasi yang ditujukan untuk mencapai pengaruh tertentu sehingga isu-isu yang dibahas dalam kegiatan komunikasi



tersebut dapat diresapi oleh seluruh warga masyarakat melalui sanksi yang ditetapkan bersama oleh lembaga-lembaga politik. Pendekatan ini menekankan aspek pengaruh dan keputusan bersama dalam konteks politik.

Nimmo dalam Heryanto dan shulhan (2013) berpendapat bahwa komunikasi politik menggunakan politik sebagai alat untuk mengartikan aktivitas kolektif orang, di mana aturan-aturan dalam konflik sosial dijelaskan melalui politik. Dengan kata lain, politik digunakan sebagai bahasa untuk memahami tindakan kolektif dan regulasi dalam konteks konflik sosial.

McQuail seperti yang diutarakan dalam Heryanto dan shulhan (2013), mendefinisikan komunikasi politik sebagai suatu studi interdisipliner yang melibatkan berbagai disiplin ilmu, terutama dalam hubungannya antara proses komunikasi dan proses politik. Wilayah ini menjadi medan perjuangan antarteori, pendekatan, agenda, dan konsep dalam membangun identitasnya. Oleh karena itu, pembahasan mengenai komunikasi politik terkadang dianggap sebagai studi tentang aspek-aspek politik dari komunikasi publik, sering dikaitkan dengan komunikasi kampanye pemilu, serta melibatkan perdebatan mengenai teori-teori dan konsep-konsep yang menjadi dasar kajian ini.

Kampanye politik melibatkan sejumlah aspek penting, termasuk upaya persuasif terhadap pemilih, debat antara kandidat, dan pemanfaatan media massa sebagai alat kampanye. Segmen kampanye ini melibatkan strategi persuasif untuk memengaruhi pemilih, melibatkan interaksi antara kandidat melalui debat, dan memanfaatkan media massa sebagai sarana komunikasi yang efektif.

Menurut Luciana Pye Heryanto dan shulhan (2013), hubungan antara komunikasi dan politik atau pemerintahan sangat erat dan istimewa karena keduanya berada dalam domain politik, dengan menempatkan komunikasi pada posisi yang sangat fundamental. Glanoor, sebagai contoh, menyatakan bahwa tanpa adanya komunikasi tidak akan ada usaha bersama, oleh karena itu tidak akan ada politik. Dalam perspektif Pye, tanpa adanya jaringan komunikasi yang mampu memperbesar dan melipatgandakan



pilihan-pilihan individual, istilah politik tidak akan memiliki makna yang sesungguhnya.

Pandangan Pye menekankan pentingnya peran komunikasi dalam konteks politik, di mana kemampuan komunikasi yang memperluas dan memperbesar opsi individu menjadi kunci utama bagi keberlangsungan politik. Dengan kata lain, tanpa adanya suatu sistem komunikasi yang dapat memperluas dan memperkaya pilihan-pilihan individual, konsep politik kehilangan substansinya. Dalam konteks ini, komunikasi menjadi fondasi utama bagi eksistensi dan dinamika politik, memainkan peran penting dalam membangun jaringan yang mampu membentuk dan membentangkan pilihan-pilihan yang menjadi dasar bagi kegiatan politik itu sendiri.

Beberapa definisi komunikasi politik yang bersifat linier, seperti yang dirumuskan oleh Lasswell Heryanto dan Shulhan (2013), dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Menurut Sunshine Hilligus, komunikasi politik didefinisikan sebagai transmisi informasi secara luas, mencakup berbagai elemen seperti verbal, nonverbal, perilaku, dan sebagainya, dengan tujuan untuk memperoleh atau mengejar kekuasaan. Dalam konteks ini, komunikasi politik dipahami sebagai suatu proses di mana informasi disampaikan untuk memengaruhi dan mencapai kekuasaan politik.
2. Bruce Hardy mengartikan komunikasi politik sebagai transfer informasi apa pun yang berkaitan dengan persaingan atas sumber daya. Dalam perspektif ini, komunikasi politik menjadi instrumen untuk memahami dan memanfaatkan informasi yang berkaitan dengan perlombaan atau persaingan dalam memperebutkan sumber daya, baik itu dalam konteks politik maupun aspek-aspek lainnya.
3. Bob Lichter merumuskan definisi komunikasi politik sebagai produksi, transmisi, dan efek informasi mengenai politik, pendapat politik, serta kebijakan publik. Dalam konsep ini, komunikasi politik tidak hanya mencakup penyampaian informasi politik, tetapi juga melibatkan dampak atau pengaruh yang dihasilkan dari proses tersebut terhadap pemahaman politik, pandangan politik, dan kebijakan publik.



Definisi-definisi tersebut menunjukkan beragam aspek komunikasi politik yang melibatkan penyampaian informasi, persaingan atas sumber daya, dan efek dari informasi politik itu sendiri. Masing-masing definisi memberikan sudut pandang yang unik terhadap kompleksitas dan peran komunikasi dalam ranah politik.

Definisi komunikasi politik yang bersifat sistematis, sebagaimana dikemukakan oleh Wahyuni (2007) Heryanto dan Shulhan (2013), menganggap realitas komunikasi politik sebagai suatu sistem yang konstan, teratur, dan dapat diramalkan. Beberapa contoh definisi komunikasi politik yang mencerminkan pandangan sistematis tersebut sebagai berikut.

1. Menurut Ken Goldstein, komunikasi politik didefinisikan sebagai pertukaran informasi mengenai pelaksanaan kekuasaan. Definisi ini menunjukkan bahwa komunikasi politik dalam pandangan sistematis bertujuan untuk memahami dan menyampaikan informasi terkait dengan pelaksanaan kekuasaan dalam konteks politik.
2. Talia Stroud memberikan definisi komunikasi politik sebagai interaksi antara elite politik, media, dan warga negara mengenai topik-topik yang berkaitan dengan politik. Dalam perspektif ini, komunikasi politik dianggap sebagai bagian dari suatu sistem interaksi yang melibatkan berbagai pihak dalam menyampaikan dan menerima informasi politik.
3. Lynn Sanders mengartikan komunikasi politik sebagai pertukaran gagasan dan pesan, baik secara verbal maupun visual serta secara langsung atau melalui media yang terjadi dalam suatu ruang publik yang dapat diidentifikasi. Tujuan atau konsekuensi dari pertukaran ini adalah untuk mengubah struktur dan produk pemerintahan atau bahkan untuk menghindari perubahan tersebut. Dalam konteks ini, komunikasi politik dianggap sebagai elemen kunci dalam pengaruh terhadap dinamika pemerintahan.

Definisi-definisi ini mencerminkan konsep komunikasi politik sebagai suatu sistem yang melibatkan pertukaran informasi, interaksi antarpelaku politik, dan pengaruh terhadap struktur pemerintahan. Pendekatan ini menggambarkan komunikasi politik sebagai suatu entitas yang terorganisir,



memiliki ketertiban, dan dapat dipahami sebagai bagian integral dari sistem politik yang lebih luas.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa komunikasi politik adalah suatu proses di mana pesan-pesan politik disampaikan dari pihak yang berkomunikasi kepada pihak penerima, dengan tujuan memengaruhi sikap, opini, atau perilaku penerima pesan. Fenomena ini menjadi objek penelitian yang terus menarik perhatian dalam setiap struktur politik karena peran sentral yang dimainkan oleh komunikasi politik. Dalam konteks sistem politik, komunikasi politik menjadi kunci dalam seluruh tahapan proses politik, mencakup pembentukan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, hingga evaluasi kebijakan. Dengan demikian, komunikasi politik bukan hanya menjadi sarana penyampaian pesan, tetapi juga menjadi elemen esensial yang membentuk dinamika dan arah kebijakan dalam konteks politik sebuah negara.

Politik dan Komunikasi

Seseorang yang terlibat dalam bidang komunikasi politik dihadapkan pada tantangan yang rumit, mengingat bahwa komunikasi dan politik merupakan dua paradigma yang memiliki perbedaan mendasar. Di satu sisi, komunikasi dipahami sebagai suatu proses pertukaran pesan antara individu yang terlibat dalam interaksi. Di sisi lain, politik diartikan sebagai kegiatan terorganisir yang memiliki tujuan yang telah diatur secara sistematis oleh individu, kelompok, dan masyarakat dalam suatu sistem sosial. Meskipun keduanya memiliki interpretasi yang berbeda, dalam praktik politik, keduanya memiliki peran sentral yang setara. Dengan kata lain, komunikasi dan politik menjadi kegiatan yang terintegrasi dalam kerangka sistem politik kekuasaan negara, dengan tujuan yang telah diatur secara sistematis oleh penguasa (Slamet, 2020).

Dalam mencapai tujuan politik, komunikasi memiliki peran penting sebagai alat penghubung dalam aktivitas politik. Hal ini diakui bahwa mencapai tujuan dalam konteks sistem politik tidak mungkin terwujud tanpa



adanya kegiatan komunikasi yang mendahuluinya. Sebaliknya, komunikasi akan mengarah pada pencapaian tujuan politik ketika pesan yang disampaikan memiliki makna yang sama bagi yang terlibat dalam dinamika politik. Oleh karena itu, keterkaitan antara komunikasi dan politik merupakan unsur integral dalam mewujudkan suksesnya tujuan dan kegiatan politik dalam suatu sistem politik yang kompleks.

Dalam konteks fenomena tersebut terlihat jelas bahwa komunikasi dan politik, meskipun memiliki makna yang berbeda juga memiliki potensi untuk menyatu dalam satu paradigma ketika diamati dalam konteks proses politik di masyarakat. Terdapat sebutan umum untuk istilah ini, yaitu komunikasi politik yang mencirikan suatu proses pertukaran pesan antara individu yang terlibat dalam kegiatan politik. Dalam hal ini, peran yang diarahkan untuk memiliki tujuan pesan yang telah ditentukan oleh mekanisme yang berlaku dalam kehidupan masyarakat seperti yang disampaikan oleh Golding dalam Slamet (2020) sebagai berikut.

“Komunikasi politik dijelaskan dalam perspektif pesimistik sebagai suatu proses di mana muatan politik tersebar melalui berbagai bentuk media massa, namun disajikan kepada mayoritas audiens yang dipengaruhi oleh berbagai sumber, terutama kepentingan media itu sendiri bukan kepentingan warga negara atau proses demokratis. Komunikator massa memiliki keterbatasan dalam menambahkan unsur politik, baik karena pembatasan yang telah disebutkan maupun untuk mempertahankan pengaruh norma-norma objektivitas politik. Dampak yang signifikan dari dominasi pandangan tertentu dalam liputan politik tecermin dalam ketidakseimbangan waktu dan ruang yang diberikan pada prosedur dan personalitas dibandingkan dengan substansi politik. Dengan kata lain, komunikasi politik dalam konteks ini mengacu pada citra rasa terhadap berita politik serta penyebab utama yang dibentuk melalui kombinasi media sosialisasi dan struktur sosial.”

Dalam kutipan yang disajikan dari Surjaman (2005: 5) menguraikan konsep-konsep dasar mengenai hubungan antara komunikasi dan politik. Menurut Nimmo, komunikasi memiliki beberapa dimensi yang mencakup pengalihan informasi untuk mendapatkan tanggapan, pengkoordinasian



makna antara individu dan audiens, serta saling berbagi informasi, gagasan, atau sikap. Proses ini juga melibatkan pertukaran unsur-unsur perilaku atau modus kehidupan melalui aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, komunikasi tidak hanya sebatas penerusan informasi dari satu sumber ke publik, tetapi dapat dipahami sebagai penciptaan ulang gagasan dan informasi oleh publik itu sendiri. Hal ini dapat terjadi melalui petunjuk-petunjuk simbolis, seperti slogan, tema pokok, atau simbol tertentu. Transaksi juga diakui sebagai modus yang penting dalam memahami perilaku manusia.

Nimmo menyoroti dua aspek penting terkait dengan transaksi komunikasi, yaitu:

1. *pertama*, makna dari berbagai hal bagi individu muncul dari tindakan bersama yang dilakukan oleh mereka; dan
2. *kedua*, tindakan tersebut mencakup pengamatan berbagai hal serta penempatan arah perbuatan berdasarkan interpretasi personal.

Dengan demikian, pemahaman tentang komunikasi dan politik tidak hanya mencakup aliran informasi, tetapi juga melibatkan konstruksi makna bersama dan interaksi antarindividu dalam masyarakat.

Dalam kutipan dari Slamet (2020), fenomena komunikasi politik disebutkan tidak berbeda dengan fenomena komunikasi dan politik secara umum. Keduanya dianggap serba hadir (*ubiquitous*) yang berarti komunikasi dan politik hadir di mana saja dan kapan saja. Setiap individu terlibat dalam kegiatan berkomunikasi dan berpolitik.

Dalam rangka menjelaskan hubungan antara komunikasi dan politik, terdapat tiga pendekatan yang diuraikan oleh Slamet (2020). *Pertama*, komunikasi dipandang sebagai variabel bebas (*independent variable*) yang menjadi penyebab bagi gejala politik. Contohnya, pers di negara-negara maju memiliki peran besar dalam memengaruhi pengambilan keputusan politik. *Kedua*, komunikasi dipandang sebagai akibat dari perlakuan politik, di mana politik dianggap sebagai penentu utama. *Ketiga*, komunikasi dan politik dipandang sebagai interaksi yang kompleks sehingga memerlukan pendekatan atau perspektif yang khusus.



Pendekatan yang ketiga menunjukkan bahwa hubungan antara komunikasi dan politik tidak dapat disederhanakan menjadi hubungan sebab-akibat, tetapi merupakan suatu interaksi kompleks di mana keduanya saling memengaruhi. Dengan demikian, pemahaman terhadap fenomena komunikasi politik memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan mempertimbangkan dinamika kompleks di dalamnya.

Dalam literatur ilmu politik, menurut Sanit dalam Slamet (2020) komunikasi memiliki peran penting sebagai salah satu variabel yang memengaruhi proses politik. Selanjutnya, Sanit menyatakan bahwa efektivitas dan demokratisasi dalam komunikasi merupakan syarat esensial bagi kelangsungan fungsi-fungsi kehidupan politik. Komunikasi politik khususnya, dianggap sebagai jembatan untuk menyelesaikan perbedaan atau konflik dalam visi, ideologi, atau kepentingan di antara para pembuat kebijakan publik. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan atas alternatif solusi masalah yang dianggap tepat. Dengan demikian, Sanit mengartikan bahwa pemahaman terhadap permasalahan pembangunan politik dapat diperoleh melalui pengaruh pola dan proses komunikasi yang dimanfaatkan oleh para aktor politik itu sendiri.

Pentingnya komunikasi dalam mencapai tujuan politik diakui oleh Greber dalam Slamet (2020), menyatakan bahwa sebagian besar aktivitas politik adalah permainan kata-kata. Politisi berhasil meraih kekuasaan melalui keberhasilan berbicara secara persuasif kepada pemilih dan elite politik. Menurut Arriane, bahasa politik baik verbal maupun nonverbal menjadi politis bukan karena bentuk atau kosa kata, tetapi karena substansi informasi, *setting* informasi yang disebarkan, dan fungsi yang dijalankan.

Mark Roelofs, seorang ilmuwan politik menyatakan bahwa politik dapat sederhana diartikan sebagai kegiatan berbicara. Politik bukan hanya pembicaraan, tetapi semua kegiatan berkomunikasi antara orang-orang. Menurut Bell dalam Slamet (2020), pembicaraan dalam politik mencakup pembicaraan kekuasaan, pengaruh, otoritas, dan menurut Nimmo (2005) juga pembicaraan tentang konflik. Melalui pembicaraan, komunikator politik menyelesaikan perselisihan melalui kompromi atau konsensus.



Dan Nimmo (2005) menyebutkan bahwa politik dapat diartikan sebagai kegiatan kolektif yang mengatur perbuatan orang dalam kondisi konflik sosial. Proses politik yang melibatkan pertukaran simbol, kata-kata tertulis dan diucapkan, gerakan, sikap tubuh, perilaku, serta pakaian berkaitan erat dengan komunikasi. Menurut Mozin dalam Slamet (2020), pandangan tentang komunikasi dan politik saling berhubungan dan saling memengaruhi dalam studi komunikasi politik. Bell (Slamet, 2020) menambahkan bahwa komunikasi tidak hanya sebagai kontrol sosial, tetapi juga memiliki makna politik. Nimmo (dalam Slamet, 2020) menyatakan bahwa banyak aspek kehidupan politik dapat dijelaskan sebagai kegiatan komunikasi dan sebaliknya, komunikasi dapat melibatkan kegiatan politik. Kegiatan politik pada dasarnya adalah kegiatan berbicara yang dilakukan oleh politikus, aktivis, atau profesional.

Definisi politik yang berkaitan dengan komunikasi seperti yang disampaikan oleh Robert H. Soltau dalam *An Introduction to Politics* (dalam Slamet, 2020) menyebutkan bahwa ilmu politik berhubungan dengan maksud dan tujuan negara, lembaga-lembaga yang akan merealisasikannya, serta hubungan dengan individu atau anggota dalam negara. Dalam konteks komunikasi, politik mengklasifikasikan pembicaraan menjadi tiga jenis: pembicaraan kekuasaan, pembicaraan pengaruh, dan pembicaraan autoritas. Ini mencakup pengaruh melalui ancaman, janji, nasehat, dorongan, perintah, dan lainnya.

Banyak pandangan ahli menunjukkan keterkaitan antara komunikasi dan politik. Pye menyatakan bahwa jaringan komunikasi dapat memperluas dan melipatgandakan ucapan serta pilihan individual memainkan peran penting dalam politik. Schacter menekankan bahwa komunikasi adalah mekanisme untuk melaksanakan kekuasaan (Slamet, 2020).

Astrid Susanto mengarahkan definisi komunikasi politik pada pencapaian pengaruh yang mengikat semua warganya melalui sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik. Komunikasi politik juga diartikan oleh kantraprawira sebagai usaha menghubungkan pikiran politik



dalam masyarakat, baik pikiran intern golongan, instansi, asosiasi, atau sektor kehidupan pemerintah (Slamet, 2020).

Dalam dua dimensi, Rusadi menjelaskan konsep komunikasi politik: sebagai kegiatan politik, yaitu penyampaian pesan politik oleh aktor politik kepada pihak lain dan sebagai kegiatan ilmiah dalam sistem politik, sesuai dengan pandangan Almond (Slamet, 2020).

Meskipun terdapat pandangan bahwa komunikasi mencakup politik, ilmu politik memandang bahwa politik meliputi komunikasi karena definisi komunikasi “ternoda” oleh politik. Artinya, politik mencakup pengaruh selain kekuasaan dan wewenang (Slamet, 2020).

Kesimpulan dari keterkaitan antara komunikasi dan politik adalah bahwa keduanya saling melengkapi dan memiliki hubungan erat dalam kehidupan sosial dan politik. Komunikasi memegang peran sentral dalam proses politik, berperan dalam pengambilan keputusan, membentuk opini publik, dan menyampaikan pesan politik kepada masyarakat. Bahasa politik, baik lisan maupun tertulis memiliki peran penting dalam membentuk persepsi dan memengaruhi sikap publik, dengan pemilihan kata, narasi, dan retorika menjadi faktor kunci dalam merancang pesan politik yang persuasif.

Dengan demikian, hubungan antara komunikasi dan politik bersifat kompleks, beraspek kekuasaan, legitimasi, otoritas, serta pengaruh yang saling memengaruhi dan membentuk dinamika dalam kehidupan politik. Ilmu politik dan studi komunikasi bersinggungan, menunjukkan adanya interdisiplinaritas antara kedua bidang studi ini. Selain itu, komunikasi politik juga berfungsi sebagai sarana pendidikan politik, meningkatkan kesadaran warga negara tentang isu-isu politik, dan memfasilitasi partisipasi dalam kehidupan demokratis.

Fungsi Komunikasi Politik

Fungsi komunikasi politik dapat dilihat melalui dua aspek seperti berikut (Anggara, 2013: 93—94).



1. Dalam aspek totalitas, tujuan utama komunikasi politik adalah menciptakan kondisi negara yang stabil dengan menghindari faktor-faktor negatif yang dapat mengancam keutuhan nasional. Pada level ini, negara memiliki kewajiban untuk menyampaikan komunikasi politik secara terbuka (transparan) dan menyeluruh (komprehensif) kepada masyarakat. Langkah ini bertujuan untuk menghilangkan hambatan komunikasi antara negara dan masyarakat sehingga terbentuk hubungan yang harmonis di antara keduanya.
2. Dalam aspek hubungan superstruktur dan infrastruktur, komunikasi politik berperan sebagai jembatan penghubung antara dua suasana yang ada dalam totalitas nasional, bersifat independen dalam berlangsungnya suatu sistem pada ruang lingkup negara. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan (artikulasi) semua kebijakan dan keputusan politik kepada masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ideologi, ekonomi, sosial budaya, hukum, hankam, dan aspek lain yang berkaitan dengan sikap serta perilaku politik Indonesia terhadap pihak internasional (luar negeri). Dengan demikian, komunikasi politik berfungsi sebagai sarana untuk memperjelas serta menghubungkan berbagai dimensi kehidupan masyarakat dan negara dalam rangka mencapai keseimbangan serta harmoni dalam sistem politik.

Sebagai cabang ilmu, komunikasi politik menurut McNair (Lestalu, 2017) memiliki lima fungsi dasar yang dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang perkembangan di sekitarnya. Media komunikasi bertindak sebagai pengamat yang memantau dan monitoring peristiwa-peristiwa dalam masyarakat.
2. Mendidik masyarakat mengenai makna dan signifikansi fakta yang ada. Jurnalis diharapkan dapat melihat fakta secara objektif, menciptakan liputan yang objektif, dan memberikan pendidikan kepada masyarakat mengenai realitas fakta tersebut.
3. Menyediakan diri sebagai platform untuk menampung masalah-masalah politik, menciptakan wacana yang membentuk opini publik, dan mengembalikan hasil opini tersebut kepada masyarakat. Dengan cara



ini, komunikasi politik memberikan arti dan nilai pada upaya penegakan demokrasi.

4. Membuat publikasi yang ditujukan kepada pemerintah dan lembaga-lembaga politik. Media berfungsi sebagai anjing penjaga (*watchdog*), seperti yang terjadi dalam kasus pengunduran diri Nixon sebagai presiden Amerika akibat keterlibatannya dalam skandal Watergate.
5. Dalam masyarakat yang demokratis, media politik berperan sebagai saluran advokasi yang membantu pengaliran kebijakan dan program-program lembaga politik kepada media massa. Media politik menjadi alat untuk menyuarakan aspirasi, mendukung kebijakan, dan memperkuat demokrasi dalam suatu negara.

Apabila fungsi komunikasi politik yang diajukan oleh McNair (2003) tersebut digabungkan dengan konsep-konsep yang ditemukan dalam pemikiran McBraid (1980) dan Goran Hedebro (1982) dalam Lestaluhu (2017), peran komunikasi politik dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai upaya yang dilakukan oleh lembaga politik serta hubungannya dengan pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini, komunikasi politik menjadi saluran yang menghubungkan entitas politik dengan publik serta menyampaikan informasi secara terbuka dan transparan.
2. Melakukan sosialisasi terkait kebijakan, program, dan tujuan lembaga politik. Fungsi ini mencakup peran komunikasi politik dalam menyampaikan pesan-pesan yang bertujuan mengenalkan dan menggeneralisasikan nilai-nilai politik yang diusung oleh lembaga tersebut.
3. Memberikan motivasi kepada politisi, fungsionaris, dan para pendukung partai. Dalam konteks ini, komunikasi politik tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sumber semangat dan dukungan bagi aktor-aktor politik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
4. Menjadi platform yang dapat menampung ide-ide masyarakat, menjadikannya sebagai bahan pembicaraan dalam opini publik. Komunikasi politik berperan dalam menciptakan ruang untuk partisipasi masyarakat



dalam menyuarkan ide-ide, kemudian menjadi bagian dari diskursus publik.

5. Mendidik masyarakat melalui pemberian informasi dan sosialisasi mengenai cara-cara pemilihan umum serta penggunaan hak suara. Fungsi ini menyoroti peran komunikasi politik dalam membentuk pemahaman yang lebih baik mengenai proses demokratisasi dan partisipasi politik masyarakat.
6. Menjadi hiburan masyarakat sebagai “pesta demokrasi” dengan melibatkan juru kampanye, artis, serta komentator atau pengamat politik. Komunikasi politik tidak hanya memiliki dimensi serius, tetapi juga dapat menjadi sarana hiburan yang membangun semangat demokratisasi dengan cara yang lebih menarik dan menghibur.
7. Memupuk integrasi dengan meningkatkan rasa kebangsaan sehingga menghindari konflik dan ancaman tindakan separatis yang dapat mengancam persatuan nasional. Komunikasi politik berperan dalam membentuk identitas nasional dan menggali nilai-nilai bersama yang memperkuat persatuan.
8. Menciptakan iklim perubahan dengan mengubah struktur kekuasaan melalui penyampaian informasi untuk mencari dukungan masyarakat luas terhadap gerakan reformasi dan demokratisasi. Fungsi ini menekankan peran komunikasi politik menjadi agen perubahan sosial dan politik.
9. Meningkatkan aktivitas politik masyarakat melalui siaran berita, agenda *setting*, dan komentar politik. Komunikasi politik tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga berperan dalam membentuk agenda dan memotivasi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan politik.
10. Menjadi *watchdog* atau anjing penjaga dalam membantu terciptanya *good governance* yang transparansi dan akuntabilitas. Fungsi ini menekankan peran komunikasi politik dalam mengawasi tindakan pemerintah, menciptakan tata kelola yang baik, dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam kebijakan publik.



Unsur-Unsur Komunikasi Politik

Menurut Nimmo, terdapat unsur-unsur komunikasi politik adalah sebagai berikut (Anggara, 2013: 94—97).

1. Komunikasi massa

Menurut J. D. Halloran, konsep komunikator massa dapat diterapkan secara relevan pada komunikator politik. Dalam perspektif James Rosenau, komunikator politik diartikan sebagai figur yang menduduki posisi sentral dalam menyampaikan pandangan pemerintah mengenai “hal ihwal nasional yang multimasalah.” Dengan kata lain, komunikator politik berperan sebagai perwakilan resmi yang menyampaikan opini dan sikap pemerintah terhadap isu-isu kompleks dan beragam yang memengaruhi negara.

Klasifikasi pejabat yang termasuk dalam kategori komunikator politik mencakup berbagai aspek pemerintahan seperti berikut.

- a. Pejabat eksekutif meliputi presiden dan kabinet, bertindak sebagai komunikator utama yang menyampaikan kebijakan dan posisi pemerintah secara eksekutif.
- b. Pejabat legislatif, termasuk senator atau anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan pimpinan utama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki peran penting dalam menyampaikan pandangan pemerintah melalui proses legislasi.
- c. Pejabat yudikatif, seperti hakim Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) juga turut berperan dalam konteks komunikasi politik dengan mengeluarkan keputusan dan pandangan hukum yang memengaruhi kebijakan negara.

Menurut Leonard W. Dob, terdapat tiga klasifikasi komunikator politik yang dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Politikus sebagai komunikator politik
Politikus dalam konteks komunikator politik adalah individu yang memiliki kewenangan untuk berkomunikasi sebagai perwakilan dari kelompok atau konstituensi tertentu. Pesan yang disampaikan-nya bersifat memperjuangkan dan melindungi tujuan kepentingan



politik kelompok tersebut. Dengan kata lain, komunikator politik dalam kategori politikus mewakili kepentingan kolektif. Meskipun demikian, ada juga politikus yang berperan sebagai ideolog yang aktif dalam merumuskan kebijakan, mengupayakan reformasi, bahkan mendukung perubahan revolusioner.

b. Komunikator profesional dalam politik

Menurut James Carey, komunikator profesional adalah individu yang menghubungkan kelompok elite dalam suatu organisasi atau komunitas dengan masyarakat umum. Dengan perspektif horizontal, mereka menjembatani dua komunitas bahasa yang dibedakan pada tingkat struktur sosial yang sama. Carey menyatakan bahwa sifat komunikator profesional ini adalah bahwa pesan yang dihasilkannya tidak memiliki keterkaitan yang pasti dengan pemikiran dan tanggapannya sendiri. Kategori komunikator profesional melibatkan peran seperti jurnalis dan promotor.

c. Aktivistis atau komunikator paruh waktu

Kelompok komunikator politik yang termasuk dalam kategori ini adalah individu yang terlibat cukup aktif dalam kegiatan politik atau komunikasi politik, tetapi tidak menjadikan hal tersebut sebagai pekerjaan utama mereka. Aktivitas komunikasi politik yang dilibatkan dalam kategori ini meliputi peran sebagai juru bicara, pemuka pendapat, dan pengamat. Meskipun tidak sepenuhnya terfokus pada komunikasi politik sebagai pekerjaan utama, mereka tetap berperan penting dalam membentuk opini publik dan memengaruhi dinamika politik.

2. Pesan

Pesan dalam konteks komunikasi politik merujuk pada informasi atau materi yang terkait dengan peran negara dalam melindungi segala kepentingan masyarakat atau warga negara. Pesan tersebut dapat berwujud keputusan, kebijakan, atau peraturan yang memiliki dampak langsung terhadap kepentingan keseluruhan masyarakat, bangsa, dan negara. Artinya, pesan komunikasi politik mencakup berbagai aspek kehidupan



publik yang melibatkan keputusan, tindakan pemerintah, norma-norma yang memengaruhi kesejahteraan, dan keamanan seluruh warga negara. Pesan ini tidak hanya mencakup informasi tentang kebijakan pemerintah, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab negara dalam menjaga keadilan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

3. Media

Dalam menjalankan komunikasi politik, para komunikator politik menggunakan berbagai saluran komunikasi politik dan saluran komunikasi persuasif politik yang memiliki kemampuan menjangkau berbagai lapisan masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun tipe-tipe saluran komunikasi politik yang dimaksud melibatkan hal sebagai berikut.

a. Komunikasi massa

Komunikasi massa merupakan proses penyampaian pesan oleh komunikator politik kepada komunikan melalui media komunikasi massa, seperti surat kabar, radio, dan televisi. Melalui saluran ini, informasi politik dapat tersebar luas dan mencapai audiens yang besar.

b. Komunikasi interpersonal

Komunikasi interpersonal adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan secara langsung atau tatap muka. Contohnya, melibatkan dialog, lobi, konferensi tingkat tinggi (KTT), dan berbagai bentuk interaksi langsung lainnya.

c. Komunikasi organisasi

Komunikasi organisasi melibatkan proses penyampaian pesan oleh komunikator politik kepada komunikan melalui saluran vertikal (dari atas ke bawah) dan horizontal (dari kiri ke kanan) sejajar. Contohnya, termasuk komunikasi antarsesama atasan dan komunikasi sesama bawahan dalam suatu struktur organisasi politik.

Selain itu, terdapat tipe saluran komunikasi persuasif politik yang melibatkan hal sebagai berikut.



- a. Kampanye massa
Kampanye massa merupakan proses penyampaian pesan persuasif, berupa program asas dan platform partai politik oleh komunikator politik kepada calon pemilih melalui media massa cetak, radio, atau televisi. Tujuannya adalah untuk memengaruhi pemilih agar memilih partai politik yang sedang dikampanyekan.
 - b. Kampanye interpersonal
Kampanye interpersonal melibatkan proses penyampaian pesan persuasif kepada tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh luas terhadap calon pemilih. Komunikator politik berusaha meyakinkan tokoh-tokoh ini untuk menyuarakan dukungan terhadap partai politik yang sedang dikampanyekan.
 - c. Kampanye organisasi
Kampanye organisasi melibatkan proses penyampaian pesan persuasif oleh komunikator politik kepada kader, fungsionaris, dan anggota dalam suatu organisasi partai politik. Komunikator politik berupaya memengaruhi anggota organisasi untuk memilih partai politik yang menjadi fokus kampanyenya.
4. Khalayak komunikasi politik
Dalam konteks komunikasi politik, khalayak atau komunikan merujuk pada semua individu yang termasuk dalam struktur politik negara, baik itu dalam infrastruktur maupun suprastruktur. Secara spesifik, kelompok ini mencakup semua pihak yang secara legal terikat oleh konstitusi, hukum, dan lingkup komunikator negara.
 5. Efek (umpan balik)
Menurut Ball Rokeah dan De Fleur, efek atau akibat yang mungkin timbul dari proses komunikasi dapat dibagi menjadi tiga kategori berikut ini.
 - a. Terdapat efek kognitif yang terkait dengan pengetahuan individu terhadap pesan yang disampaikan. Dalam konteks komunikasi politik, efek ini mencakup penciptaan dan penyelesaian ambiguitas dalam pemikiran, penyediaan bahan mentah untuk interpretasi



personal, perluasan realitas sosial dan politik, penyusunan agenda, serta pengaruh media yang berada di atas sistem kepercayaan masyarakat.

- b. Terdapat efek afektif yang terkait dengan pemahaman individu terhadap pesan yang disampaikan. Dalam komunikasi politik, efek ini mencakup tiga aspek, yakni kemampuan seseorang untuk mengklarifikasi atau mengkristalkan nilai politik melalui komunikasi, penguatan nilai-nilai komunikasi politik oleh komunikan, serta potensi pengurangan nilai-nilai yang dianut.
- c. Terdapat efek konatif atau perubahan perilaku yang terkait dengan perubahan tingkah laku individu dalam mengimplementasikan pesan komunikasi politik yang diterima dari komunikator politik.

Hubungan Sistem Politik dan Sistem Komunikasi

Sistem politik dan sistem komunikasi, dua entitas kompleks dalam struktur sosial manusia, senantiasa berjalan beriringan serta terjalin dalam suatu keterkaitan yang erat. Untuk memahami interkoneksi di antara keduanya, perlu memahami bahwa suatu sistem dalam konteks ini sistem politik, bukanlah entitas tunggal melainkan sekumpulan unsur atau subsistem yang saling berinteraksi, membentuk suatu kesatuan yang lebih besar (Sutomo, 2019: 9).

Definisi sistem politik, seperti yang dirumuskan oleh David Easton dalam Sutomo (2019), menggambarkan suatu rangkaian interaksi yang diabstraksikan dari totalitas perilaku sosial, di mana nilai-nilai otoritatif dialokasikan kepada masyarakat. Sebagai suatu sistem yang kompleks, sistem politik terdiri dari subsistem-subsistem yang masing-masing memiliki fungsi khusus. Struktur politik, sebagai hasil dari subsistem-subsistem ini dapat dibagi menjadi infrastruktur politik dan superstruktur politik.

Infrastruktur politik melibatkan elemen-elemen dasar yang menopang fungsi sistem politik, sementara superstruktur politik mencakup elemen-elemen yang lebih kompleks dan berkaitan dengan pemberian otoritas dan



kontrol. Dalam konteks ini, mekanisme menjadi penting untuk menjaga keseimbangan dan berjalannya suatu sistem politik. Setiap struktur politik perlu berinteraksi dengan struktur politik lainnya, berdasarkan fungsi khusus yang dimiliki oleh masing-masing struktur tersebut.

Dalam perjalanannya, suatu sistem politik membutuhkan sarana komunikasi yang efektif agar setiap elemen di dalamnya dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan lancar. Interaksi antarstruktur politik yang terjadi sebagai bagian integral dari suatu sistem politik dapat dianggap sebagai unsur-unsur dari sistem komunikasi. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua unsur dalam sistem komunikasi selalu menjadi bagian dari struktur politik. Meskipun demikian, setiap sistem politik mengembangkan jaringan komunikasi politiknya sendiri sebagai upaya untuk memfasilitasi interaksi dan pertukaran informasi di dalamnya.

Walaupun demikian, ketika mengelompokkan sistem politik ke dalam dua sifat utama, yakni sistem politik yang demokratis dan sistem politik yang tidak demokratis terlihat jelas adanya dua pola komunikasi yang berbeda sebagai berikut (Sutomo, 2019: 10).

1. Pada sistem politik yang demokratis, pola komunikasi politik tatap muka muncul sebagaimana yang diidentifikasi oleh Nimmo pada tahun 1984 yang disebut sebagai pola komunikasi dari satu kepada satu. Dalam konteks ini, komunikasi politik tatap muka menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat serta membentuk partisipasi politik yang aktif. Komunikasi politik melalui dialog langsung menjadi konsumsi harian serta mengindikasikan adanya iklim politik yang bebas dan demokratis. Masyarakat dapat dengan bebas dan tanpa rasa takut berbicara tentang kehidupan dan proses politik yang didukung oleh keterbukaan informasi melalui media massa.
2. Pola komunikasi kedua terjadi pada sistem politik totaliter, di mana komunikasi politik lebih sering terjadi dalam format satu arah dari pihak berkuasa kepada masyarakat luas. Pembicaraan politik dominan dalam media massa, terutama melalui surat kabar menciptakan kesempatan



yang sangat signifikan bagi anggota masyarakat untuk menyampaikan pikiran-pikiran mereka.

Secara keseluruhan, pemikiran politik yang disampaikan melalui surat kabar tersebut cenderung di dominasi oleh elite politik yang berkuasa. Dengan kata lain, surat kabar berfungsi sebagai alat propaganda politik yang sangat penting dalam konteks kehidupan politik sistem ini. Pembicaraan politik secara langsung atau tatap muka jarang, bahkan tidak umum ditemui dalam sistem politik jenis ini. Keterbatasan ini tidak hanya disebabkan oleh sifat ketatnya sistem politik, tetapi juga oleh tingkat kebebasan dan keterbukaan yang rendah dalam kehidupan politik. Hal ini termasuk keterbatasan kebebasan, independensi media massa, serta partai politik atau kelompok kepentingan.

Komunikasi Politik Kontemporer Indonesia

Isu-isu seperti keadilan, hukum, agama, kesukuan, rasial, kedaerahan, dan kesenjangan kemakmuran menjadi sorotan dalam politik Indonesia. Perkembangan ini semakin memperkuat dirinya melalui insiden-insiden kerusuhan di berbagai daerah. Isu-isu ini yang secara aktual berkembang, diperkirakan dapat mencetuskan keberingasan, dan kebrutalan sosial kapan saja. Kasus Situbondo (1998) dan kasus-kasus lainnya seperti Ambon (1999), Ternate (1999), dan Mataram (2000) meskipun dipengaruhi oleh permainan politik elit, menegaskan bahwa isu agama menjadi komoditas yang paling diminati dalam arena politik. Kasus-kasus seperti Sampang (2001) dan Tasikmalaya (1963 dan 2000), meskipun lebih terkait dengan isu rasial dan keadilan secara substansial, menyiratkan bahwa isu agama tetap memiliki peran penting dalam perdagangan politik (Redjo, 2015).

Hal serupa terjadi di Pasuruan (2000) dan Pekalongan (2000), di mana ketidakadilan antara pribumi dan non-pribumi diperbesar oleh perilaku aparat pemerintah, menjadi orientasi utama. Akibatnya, muncul indikasi bahwa terdapat praktik kolusi antara pemerintah dan pengusaha dalam berbagai aspek, seperti izin tempat peribadatan, pembebasan tanah,



pelebaran jalan, pembuatan tempat rekreasi, pembuatan lapangan golf, perkebunan besar, dan industri. Fenomena-fenomena ini mengakumulasi dan berkembang dalam persepsi masyarakat di daerah, sering kali berujung pada keberingasan dan kebrutalan sosial sebagai ekspresi dari akumulasi sentimen masyarakat yang terabaikan (Redjo, 2015).

Lingkaran keberingasan dan kebrutalan sosial umumnya memiliki banyak dimensi, menunjukkan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat tidak hanya dipicu oleh satu atau dua aspek saja. Fenomena ini terlihat dalam tindakan keberingasan sosial terhadap kelompok non-pribumi, terutama etnis Cina yang menyebar hampir merata di seluruh provinsi. Di Jawa Barat, lingkaran keberingasan ini termanifestasi melalui sentimen agama, ekonomi, dan keadilan. Praktiknya menghasilkan pengrusakan dan pembakaran fasilitas-fasilitas milik non-pribumi yang terjadi secara bersamaan. Catatan menunjukkan bahwa kerusuhan anti-Cina dimulai dari Cirebon tahun 1962, Bandung tahun 1973—1974, Tangerang dan Serang pada 1980-an, serta Purwakarta tahun 1995. Pola serupa terjadi di provinsi-provinsi lain di Jawa.

Apabila dilihat dari substansi masalahnya, isu atau sentimen rasial umumnya lebih berasal dari kesenjangan dalam penikmatan kemakmuran sebagai hasil dari proses pembangunan. Terlihat bahwa penikmatan kemakmuran oleh kelompok non-pribumi hampir merata di seluruh provinsi, melebihi rata-rata penikmatan oleh kelompok pribumi. Hal ini menciptakan ketidakpuasan sosial, di mana pembangunan yang seharusnya dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia ternyata lebih banyak dinikmati oleh kelompok non-pribumi. Isu penikmatan ekonomi yang di atas rata-rata ini mempercepat timbulnya kecemburuan rasial, terutama karena kelompok non-pribumi umumnya menganut agama yang berbeda dengan mayoritas pribumi. Akibatnya, isu rasial berubah menjadi isu agama dan karena agama memiliki pengaruh dominan dalam mengubah emosi massa, isu agama sering kali muncul dalam keberingasan sosial (Redjo, 2015).

Isu keadilan menjadi sorotan utama di tingkat lokal, terutama karena perilaku arogan para pejabat daerah. Arogansi ini mencakup berbagai



tindakan, seperti yang terlihat dalam pembangunan jalan oleh Bupati Kabupaten Asahan (Sumatera Utara) yang tidak mempertimbangkan pendapat penduduk sehingga memicu tindakan kekerasan dari masyarakat terhadap fasilitas-fasilitas pemerintah. Sikap otoritarianisme juga tecermin dalam tindakan Walikota-madya Surabaya yang merendahkan profesi wartawan, pernyataan Gubernur Jawa Tengah yang memaksakan pandangannya pada pembangunan kantor dan rumah dinas, serta keputusan Walikota-madya Ujung Pandang yang memicu demonstrasi yang menyebabkan kematian mahasiswa.

Reaksi masyarakat terhadap sikap arogan tersebut ditandai oleh ketakutan, praduga buruk (*prejudice*), dan kurangnya sikap toleransi. *Prejudice* termanifestasi dalam persepsi bahwa praktik-praktik pembangunan melibatkan kolusi antara penguasa dan pengusaha yang cenderung menguntungkan pihak tertentu dan merugikan rakyat secara umum. Isu keadilan juga tecermin dalam masalah tanah, di mana kepentingan umum sering kali diungkapkan secara propagandistis, sementara penikmatannya bersifat individual. Dalam konsep dan persepsi ini, masyarakat merasa dianiaya, menyiratkan bahwa hukum tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi mereka. Fenomena ini menciptakan ketidakpuasan dan perasaan bahwa sistem hukum tidak adil.

Isu kedaerahan menitikberatkan pada penggantian pejabat-pejabat daerah, yang semakin membesar karena campur tangan avonturir politik yang mempertentangkan dan memilah birokrasi antara sipil-militer serta antara Pusat-Daerah. Dikotomi atau pemilahan ini menjadi signifikan ketika pemerintah terlalu banyak campur tangan dalam penempatan pejabatnya di daerah. Isu kedaerahan juga mencakup masalah yang diangkat melalui sumber-sumber kharismatik daerah yang sering dipersonifikasikan dalam diri seorang tokoh atau elite daerah tertentu. Personifikasi tokoh kharismatis ini mampu memengaruhi massa, seperti yang terlihat dalam kasus Sampang, Situbondo, dan Nipah. Isu-isu kedaerahan ini memiliki korelasi yang kuat dengan perilaku politik massa, menciptakan dinamika politik yang kompleks di tingkat lokal.



Berdasarkan indikasi sejarah politik pemerintahan sentralistis, makna demokrasi, serta isu-isu politik yang berkembang, kekuatan politik kontemporer di Indonesia, apa pun nama dan sifat organisasinya akan memanfaatkan serta memainkan isu-isu politik sebagai strategi utama sebagai berikut (Redjo, 2015).

1. Isu kesenjangan mencakup kesenjangan ekonomi antara kaya dan miskin, antara pengusaha dan buruh, serta kesenjangan pendidikan, pembangunan, dan politik antara kota dan desa, Jawa dan luar Jawa, serta elite dan massa.
2. Isu demokratisasi dan hak asasi manusia mencakup kebebasan berpendapat, undang-undang politik, pemerintahan, serta keseimbangan keuangan antara pusat dan daerah, serta pelanggaran hak asasi manusia.
3. Isu kemiskinan, buruh, tani, pengangguran, dan ketergusuran masyarakat miskin atau pribumi menjadi fokus perhatian.
4. Isu kapitalisme, konglomerasi non-pribumi, nepotisme ekonomi partai politik, kapitalis semua anak pejabat, liberalisasi ekonomi, dan monopoli ekonomi pada produk pasar yang berpengaruh terhadap harkat hidup masyarakat banyak.
5. Isu pemanfaatan profesionalisme, intelektual/cendekiawan, distribusi jabatan politik dan karier, serta perilaku politik aparat yang menunjukkan arogansi partai politik dan kesombongan penguasa.
6. Isu transparansi kebijakan yang mencakup kelompok yang dimenangkan dan dikalahkan.
7. Isu-isu yang berkaitan dengan kesukuan, agama, ras, dan antargolongan.

Berkembangnya berbagai isu ini menunjukkan kegagalan komunikasi politik pemerintah dalam membangun opini publik dan berdampak pada terganggunya hubungan sosial, politik, dan ekonomi antara rakyat. Dalam konteks ini, peran komunikasi politik kontemporer Indonesia menjadi penting untuk mengatasi kemungkinan terjadinya disintegrasi bangsa melalui komunikasi diplomasi.





BAB II

TEORI KOMUNIKASI DAN MEDIA

Makna Komunikator Politik

Makna komunikator politik, terutama dalam kajian teoritis mengarah pada dua status utama yang dipegang oleh para komunikator politik. *Pertama*, terdapat komunikator politik yang menduduki struktur kekuasaan disebut sebagai komunikator elite berkuasa. *Kedua*, terdapat komunikator yang berada pada struktur masyarakat, atau dapat disebut sebagai elite masyarakat yang tidak menduduki struktur kekuasaan. Dalam setiap struktur

masyarakat, kaum elite selalu memegang posisi penting dan memiliki peran sebagai pembuat kebijakan (*policy maker*) (Syarbaini, 2021).

Konsep ini pertama kali di analisis secara sistematis oleh teoretikus Gaetano Mosca yang membagi masyarakat menjadi dua kelompok, yaitu kelompok elite dan kelompok massa. Kelompok elite dianggap sebagai pemimpin yang memiliki fungsi utama, sementara massa selalu berada dalam kelompok yang dipimpin. Pendapat serupa disampaikan oleh Schrool yang menggambarkan elite sebagai sekelompok individu dalam masyarakat yang menduduki posisi tinggi, baik dalam bidang ekonomi, pemerintahan, aparat kemiliteran, politik, maupun pekerjaan-pekerjaan bebas.

Pengertian tentang elite dapat diinterpretasikan secara umum atau spesifik, bergantung pada konteks masyarakat dan sistem yang berlaku di dalamnya. Secara umum, elite merujuk pada kelompok orang yang menduduki posisi tinggi dalam berbagai bidang. Namun, tipe atau karakteristik kaum elite ini dapat bervariasi tergantung pada bentuk masyarakat dan sistem yang berlaku dalam konteks tertentu.

Teori-teori klasik yang mengkaji isu elite melibatkan kontribusi dari berbagai pemikir, seperti C. Wright Mills, Raymond Aron, Harold Lasswell, Gaetano Mosca, dan sejumlah sarjana sosiologi serta ilmuwan politik lainnya. Analisis mereka membahas masalah elite dalam berbagai dimensi. Sebagai contoh, Schrool mengklasifikasikan tipe elite menjadi lima kategori yang berbeda sebagai berikut (Syarbaini, 2021).

1. Elite kelas menengah

Ini adalah kelompok elite yang berasal dari kalangan kelas menengah, seperti pedagang, tukang, dan beberapa golongan minoritas keagamaan atau kebangsaan. Mereka cenderung menggunakan setiap kesempatan untuk meningkatkan kedudukan sendiri. Dari segi ideologi, elite kelas menengah memiliki pandangan yang mudah berubah dan tidak tegas. Sikap dan pandangan mereka cenderung bersifat individualistis, tanpa pandangan yang jelas terkait masyarakat ideal. Mobilisasi sosial dilakukan untuk mencapai kepentingan pribadi.



2. Elite dinasti

Konteks ini merupakan kelompok elite yang memiliki hubungan keturunan atau dinasti yang kuat. Anggota elite dinasti ini sering kali mewarisi posisi dan kekuasaan dari generasi ke generasi. Mereka memiliki kecenderungan untuk mempertahankan tradisi dan warisan keluarga.

3. Pejabat kolonial

Elite ini terdiri dari para pejabat yang memegang peranan penting dalam administrasi kolonial. Mereka mungkin berasal dari kalangan penduduk setempat atau dari luar daerah koloni. Posisi dan kekuasaan sangat dipengaruhi oleh struktur administratif kolonial.

4. Kaum intelek revolusioner

Elite ini terdiri dari individu-individu yang memiliki latar belakang intelektual serta terlibat dalam gerakan revolusioner atau perubahan sosial. Mereka cenderung memiliki pandangan ideologis yang kuat dan bersifat progresif, sering kali menentang status *quo* untuk mencapai perubahan yang diinginkan.

5. Pemimpin-pemimpin nasional

Elite ini terdiri dari individu-individu yang memainkan peran utama dalam kepemimpinan nasional. Mereka mungkin berasal dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk kelompok elite lainnya dan memiliki pengaruh besar dalam pembentukan nasional.

Kelima tipe elite ini dapat diklasifikasikan dalam dua kategori menurut konsep Gaetano Mosca, yaitu dapat diuraikan sebagai berikut (Syarbaini, 2021).

1. Elite yang memerintah

Elite yang memerintah merupakan kelompok elite yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam pemerintahan. Mereka memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan politik dan administrasi.

2. Elite yang tidak memerintah

Elite yang tidak memerintah merupakan sisa besar dari seluruh elite yang tidak terlibat secara langsung dalam pemerintahan. Meskipun demikian, mereka tetap memiliki pengaruh dalam masyarakat.



Struktur masyarakat dapat menjadi panggung bagi para inisiator dan aktivis swasta dalam sistem komunikasi politik yang bersifat terbuka dan bebas. Berbeda dengan aristokrasi yang cenderung mempertahankan tradisi dan status *quo*, struktur masyarakat yang mendasari elite dinasti, seperti Jepang, Jerman, Iran, Amerika Latin, Timur Tengah, dan sebagian Asia, menekankan nilai tradisional sebagai dasar kewibawaan dan kekuasaan. Sebaliknya, elite *revolusioner* atau kaum intelek revolusioner menonjol dengan pandangan yang berfokus pada perubahan nilai lama yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Ideologinya bertumpu pada ilmu pengetahuan dan teknologi modern, mengupayakan pembangunan sistem sosial politik baru tanpa mengorbankan aspek ekonomi.

Negara-negara komunis seperti RRC, Soviet (sebelum musnah), Hungaria, Cuba, dan Ceko-slovakia mewakili contoh elite revolusioner yang mendedikasikan seluruh struktur masyarakat untuk mencapai tujuan revolusi. Di sisi lain elite nasional, seperti yang terdapat di Indonesia, Mesir, dan Mexico, muncul dari gerakan sosio-politik melawan penjajahan. Karakteristik plural dari elite nasionalistis sering kali menyebabkan konflik di antara kelompok elite tersebut dan sistem pemikiran mereka belum sepenuhnya mencerminkan aspirasi seluruh masyarakat.

Elite nasionalistis cenderung memiliki motivasi yang didorong oleh kejayaan dan keagungan bangsa, dengan tinjauan yang kurang memperhatikan realitas kehidupan infrastruktur. Meskipun semua elite memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dinamika sistem, pada umumnya berusaha mempertahankan status *quo* dan enggan untuk mengalami perubahan signifikan dalam kedudukan.

Elite politik memandang dan mengaplikasikan kekuasaan dalam konteks ideologi atau doktrin politik. Elite politik, terutama yang berada di puncak hierarki dianggap sebagai target utama dalam menerapkan ideologi atau doktrin politik. Penguasaan terhadap posisi puncak dianggap sebagai kunci untuk memiliki kekuasaan dan wewenang. Kekuasaan dalam sejarah dianggap memiliki peran yang menentukan dalam menentukan nasib banyak orang (Syarbaini, 2021).



Pemimpin dianggap sebagai personifikasi dari kekuasaan dan kepemimpinan yang sah memberikan legitimasi untuk menggunakan kekuasaan serta wewenang. Kekuasaan sendiri memiliki variasi, bentuk, dan sumber yang berbeda, tetapi selalu menjadi objek setiap elite politik. Kekuasaan hadir di berbagai level, termasuk dalam hubungan sosial dan organisasi sosial, namun puncak tertinggi kekuasaan terletak pada negara.

Negara dijelaskan memiliki kedaulatan yang dijalankan oleh sekelompok elite yang disebut sebagai *the ruling class*. *Ruling class* berperan dalam meyakinkan dan mendapatkan dukungan dari masyarakat agar kekuasaan mereka diakui dan diterima. Dalam konteks kajian komunikasi politik, elite politik dianggap sebagai komunikator utama baik dalam struktur kekuasaan maupun infrastruktur. Upaya untuk menanamkan kekuasaan harus didasarkan pada norma-norma, nilai, dan kepercayaan yang ada dalam masyarakat.

Komunikasi Politik dalam Kajian Empiris

Dalam konteks kajian empiris, komunikasi politik eksis di dalam ranah konkret atau berada dalam wilayah *das sein* yang dapat dianggap sebagai ilmu terapan. Dalam wilayah *das sein* atau ilmu terapan, komunikasi politik secara signifikan terkait dengan sistem politik tempatnya diterapkan. Secara umum, sistem politik di seluruh dunia menunjukkan karakteristik serupa, yakni terbagi menjadi dua subsistem sebagai berikut (Syarbaini, 2021).

1. Suprastruktur merujuk pada suasana kehidupan politik pemerintah atau lingkup politik pemerintahan. Ini mencakup segala hal yang terkait dengan kebijakan, keputusan politik, dan mekanisme pemerintahan secara umum.
2. Infrastruktur merujuk pada suasana kehidupan politik masyarakat atau lingkup politik sosial. Ini mencakup aspek-aspek politik yang terjadi dalam masyarakat, seperti partisipasi politik, opini publik, dan dinamika politik yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Dari dua suasana yang saling berpengaruh di atas, yakni infrastruktur dan suprastruktur, terutama dalam konteks komunikasi politik terdapat



keterkaitan yang erat antara keduanya. Infrastruktur sebagai fondasi material dan struktural tidak hanya menjadi landasan fisik, tetapi juga mencerminkan realitas sosial dan politik. Di sisi lain, suprastruktur mencakup norma, nilai, serta simbol-simbol dalam masyarakat juga harus mampu mengakomodasikan dan merefleksikan kehidupan yang terjadi di dalam infrastruktur. Dengan kata lain, keduanya saling memengaruhi dan menciptakan dinamika kompleks dalam ranah komunikasi politik.

Selanjutnya, untuk memahami dinamika sistem politik beserta kedua subsistemnya, penting untuk merinci konsep sistem politik itu sendiri. Robert Dahl dalam karyanya yang berjudul *Modern Political Analysis*, mendefinisikan sistem politik sebagai “setiap pola hubungan manusia yang bersifat persisten dan melibatkan secara signifikan kekuasaan, pengaruh, kontrol, pemerintahan, atau otoritas.” Dahl menggambarkan sistem politik sebagai suatu kerangka yang mencakup pola tetap hubungan manusia yang berkaitan dengan berbagai aspek kekuasaan dan pengaruh (Syarbaini, 2021).

Dari definisi tersebut, dapat diketahui pemahaman lebih lanjut tentang konsep pola tetap. Pola ini merujuk pada suatu kerangka yang telah mapan dan menjadi standar atau ukuran dalam kehidupan negara. Selain itu, pola tetap juga mencerminkan nilai-nilai yang mendasari sistem tertentu, menggambarkan keterkaitan antara norma dan struktur politik. Begitu juga dengan komunikasi politik, sebagai bagian dari sistem harus berada dalam suatu kerangka yang terdefinisi dengan jelas.

Secara empiris, sistem komunikasi dapat diklasifikasikan ke dalam empat sistem besar yang mencakup hal berikut:

1. komunikasi politik yang teraktualisasikan dalam sistem totaliter (sistem otoriter);
2. komunikasi politik yang teraktualisasikan dalam sistem liberal (sistem libertarian);
3. komunikasi politik yang teraktualisasikan dalam negara yang menganut sistem tanggung jawab sosial (*sistem social responsibility*); serta
4. komunikasi politik yang teraktualisasikan dalam sistem komunis.



Dari sudut pandang empiris, hampir semua negara mengklaim bahwa mereka menerapkan komunikasi politik dalam kerangka demokrasi. Pernyataan ini merujuk pada pandangan Jucuis yang menyatakan bahwa “Komunikasi baru akan berkembang jika tidak terikat oleh sejumlah peraturan yang mendominasi perkembangan opini publik dalam masyarakat. Komunikasi dari bawah ke atas, melalui saluran tidak resmi dapat berjalan hanya jika struktur pemerintahan membuka diri terhadap masukan dari bawah (infrastruktur).”

Lingkaran komunikasi seperti yang digambarkan oleh Jucuis hanya akan hadir dalam negara-negara demokrasi yang mementingkan hak asasi, menghargai pendapat, dan mempertimbangkan pemikiran orang lain. Contohnya negara-negara seperti Amerika Serikat, Prancis, Jerman, dan negara-negara Eropa Barat lainnya menciptakan lingkungan yang mendukung tendensi menuju demokratisasi komunikasi (*democratization of communication*). Di negara-negara demokrasi ini, lembaga input berfungsi dengan baik dan terdapat perkembangan pendapat umum secara wajar.

Ragam Komunikator Politik

Meskipun setiap individu memiliki kebebasan untuk berkomunikasi tentang politik, fenomena tersebut tampaknya dilakukan oleh sejumlah kecil orang secara konsisten dan berkelanjutan. Meskipun jumlah mereka relatif sedikit, para komunikator politik ini memegang peran sosial yang sangat vital, terutama dalam membentuk dan memengaruhi opini publik.

Dalam konteks klasifikasi komunikator politik yang disusun oleh Nimmo pada tahun 1989, ada tiga kategori utama: politikus, profesional, dan aktivis. Politikus sebagai kategori pertama mencakup individu yang memiliki ambisi untuk memegang atau telah memegang jabatan pemerintah, baik melalui pemilihan umum, penunjukan, atau karier administratif. Mereka bisa berasal dari eksekutif, legislatif, atau yudikatif, tanpa memandang jenis jabatan yang diemban.



Pentingnya memahami peran politikus dalam masyarakat diperjelas oleh Daniel Katz, sebagaimana dikutip oleh Nimmo (1989). Katz membedakan politikus menjadi dua jenis berdasarkan sumber kepentingan dalam proses politik, yaitu politikus ideolog (negarawan) dan politikus partisan. Politikus ideolog cenderung lebih fokus pada perjuangan untuk kepentingan bersama atau publik, sering kali menetapkan tujuan kebijakan yang lebih luas, berusaha mendorong reformasi, dan mendukung perubahan revolusioner jika dianggap bermanfaat bagi bangsa dan negara. Di sisi lain, politikus partisan lebih cenderung memperjuangkan kepentingan kelompok atau langganan tertentu dalam proses politik.

Dengan mendasarkan pada konsep tersebut, para politikus utama yang berperan sebagai komunikator politik yang menentukan di pemerintahan Indonesia dapat dikelompokkan sebagai berikut: pejabat eksekutif (seperti Presiden, Menteri, Gubernur); pejabat legislatif (ketua MPR, ketua DPR/DPD, ketua fraksi, anggota DPR/DPD); dan pejabat yudikatif (ketua/anggota Mahkamah Agung, ketua/anggota Mahkamah Konstitusi, jaksa agung, jaksa, dsb.) (Syarbaini, 2021).

Sementara itu, kategori kedua dalam klasifikasi Nimmo adalah komunikator profesional. Mereka adalah individu yang mencari nafkah melalui kemampuan berkomunikasi. Peran sosial komunikator profesional muncul sebagai hasil dari revolusi komunikasi yang melibatkan kemunculan media massa dan perkembangan media khusus, seperti majalah untuk audiens tertentu, stasiun radio, dan sejenisnya. Kehadiran media massa menciptakan publik baru yang aktif sebagai konsumen informasi dan hiburan serta komunikator profesional menjadi bagian integral dari proses ini.

Baik media massa maupun media khusus menggantungkan diri pada proses pembentukan dan pengelolaan simbol-simbol serta khalayak khusus. Dalam konteks ini, peran komunikator profesional menjadi sangat signifikan, sebagai individu yang memiliki keterampilan khusus dalam memanipulasi simbol-simbol. Dapat dimanfaatkan untuk membentuk hubungan antara individu atau kelompok yang memiliki perbedaan yang jelas atau dikategorikan.



James Carey, seperti yang dikutip oleh Nimmo (1989), mendefinisikan komunikator profesional sebagai “makelar simbol,” individu yang mampu menerjemahkan sikap, pengetahuan, dan minat suatu komunitas bahasa ke dalam istilah-istilah komunitas bahasa lain yang berbeda, namun menarik dan dapat dimengerti. Komunikator profesional beroperasi di bawah tekanan atau tuntutan dari dua sisi, yaitu tuntutan dari khalayak akhir dan sumber asal.

Analogi dengan politikus yang dapat dibedakan menjadi politikus ideolog dan partisan, kategori komunikator profesional mencakup dua kelompok utama: jurnalis dan promotor. Jurnalis dalam konteks ini merujuk pada siapa pun yang terlibat dalam media berita, termasuk reporter di koran, majalah, radio, televisi, atau media lainnya (Syarbaini, 2021).

Sebagai komunikator profesional, jurnalis memiliki peran khusus sebagai karyawan dalam organisasi berita. Mereka bertanggung jawab menghubungkan sumber berita dengan khalayak, memainkan peran penting dalam mengatur komunikasi antara politikus, publik, dan pemimpin. Dengan keterampilan dalam pengumpulan, persiapan, penyajian, dan penyerahan laporan mengenai peristiwa, jurnalis membantu menempatkan masalah serta peristiwa pada agenda diskusi publik. Mereka dapat mengatur interaksi antara politikus, menghubungkan politikus dengan masyarakat, dan membantu memandu perbincangan serta pemahaman mengenai masalah yang relevan dalam masyarakat.

Promotor, sebagai individu yang diberi bayaran untuk memajukan kepentingan langganan tertentu mencakup berbagai profesi dan peran dalam dunia komunikasi. Mereka dapat berasal dari berbagai latar belakang, seperti agen publisitas tokoh masyarakat yang berpengaruh, personel hubungan masyarakat di sektor swasta atau pemerintah, pejabat informasi publik di lembaga pemerintah, sekretaris pers di kepresidenan, personel periklanan perusahaan, manajer kampanye, dan pengarah publisitas kandidat politik, serta spesialis teknis seperti kameraman, produser, sutradara film, pelatih pidato, dan lain sebagainya. Spesialis teknik ini bekerja untuk kepentingan kandidat politik dan tokoh masyarakat lainnya. Semua ini menciptakan jaringan kompleks individu yang berperan sebagai makelar simbol dan penghubung antara kepentingan serta masyarakat.



Di sisi lain, aktivis merupakan komunikator politik utama yang berperan sebagai saluran antara organisasi dan individu secara interpersonal. Terdapat dua kategori utama dalam peran aktivis ini sebagai berikut (Syarbaini, 2021).

1. Terdapat juru bicara yang mewakili kepentingan yang terorganisir. Mereka tidak mengincar jabatan di pemerintahan dan tidak selalu merupakan profesional komunikasi, tetapi mereka terlibat dalam politik dan memiliki pengetahuan yang cukup dalam komunikasi politik. Peran juru bicara mirip dengan politikus partai karena mewakili tuntutan keanggotaan suatu organisasi. Di sisi lain, juru bicara juga menyerupai jurnalis, menyampaikan keputusan dan kebijakan pemerintah kepada anggota organisasi.
2. Terdapat pemuka pendapat yang beroperasi dalam jaringan interpersonal. Penelitian menunjukkan bahwa banyak warga yang dihadapkan pada keputusan politis mencari panduan dari individu yang mereka hormati. Pemuka pendapat ini memiliki pengaruh besar dalam membentuk pandangan orang lain dan dapat memengaruhi keputusan politis dengan meyakinkan orang lain untuk mengadopsi pandangan mereka. Sebagai individu yang diminta pandangan dan informasi, pemuka pendapat memegang peran kunci dalam membimbing dan memperkuat keputusan yang diambil oleh warga negara.

Dengan demikian, baik promotor maupun aktivis memiliki peran penting dalam membentuk opini dan keputusan politik dalam masyarakat.

Informasi Politik dari Media

Media berita memiliki peran yang sangat signifikan dalam menyampaikan informasi politik kepada masyarakat umum. Media berita berfungsi sebagai perantara penting yang mentransmisikan berbagai kabar politik kepada audiens yang luas. Dalam dinamika komunikasi, sering kali terjadi aliran gagasan dua tahap yang dimulai dari media massa menuju pemuka pendapat, selanjutnya



dari pemuka pendapat tersebut ke bagian penduduk yang mungkin kurang aktif secara politik.

Sejumlah studi telah memberikan dukungan terhadap kepentingan kepemimpinan pendapat melalui komunikasi interpersonal sebagai alat yang sangat efektif untuk memahami peristiwa-peristiwa politik yang signifikan. Menurut Nimmo (1989), komunikator politik dan kepemimpinan politik dapat dijelaskan sebagai suatu hubungan kompleks di antara individu-individu di dalam suatu kelompok. Dalam kerangka ini, satu atau lebih orang yang berperan sebagai pemimpin memiliki pengaruh signifikan terhadap orang lain yang menjadi pengikutnya, hal ini terjadi dalam konteks tertentu.

Dalam konteks kepemimpinan politik, Nimmo (1989) mengemukakan bahwa kepemimpinan bukanlah sekadar posisi atau status, melainkan suatu dinamika yang terbangun dari interaksi di antara individu-individu di dalam kelompok. Lebih jauh, ilmuwan politik Lewis Froman (dalam Nimmo, 1989) menyajikan beberapa ciri khas yang membedakan antara pemimpin dan bukan pemimpin dalam suatu kelompok.

Pemimpin dalam konteks kehidupan kelompok atau organisasi dapat diidentifikasi dengan sejumlah ciri dan perilaku khas yang membedakan dari anggota lainnya, yaitu (Syarbaini, 2021):

1. mendapatkan kepuasan yang bervariasi karena peran mereka sebagai anggota kelompok;
2. memiliki kekuatan yang lebih besar dalam mempertahankan nilai-nilai yang mereka anut;
3. memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi terhadap kelompok, hubungan dengan kelompok lain, pemerintah, serta masalah politik;
4. lebih sedikit kemungkinan untuk mengubah keyakinan, nilai, dan harapan karena tekanan eksternal;
5. lebih mungkin membuat keputusan yang didasarkan pada keyakinan, nilai, dan harapan sebelumnya; serta
6. lebih berfokus pada masalah, khususnya yang terkait dengan perolehan materi, dibandingkan kepuasan emosional atau pertanyaan yang penuh emosi.



Peran pemimpin tidak hanya terbatas pada aspek tugas, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan emosional. Pemimpin tidak hanya menetapkan dan bekerja untuk mencapai tujuan kelompok secara efisien, tetapi juga terlibat dalam kegiatan berorientasi orang yang melibatkan perhatian terhadap kebutuhan dan keinginan pengikut, penciptaan hubungan pribadi yang positif, pengembangan saling percaya, upaya memperkuat kerja sama, serta pencapaian solidaritas sosial. Dengan demikian, pemimpin tidak hanya bertindak sebagai figur otoritatif, tetapi juga sebagai fasilitator hubungan yang membangun komunitas yang kokoh dan harmonis.

Dalam konteks komunikasi politik, menjadi pemimpin politik memerlukan perilaku yang sesuai dengan harapan masyarakat terhadap seorang pemimpin. Para pengikut cenderung mengaitkan kepemimpinan dengan individu yang memenuhi definisi tentang karakteristik seorang pemimpin yang ideal. Beberapa komunikator politik memperoleh status pemimpin karena posisi formal yang mereka miliki di dalam struktur sosial atau kelompok terorganisasi secara jelas ditetapkan. Namun, ada juga komunikator yang menduduki posisi formal lebih dihargai oleh masyarakat karena atribut atau kontribusi mereka di luar peran keorganisasian. Komunikator politik yang menjadi pemimpin karena makna yang ditemukan masyarakat dalam aspek manusiawi, kepribadian, ketenaran, dan sebagainya, dapat disebut sebagai pemimpin simbolik (Syarbaini, 2021).

Mayoritas politikus, komunikator profesional, dan aktivis politik umumnya dapat dikategorikan sebagai pemimpin organisasi. Mereka memiliki posisi formal kepemimpinan di dalam jaringan komunikasi yang terorganisasi, seperti dalam pemerintahan sebagai pejabat terpilih atau dalam karier yang memerlukan kepemimpinan formal. Komunikator profesional, seperti wartawan yang bekerja pada media massa dan promotor yang mengadvokasi kepentingan suatu organisasi atau entitas politik tertentu juga merupakan bagian dari pemimpin organisasi. Di sisi lain, pemuka pendapat yang bekerja melalui jaringan komunikasi interpersonal di luar struktur organisasi yang diformalkan dapat dianggap sebagai pemimpin simbolik.



Kepemimpinan dan kepengikutan dianggap sebagai dua aspek yang saling melengkapi dalam menilai suatu transaksi tunggal. Bagi para pemimpin, terdapat beberapa ganjaran seperti memiliki peluang lebih besar untuk mengendalikan situasi dan menentukan nasib mereka sendiri. Kemampuan untuk memengaruhi orang lain, menegaskan kekuasaan di dalam kelompok, dan bahkan memperoleh keuntungan ekonomis juga menjadi daya tarik bagi mereka. Pemimpin organisasi biasanya menduduki posisi dengan gaji yang menarik, sementara pemimpin simbolik sering kali mendapat dukungan keuangan dari pendukung kaya.

Selain ganjaran ekonomis, terdapat juga keuntungan tambahan dari status yang lebih tinggi. Para pemimpin dapat menikmati rasa hormat dari anggota kelompok dan memiliki kendali atas sumber daya yang mencukupi melalui dukungan para pengikutnya. Rumah mewah, staf sekretaris dan asisten, transportasi yang nyaman, serta pelayan pribadi menjadi fasilitas yang menarik dan menjadi bagian dari ganjaran yang pantas bagi para pemimpin. Sementara itu, para pengikut juga dapat merasakan sejumlah keuntungan meskipun berbeda, seperti dukungan dan arahan dari pemimpin, menciptakan ikatan sosial, serta mendapatkan manfaat dari kesejahteraan yang dimiliki oleh pemimpin mereka.

Manururt Salisbury terdapat tiga keuntungan utama yang diperoleh oleh pengikut dari transaksi kepemimpinan-kepengikutan sebagai berikut (Syarbaini, 2021).

1. Keuntungan material menjadi bagian integral dari transaksi ini, mencakup pemberian ganjaran berupa barang dan jasa. Hal ini dapat mencakup aspek ekonomis seperti imbalan finansial atau manfaat-material lainnya yang diterima oleh pengikut sebagai hasil dari keterlibatan dalam kepemimpinan politik.
2. Keuntungan solidaritas menjadi elemen penting dalam transaksi kepemimpinan-kepengikutan, bersifat lebih sosial. Ini melibatkan pemberian ganjaran sosial kepada pengikut, seperti pengalaman bersama dalam kegiatan kelompok, sosialisasi, persahabatan, kesadaran status, identifikasi kelompok, keramahan, dan kegembiraan. Keuntungan ini



menciptakan hubungan sosial yang kuat di antara pengikut, menguatkan ikatan solidaritas, dan memberikan rasa kebersamaan yang memperkaya pengalaman dalam dunia politik.

3. Keuntungan ekspresif adalah aspek penting lainnya dari transaksi kepemimpinan-kepengikutan. Keuntungan ini berkaitan dengan ekspresi nilai-nilai dan kepentingan pribadi seseorang atau kelompok, bukan semata-mata untuk mencapai tujuan instrumen atau kepentingan tertentu. Sebagai contoh, beberapa orang dapat merasakan kepuasan hanya dengan mendukung seorang calon politik sebagai cara untuk menyampaikan pandangan terhadap isu-isu, seperti kejahatan, perang, kemiskinan, atau korupsi.

Dengan demikian, terdapat ikatan yang kuat di antara pemimpin dan pengikut yang terbentuk melalui kepuasan material, sosial, serta ekspresif yang diperoleh orang dari keterlibatan dalam politik. Kepuasan ini bersifat kurang berwujud seperti jenis sosioemosional, muncul dalam dan melalui proses komunikasi. Proses komunikasi ini menciptakan, mendorong, atau bahkan menghancurkan rasa solidaritas di antara individu serta memuaskan rasa pribadi dalam mengungkapkan harapan, cita-cita, ketakutan, dan kegelisahan.

Oleh karena itu, pada tingkat yang sangat luas, ikatan antara pemimpin dan pengikut dapat dianggap sebagai ikatan komunikasi, dengan komunikator politik utama memainkan peran strategis dalam bertindak sebagai pemimpin politik. Tugas mereka melibatkan penyiaran pesan-pesan yang dianggap bermakna dan memuaskan oleh para pengikut sesuai dengan kepentingan dan nilai-nilai yang dianut dan diyakini.





BAB III

MAKNA KOMUNIKASI DAN EFEK POLITIK DALAM KOMUNIKASI POLITIK

Efek Politik dalam Proses Komunikasi Politik

Pentingnya efek politik dalam proses komunikasi politik menjadi jelas melalui pandangan Lavidge dan Steiner, seperti yang dikutip dalam karya Saverin dan Tankard. Mereka mengakui bahwa proses komunikasi tidak hanya menjadi medium untuk menyampaikan pesan, tetapi juga menciptakan pengaruh atau efek yang dapat merubah pemahaman dan pandangan

penerima pesan. Konsep ini dikenal sebagai efek komunikasi, mencakup perubahan-perubahan yang terjadi pada diri penerima pesan komunikasi.

Lavidge dan Steiner mengelompokkan efek komunikasi ke dalam tiga dimensi atau kategori utama berikut ini (Syarbaini, 2021).

1. Dimensi kognitif (pemikiran/gagasan)

Dimensi ini memfokuskan pada perubahan dalam pengetahuan tentang suatu hal. Pesan-pesan komunikasi berperan dalam menyajikan informasi dan realitas yang dapat mengisi ranah pemikiran dan gagasan seseorang. Dengan kata lain, komunikasi politik dapat memengaruhi pemahaman dan pengetahuan individu tentang berbagai isu politik.

2. Dimensi afektif (emosi)

Dimensi ini menyoroti perubahan dalam sikap terhadap suatu hal. Pesan-pesan komunikasi mampu memodifikasi emosi dan perasaan terhadap suatu topik atau isu politik. Dalam konteks ini, komunikasi politik memiliki kemampuan untuk membangkitkan, mengubah, atau bahkan memperkuat respons emosional individu terhadap peristiwa politik atau figur publik.

3. Dimensi konatif (motivasi)

Dimensi ini menitikberatkan pada perubahan perilaku terhadap suatu hal. Lavidge dan Steiner menekankan bahwa pesan-pesan komunikasi dapat mengarahkan keinginan individu untuk melakukan sesuatu yang pada gilirannya memengaruhi partisipasi dalam proses politik. Dengan kata lain, komunikasi politik dapat memotivasi individu untuk terlibat aktif dalam kegiatan politik atau mengambil sikap tertentu terhadap suatu isu.

Brian McNair (2003) menyajikan pemahaman yang mendalam mengenai efek komunikasi politik melalui tiga perspektif yang membuka cakrawala pemikiran terhadap kompleksitas dampak yang mungkin terjadi sebagai berikut.

1. McNair menyoroti tingkat di mana perilaku komunikatif yang sarat makna dari para aktor politis, seperti pidato, konferensi, dan iklan politis mampu memberikan pengaruh terhadap perilaku serta sikap pen-



dengarnya. Dalam konteks ini, pemilihan kata, nada suara, dan strategi komunikasi politik dapat menjadi instrumen kuat yang mampu membentuk pandangan serta reaksi dari masyarakat terhadap politikus dan isu-isu politik.

2. McNair mengeksplorasi bagaimana proses politik dalam masyarakat demokratis, termasuk praktik dan prosedur dapat terpengaruh oleh pesan-pesan signifikan yang disampaikan melalui komunikasi massa. Ini mencakup pemahaman bahwa pesan-pesan politik yang tersebar melalui media massa dapat membentuk persepsi, memengaruhi narasi politik, dan bahkan memodifikasi dinamika partisipasi masyarakat dalam proses politik demokratis.
3. McNair membahas tingkat dampak yang bersifat sistemik, terkait dengan peningkatan komunikasi politik yang menekankan nilai-nilai masyarakat kapitalis, seperti yang terjadi di Inggris dan Amerika. Analisis ini mencakup pemahaman bahwa sistem komunikasi politik berkembang di dalam masyarakat kapitalis, tidak hanya memengaruhi individu secara langsung, tetapi juga membentuk struktur sosial yang lebih luas dan mengarah pada perubahan dalam dinamika politik secara keseluruhan.

McNair melanjutkan dengan mengajukan aturan umum, yaitu efek dari komunikasi politis tidak hanya dipengaruhi oleh isi pesan komunikasi politis itu sendiri. Sebaliknya, efek tersebut juga sangat ditentukan oleh konteks historis di mana proses komunikasi terjadi, terutama lingkungan politis yang berlaku pada setiap periode waktu tertentu. Ia menekankan bahwa mutu pesan, keahlian konstruksinya, dan kesempurnaan teknisnya menjadi tidak signifikan jika pendengar tidak bersedia menerima pesan tersebut. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Dick Morris seorang peneliti yang menyatakan bahwa tidak peduli seberapa besar pengeluaran atau seberapa baik produksi iklan politik, jika masyarakat tidak bersedia menerima dasar pandangan yang disampaikan semua itu menjadi tidak relevan.

McNair menyampaikan pentingnya pemahaman bahwa efek komunikasi politis dapat dinilai melalui tiga cara yang berbeda sebagai berikut.



1. Melalui pengamatan terhadap bagaimana audiens yang diharapkan (*intended audience*) dipengaruhi oleh pesan-pesan komunikasi politis, dengan mengukur respons atau pendapat umum mereka. Dalam hal ini, perbandingan dapat dilakukan dengan respons kelompok lain yang juga dianggap signifikan.
2. McNair menyoroti evaluasi terhadap perilaku pemilih sehubungan dengan strategi komunikasi yang diterapkan oleh peserta dalam sebuah kampanye politis. Dengan cara ini, peneliti dapat melihat sejauh mana strategi komunikasi dapat memengaruhi keputusan pemilih dalam konteks politik.
3. McNair menunjukkan cara mengisolasi efek dari unsur-unsur tertentu dalam komunikasi politis, termasuk komunikator, pesan, media, komunikasi, dan efeknya. Proses ini melibatkan teknik eksperimen yang terbatas secara metodologis, namun dianggap sebagai pendekatan yang efektif untuk memahami pengaruh spesifik dari setiap elemen komunikasi.

Dengan menggarisbawahi ketiga cara ini, McNair memberikan wawasan tentang kerangka analisis yang komprehensif untuk mengevaluasi efek komunikasi politis dari berbagai perspektif. Hal ini dimulai dari respons publik hingga dampaknya pada perilaku pemilih serta isolasi pengaruh masing-masing elemen komunikasi. Pendekatan ini memberikan dasar yang kokoh untuk memahami kompleksitas dan keragaman efek komunikasi politis dalam berbagai konteks dan situasi politik.

Menurut Nimmo (1993), proses komunikasi politik memiliki beberapa konsekuensi atau efek yang signifikan sebagai berikut.

1. Terdapat efek sosialisasi politik yang merujuk pada proses belajar tentang politik. Dalam konteks ini, komunikasi politik berperan sebagai sarana untuk mengajarkan dan membentuk pemahaman individu terhadap dunia politik, norma-norma, nilai-nilai, dan perilaku yang terkait dengan partisipasi dalam kehidupan politik.
2. Konsekuensi kedua adalah partisipasi politik. Proses komunikasi politik dapat memotivasi individu untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan



politik, seperti berpartisipasi dalam pemilihan umum, demonstrasi, atau kegiatan politik lainnya. Komunikasi politik memainkan peran penting dalam membentuk dan memelihara keterlibatan politik individu dalam masyarakat.

3. Memengaruhi pemberian suara. Komunikasi politik memiliki potensi untuk memengaruhi keputusan pemilih, memperkuat atau merubah preferensi politik, dan akhirnya memengaruhi cara untuk memberikan suara dalam pemilihan umum atau pemilihan lainnya. Dengan menyampaikan informasi, pesan politik, dan retorika yang persuasif, proses komunikasi dapat menjadi faktor penentu dalam pengambilan keputusan pemilih.
4. Konsekuensi keempat dari komunikasi politik menurut Nimmo adalah memengaruhi pejabat dalam pembuatan kebijakan. Komunikasi politik tidak hanya memengaruhi opini publik, tetapi juga dapat berdampak pada sikap dan keputusan pejabat yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Melalui berbagai saluran komunikasi, seperti media massa atau interaksi langsung dengan pemilih, pejabat politik dapat terpengaruh oleh opini dan tuntutan masyarakat.

Dengan demikian, Nimmo mengidentifikasi bahwa proses komunikasi politik memiliki dampak yang mencakup sosialisasi politik, partisipasi politik, pengaruh terhadap pemberian suara, dan pengaruh terhadap pejabat dalam pembuatan kebijakan. Analisis ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana komunikasi politik berperan dalam membentuk dinamika politik dan partisipasi masyarakat dalam proses politik.

Komponen Efektivitas Komunikator Politik

Komunikator politik memegang peran sentral sebagai salah satu faktor penentu efektivitas suatu pesan. Beberapa studi telah mengidentifikasi sejumlah karakteristik yang memainkan peran penting dalam menentukan



kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain. Richard E. Petty dan John T. Cacioppo dalam karyanya yang berjudul *Attitudes and Persuasion: Classic and Contemporary Approaches*, menguraikan bahwa ada empat komponen utama yang harus dimiliki oleh seorang komunikator politik guna mencapai efektivitas maksimal (Petty, 1996), yaitu *communicator credibility*, *communicator attractiveness*, *communicator similarity*, dan *communicator power*. Adapun komponen efektivitas komunikator politik adalah sebagai berikut.

1. Kredibilitas

Kredibilitas sumber dalam konteks komunikasi merujuk pada sejauh mana sumber dianggap memiliki keahlian dan dapat dipercaya oleh audiens. Kredibilitas sumber memiliki peran penting dalam menentukan efektivitas suatu pesan. Seiring dengan meningkatnya keahlian dan kepercayaan terhadap sumber informasi, pesan yang disampaikan cenderung menjadi lebih efektif. Kredibilitas sumber sendiri dapat dibagi menjadi dua aspek utama sebagai berikut.

- a. Keahlian sumber mengacu pada tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh sumber terhadap subjek yang sedang dikomunikasikan. Semakin tinggi tingkat keahlian sumber dalam suatu bidang, semakin besar kemungkinan pesan yang disampaikan akan diterima dengan baik oleh audiens. Dengan kata lain, keahlian sumber menciptakan otoritas yang memperkuat pesan yang disampaikan.
- b. Kepercayaan sumber melibatkan sejauh mana audiens percaya bahwa sumber dapat menyampaikan informasi tanpa memihak dan jujur. Kepercayaan ini melibatkan integritas sumber sebagai penyampai informasi yang dapat diandalkan. Para peneliti menemukan bahwa keahlian dan kepercayaan memiliki kontribusi independen terhadap efektivitas sumber dalam memengaruhi pendapat dan sikap audiens.

Dalam risetnya, Petty menunjukkan bahwa keahlian memiliki peran penting dalam merubah sikap, terutama ketika posisi yang diperjuangkan oleh sumber berbeda secara signifikan dari sikap awal penerima pesan. Sumber yang sangat kredibel mampu menghambat



pengembangan argumen tandingan, menjadikannya lebih persuasif dibanding sumber yang kurang kredibel.

Selain itu, kepercayaan sebagai aspek kedua dari kredibilitas juga memiliki indikator-indikator khusus, seperti tidak memihak, jujur, memiliki integritas, mampu, bijaksana, kesungguhan, dan simpatik. Indikator-indikator ini menjadi kunci dalam membangun kepercayaan audiens terhadap sumber, memperkuat posisi kredibilitas, dan akhirnya meningkatkan daya persuasif dari pesan yang disampaikan. Dengan demikian, kredibilitas sumber merupakan elemen kunci dalam komunikasi persuasif, memengaruhi sejauh mana suatu pesan dapat memengaruhi sikap dan perilaku audiensnya.

2. Daya tarik

Daya tarik dalam konteks komunikasi politik merujuk pada sejauh mana seorang komunikator mampu menarik perhatian dan memikat audiensnya. Daya tarik ini dapat timbul dari berbagai aspek, seperti penampilan fisik, gaya bicara, sifat pribadi, tingkat keakraban, kinerja, keterampilan komunikasi, dan perilaku secara keseluruhan. Sebagaimana dinyatakan oleh Petty (1996), dua komunikator mungkin ahli yang dapat dipercaya dalam suatu isu, tetapi salah satu di antaranya mungkin lebih disukai atau lebih menarik secara fisik daripada yang lain. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti penampilan fisik, gaya berbicara, dan perilaku yang semuanya berkontribusi pada daya tarik seseorang.

Daya tarik fisik sumber atau *source physical attractiveness* dianggap sebagai salah satu syarat kepribadian yang signifikan dalam konteks komunikasi politik. Komunikator yang menarik secara fisik umumnya lebih sukses dalam membangun ikatan dengan audiens dan lebih efektif dalam mengubah atau membentuk kepercayaan. Beberapa karakteristik yang dapat menggambarkan daya tarik seseorang meliputi tampan atau cantik, sensitif, hangat, rendah hati, gembira, dan lain-lain.

Pentingnya daya tarik ini tidak hanya bersifat visual atau fisik, melainkan juga mencakup aspek kinerja dan keterampilan komunikasi. Daya tarik dapat muncul melalui gaya berbicara, ekspresi wajah, dan



cara berkomunikasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, daya tarik tidak hanya terbatas pada penampilan fisik, tetapi juga melibatkan kemampuan komunikator untuk menyampaikan pesan dengan cara yang menarik dan meyakinkan.

Dalam konteks komunikasi politik, daya tarik dapat menjadi faktor penentu dalam memperoleh dukungan publik dan menciptakan citra yang positif. Komunikator yang mampu memadukan keahlian, keterampilan komunikasi, dan daya tarik fisik secara efektif cenderung lebih berhasil dalam meraih perhatian dan dukungan dari audiensnya. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan konsep daya tarik menjadi penting dalam upaya mencapai efektivitas komunikasi politik.

3. Kesamaan sumber

Ketika seorang sumber informasi disukai oleh audiens, hal itu mungkin disebabkan oleh adanya kesamaan antara sumber dan audiens dalam hal kebutuhan, harapan, dan perasaan. Dari perspektif audiens, sumber yang disukai dapat dianggap sebagai sumber yang menyenangkan (*source likability*), merujuk pada perasaan positif yang dimiliki audiens terhadap sumber informasi. Menentukan apa yang dianggap menyenangkan dapat bervariasi antara individu satu dengan lainnya, tetapi secara umum sumber yang dianggap menyenangkan adalah yang dianggap berperilaku sesuai dengan keinginan dan preferensi audiens yang mengamati.

Dengan kata lain, sumber yang dianggap menyenangkan adalah mereka yang bertindak atau mendukung keyakinan yang hampir sama dengan audiens. Sumber yang memiliki kesamaan dengan kebutuhan, harapan, dan perasaan audiens memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas komunikasi, bahkan dapat memberikan dampak yang lebih signifikan pada perubahan perilaku. Jika hal ini terjadi, sumber tersebut akan menjadi berarti bagi penerima pesan, menunjukkan bahwa sumber mampu mentransfer makna yang relevan ke produk atau jasa yang mereka komunikasikan.



4. *Power*

Menurut Petty (1996), *power* dalam konteks komunikasi politik merujuk pada sejauh mana sumber pesan memiliki kemampuan untuk memberikan penghargaan atau hukuman. Sumber yang memiliki kekuasaan dianggap lebih efektif dalam menyampaikan pesan dan mendapatkan penerimaan daripada sumber yang memiliki kekuasaan yang kurang atau tidak sama sekali. Dasarnya adalah manusia cenderung mencari penghargaan sebanyak mungkin dan menghindari hukuman.

Kelman (dalam Petty, 1996) menyatakan bahwa orang cenderung menyatakan lebih banyak persetujuan terhadap sumber yang memiliki kekuasaan untuk memaksimalkan penghargaan dan meminimalkan hukuman. Untuk menjadi seorang komunikator yang memiliki kekuasaan, Petty (1996) mengemukakan tiga syarat penting sebagai berikut.

- a. Penerima pesan harus percaya bahwa sumber memang dapat memberikan penghargaan atau hukuman.
- b. Penerima pesan harus yakin bahwa sumber akan menggunakan penghargaan atau hukuman tersebut untuk mencapai kepatuhan.
- c. Penerima pesan harus meyakini bahwa sumber akan mengetahui apakah mereka mematuhi atau tidak.

Dengan menciptakan dan menjaga kepatuhan, seorang komunikator dapat memengaruhi atau mempersuasi perilaku penerima pesan. Dalam upaya mempersuasi penerima pesan, ada dua faktor pendukung yang harus diperhatikan oleh komunikator, yaitu keterlibatan sumber dan kepentingan isu bagi penerima. Tingginya keterlibatan penerima pesan dapat meningkatkan efektivitas pesan dan isu yang relevan dengan kepentingan penerima pesan cenderung lebih mendorong efektivitas pesan tersebut.

5. Pesan politik

Pembicaraan politik dapat dibedakan menjadi tiga jenis utama menurut David V. J. Bell, yaitu pembicaraan kekuasaan, pembicaraan pengaruh, dan pembicaraan otoritas. Pembicaraan kekuasaan melibatkan pengaruh dengan ancaman atau janji, sementara pembicaraan pengaruh



mencakup nasihat, dorongan, permintaan, dan peringatan. Pembicaraan otoritas adalah pemberian perintah atau larangan, di mana penguasa yang memiliki hak untuk dipatuhi dianggap sebagai suara otoritas yang sah.

Selain jenis pembicaraan, sifat pembicaraan politik melibatkan kegiatan simbolik, di mana kata-kata dalam pembicaraan politik menjadi kunci. Kegiatan simbolik mencakup penyusunan makna dan tanggapan bersama terhadap lambang-lambang referensial dan kondensasi dalam bentuk kata-kata, gambar, dan perilaku. Dalam konteks ini, lambang-lambang politik, seperti gelar dan kedudukan politik tertinggi, membantu membentuk keyakinan, nilai, dan harapan masyarakat terhadap pemegang jabatan tersebut.

Pentingnya lambang-lambang politik, baik dalam bentuk kata-kata, gambar, maupun tindakan adalah untuk merangsang respons dan membentuk opini publik. Lambang-lambang tersebut menjadi petunjuk bagi masyarakat dalam menanggapi, memainkan peran tertentu terhadap pemerintah, dan mengubah pandangan, perasaan, serta harapan. Dengan demikian, sifat pembicaraan politik melibatkan kegiatan simbolik sebagai instrumen penting dalam membentuk opini dan respons masyarakat terhadap komunikator politik.

Bahasa sebagai sistem komunikasi memiliki peran sentral dalam pembicaraan politik, di mana penggunaan kata dan konstruksi kalimat dapat membentuk realitas dan makna yang dipersepsikan oleh masyarakat. Berger dan Luckman menganggap bahasa sebagai alat konseptualisasi dan narasi, menciptakan landasan untuk memahami realitas. Dalam konteks komunikasi politik, Fiske menekankan bahwa pemilihan kata dan cara penyajian realitas melibatkan pembentukan struktur konstruksi dan makna yang memengaruhi pandangan publik (Syarbaini, 2021).

Dalam dunia politik, bahasa digunakan sebagai alat untuk memanipulasi opini publik dan memenangkan dukungan massa. Para elite politik bersaing untuk menguasai wacana politik guna memajukan agenda



mereka, dengan propagandis fokus pada pengendalian opini publik. Semiotika, sebagai teori umum tentang tanda dan bahasa menawarkan pandangan tentang beragam pesan yang dihasilkan dalam komunikasi politik, termasuk makna, struktur, dan akibatnya.

Charles Morris menyoroti tiga dimensi semiotika yang relevan dalam konteks bahasa politik: semantika (studi makna), sintaktika (kaidah dan struktur tanda), dan pragmatika (analisis penggunaan dan akibat permainan kata). Dengan menggabungkan elemen-elemen ini, analisis semiotika memberikan pemahaman mendalam tentang kompleksitas bahasa politik.

Pragmatika, sebagai cabang semiotika meneliti penggunaan bahasa politik dalam konteks meyakinkan, membangkitkan massa, memperoleh otoritas sosial, mengekspresikan identitas pribadi, dan memberikan informasi melalui diskusi publik. Dengan demikian, bahasa politik bukan hanya mencerminkan realitas, tetapi juga menciptakannya serta memberikan landasan untuk strategi komunikasi politik yang berhasil.

Lavidge dan Steiner mengidentifikasi tiga dimensi atau kategori efek komunikasi, yaitu kognitif (pengetahuan), afektif (emosi), dan konatif (motivasi). Efek komunikasi adalah perubahan yang terjadi pada penerima pesan komunikasi yang dapat mencakup pengaruh pada pemikiran, sikap, dan perilaku seseorang.

Brian McNair, dalam analisisnya terhadap efek komunikasi politik memandangnya dari tiga perspektif. *Pertama*, tingkat di mana perilaku komunikatif aktor politis seperti pidato dan iklan politis dapat memengaruhi sikap dan perilaku pendengar. *Kedua*, bagaimana proses politik dalam masyarakat demokratis dipengaruhi oleh pesan-pesan signifikan dari komunikasi massa, dengan dampak sistemik terkait kenaikan komunikasi politis dalam masyarakat kapitalis.

McNair juga mencermati strategi komunikasi dalam kampanye politis, fokus pada perilaku komunikatif yang memiliki arti serta pengaruh pesan-pesan komunikasi terhadap proses politik masyarakat demokratis. Ia menyoroti pentingnya mengidentifikasi efek dari unsur-unsur



komunikasi tertentu, seperti komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek. Pendekatan ini melibatkan teknik survei, jajak pendapat, serta eksperimen untuk memahami dampak dan pembatasan metodologisnya dalam mengisolasi efek dari setiap unsur komunikasi (Syarbaini, 2021).

Efek Langsung atau Tidak Langsung Komunikasi Politik

Efek dari komunikasi politik dapat merasuki kehidupan bermasyarakat dan bersosial dengan beragam dampak yang mungkin terabaikan oleh sebagian orang. Meskipun beberapa individu mungkin kurang tertarik pada komunikasi politik, namun perlu diakui bahwa hal tersebut tetap memiliki pengaruh yang signifikan. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi elemen-elemen yang mungkin dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh komunikasi politik (Syarbaini, 2021).

Teori komunikasi politik mengidentifikasi dua jenis pengaruh, yaitu yang bersifat positif dan negatif, dapat dirasakan dengan cara langsung atau tidak langsung. Agar pemahaman lebih terarah, dapat ditinjau beberapa efek khusus dari komunikasi politik yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Meski contoh-contoh ini memberikan gambaran umum, tetapi perlu menyadari bahwa masih banyak dampak lain yang dapat dieksplorasi dalam konteks komunikasi politik.

Pemahaman terhadap efek komunikasi politik bukan hanya berguna untuk memperkaya pengetahuan tentang dinamika sosial dan politik, tetapi juga untuk merangkul kompleksitas hubungan antara pesan politik dan respons masyarakat. Hal ini menjadi semakin relevan ketika menyadari bahwa komunikasi politik tidak hanya memengaruhi individu secara langsung melalui pengetahuan, sikap, dan perilaku. Dalam pemahaman terhadap efek komunikasi politik ada penerapan jenis pemahaman sebagai berikut (Syarbaini, 2021).

1. Efek komunikasi politik secara langsung
Efek komunikasi politik secara langsung merujuk pada dampak strategi komunikasi politik yang dapat langsung memengaruhi individu atau



berlangsung dengan cepat. Dampak ini menghasilkan respons dari masyarakat, mendorong untuk mengambil tindakan tertentu. Beberapa contoh efek dari komunikasi politik secara langsung adalah sebagai berikut.

a. Demonstrasi

Demonstrasi atau unjuk rasa oleh masyarakat dapat terjadi secara langsung ketika mereka mendapatkan informasi yang dianggap tidak sesuai dari suatu proses komunikasi politik. Demonstrasi ini dilakukan dengan cepat dan umumnya berdampak langsung pada ranah politik pemerintahan. Kebijakan politik yang sebelumnya telah diimplementasikan mungkin akan mengalami pengaruh langsung setelah adanya demonstrasi tersebut.

b. Aksi Long March

Aksi Long March, pada dasarnya memiliki kesamaan dengan demonstrasi sebagai bentuk ekspresi aspirasi masyarakat terhadap kebijakan politik tertentu. Dampaknya juga dirasakan secara langsung terhadap kebijakan politik yang menjadi fokus sorotan. Jenis komunikasi politik ini merupakan salah satu bentuk yang memberikan dampak instan bagi masyarakat, memungkinkan mereka untuk secara kolektif menyampaikan pesan terkait kebijakan politik yang dianggap kontroversial atau merugikan.

c. Pencetusan petisi

Pencetus petisi juga dapat muncul sebagai hasil dari komunikasi politik yang terjadi. Umumnya, petisi diajukan ketika terdapat ketidaksetujuan terhadap suatu kebijakan. Fungsinya adalah untuk mengumpulkan dukungan agar dapat disampaikan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan tersebut. Petisi merupakan salah satu alat dalam media komunikasi politik yang digunakan untuk mendesak evaluasi ulang terhadap kebijakan politik yang dianggap kurang tepat. Dengan harapan bahwa melalui dukungan massa kebijakan tersebut dapat diperbaiki dan disesuaikan demi kepentingan masyarakat.



2. Efek komunikasi politik secara tidak langsung

Efek komunikasi politik secara tidak langsung merujuk pada pengaruh-pengaruh tertentu yang timbul sebagai akibat dari komunikasi politik, namun sering kali tidak langsung disadari oleh masyarakat. Meskipun kehidupan sehari-hari masyarakat terlihat biasa saja, sebenarnya terdapat perubahan yang terjadi tanpa disadari sebagai hasil dari perubahan kebijakan politik. Beberapa contoh efek komunikasi politik secara tidak langsung melibatkan dampak-dampak yang mungkin tidak secara langsung terlihat oleh individu, namun tetap memengaruhi dinamika sosial sebagai berikut (Syarbaini, 2021).

a. Dukungan calon pimpinan

Seseorang dalam memilih calon pimpinan dipengaruhi oleh komunikasi politik yang mereka terima. Pilihan tersebut dapat timbul karena paparan tanpa disadari terhadap berbagai kampanye yang disampaikan melalui komunikasi politik. Efek dari komunikasi politik ini dapat termanifestasi dalam bentuk kecenderungan untuk memilih seorang pemimpin tertentu, pada dasarnya merupakan hasil dari paparan dan pengaruh komunikasi politik yang telah mereka alami.

b. Dukungan kebijakan politik

Kebijakan politik dapat dengan mudah diterapkan jika sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Terkadang, masyarakat mungkin tidak menyadari bahwa pola kehidupan bermasyarakat telah mengalami perubahan, hal ini mungkin terjadi sebagai dampak dari komunikasi politik yang dilakukan tanpa menimbulkan penolakan yang signifikan. Oleh karena itu, unsur-unsur komunikasi politik dapat secara tidak langsung membentuk pandangan dan dukungan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan tertentu yang diterapkan.

c. Penerapan birokrasi

Pengalaman dalam mengikuti aturan-aturan birokrasi tertentu juga bisa menjadi hasil dari pengaruh komunikasi politik yang telah



diterima. Meskipun secara tidak langsung, peran media dalam menyampaikan informasi terkait aturan-aturan birokrasi dalam suatu pemerintahan dapat memengaruhi pemahaman dan ketaatan terhadap prosedur-prosedur tersebut. Efek dari komunikasi politik ini mungkin tidak selalu terasa secara langsung, tetapi tetap memberikan pengaruh pada cara berinteraksi dengan birokrasi dan kebijakan pemerintah.

3. Efek kognitif dalam komunikasi politik

Komunikasi politik memiliki keterkaitan erat dengan opini publik, melibatkan berbagai aspek seperti jabatan, kekuasaan, disiplin, organisasi, partai politik, kampanye, orasi, aktivis, politisi, dan istilah-istilah politik lainnya. Dalam pandangan Ramlan Surbakti, komunikasi politik diartikan sebagai suatu proses penyampaian informasi politik yang terjadi baik dari pemerintah kepada masyarakat maupun dari masyarakat kepada pemerintah. Inti dari komunikasi politik ini adalah penyampaian pesan atau tindakan yang mencakup aspek kekuasaan, kewenangan, kebijakan, pemerintahan, dan negara yang melibatkan aktor-aktor politik dalam dinamika komunikasi tersebut.

Tujuan utama dari komunikasi politik adalah memberikan nilai edukasi dan informasi mengenai dunia politik kepada khalayak melalui media massa. Proses penyampaian pesan oleh komunikator politik kepada khalayak membawa dampak politik yang dianggap sebagai respons atau penerimaan khalayak terhadap informasi yang diberikan. Efek komunikasi politik ini sering disebut sebagai opini publik, mencerminkan tanggapan masyarakat terhadap pesan politik yang disampaikan oleh komunikator.

Salah satu efek yang dapat terjadi dalam komunikasi politik dianggap sebagai efek komunikasi massa adalah efek kognitif. Efek ini terjadi pada tingkat pemikiran dan bersifat informatif bagi khalayak. Sebagai contoh, dalam kampanye pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, komunikator politik menyampaikan informasi mengenai calon dan wakil gubernur kepada khalayak atau komunikan. Proses



komunikasi politik ini menciptakan efek kognitif, mencakup peningkatan pengetahuan tentang calon dan wakil gubernur, pemahaman terhadap visi dan misi, serta memberikan khalayak kemampuan untuk menilai apakah calon dan wakil gubernur tersebut dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Efek kognitif dalam proses komunikasi politik menciptakan perubahan pada pemikiran dan pengetahuan masyarakat terkait isu politik yang disampaikan.

Dampak kognitif yang timbul dari interaksi dalam komunikasi politik dapat diterangkan sebagai berikut.

a. Pengetahuan (*knowledge*)

Pengetahuan memiliki peran penting dalam konteks komunikasi politik. Sebagai pintu gerbang pertama bagi komunikasi atau khalayak politik, pengetahuan memainkan peran kunci dalam menghadapi informasi politik yang disampaikan oleh komunikator. Ilmu politik melibatkan studi mendalam terhadap konsep politik, mencakup pemahaman tentang pengertian politik, tujuan politik, sistem politik, kenegaraan, legitimasi, perubahan sosial, pembangunan politik, dan aspek-aspek lainnya.

b. Pemahaman (*comprehension*)

Pemahaman merujuk pada proses pengamatan suatu ilmu atau cara belajar secara mendalam yang bertujuan untuk mencapai pemahaman, pengetahuan, dan pengertian. Khalayak politik akan memahami informasi yang disampaikan oleh komunikator terkait dengan politik. Pemahaman ini membantu khalayak untuk memiliki pemahaman yang mendalam terkait isu politik, menciptakan dasar bagi terbentuknya komunikasi politik yang efektif.

c. Penerapan (*application*)

Penerapan mengacu pada cara mempraktikkan atau menerapkan suatu metode, cara, ilmu, atau pengetahuan ke dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks komunikasi politik, penerapan oleh khalayak berarti kemampuan untuk mengikuti sistem politik yang telah diinformasikan oleh komunikator politik. Penerapan ini



menciptakan keterlibatan aktif khalayak dalam realitas politik dan implementasi konsep-konsep yang diperoleh melalui komunikasi politik.

d. Analisis (*analysis*)

Analisis mencakup pengkajian atau aktivitas menguraikan, membedakan, menggolongkan, dan mengelompokkan suatu objek yang diikuti oleh interpretasi. Dalam konteks komunikasi politik, analisis memiliki dampak positif karena informasi politik akan diolah dan dipindai sesuai dengan kontennya. Proses ini menghasilkan opini publik atau umpan balik dari khalayak, menggambarkan tingkat pemahaman dan tanggapan terhadap informasi politik yang disampaikan oleh komunikator.

e. Sintesis (*synthesis*)

Sintesis merupakan tindakan menyatukan gagasan, ide, ideologi, konsep, atau sifat yang berbeda-beda menjadi satu kesatuan, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan untuk membentuk pola yang terstruktur atau menciptakan pola baru. Proses penggabungan ini menghasilkan konseptual yang utuh dan lengkap, menciptakan pemahaman holistik terhadap informasi politik yang disampaikan.

f. Penilaian (*evaluation*)

Penilaian adalah suatu proses pengukuran yang dilakukan untuk mengambil keputusan dan mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks politik, penilaian sangat penting karena memungkinkan khalayak untuk mengevaluasi baik atau buruknya, positif atau negatifnya, serta kebaikan dan ketidakbaikan suatu lingkungan atau individu. Proses penilaian ini memungkinkan khalayak untuk membuat perbandingan dan mengambil keputusan berdasarkan informasi politik yang diterima.

g. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan melibatkan penyusunan strategi untuk memudahkan terwujudnya tujuan yang ingin dicapai. Dalam konteks sistem politik, perencanaan menjadi sangat penting, misalnya dalam



pembuatan peraturan negara dan kebutuhan politik lainnya. Proses perencanaan ini berfungsi sebagai landasan untuk mencapai tujuan tertentu dalam dunia politik.

h. Penciptaan (*creating*)

Penciptaan melibatkan proses merakit, membangun, mengubah, merumuskan, atau mendirikan semua unsur pokok untuk menciptakan sesuatu yang memiliki fungsi atau pola baru. Dalam konteks informasi politik, penciptaan terkait dengan cara khalayak politik merespons dan menggabungkan informasi yang diterima dari komunikator politik. Dengan demikian, khalayak dapat menciptakan pandangan baru dan membangun pola pikir baru berdasarkan informasi politik yang diterima.

Efek ini tidak hanya dialami secara langsung oleh massa, tetapi juga melalui media komunikasi. Tanpa disadari, efek ini akan membentuk persepsi yang berbeda di antara individu satu dengan lainnya. Dengan sendirinya, terjadi perbedaan pendapat pro dan kontra terhadap isi pesan politik yang disampaikan. Oleh karena itu, peran media komunikasi politik menjadi sangat penting untuk menjelma sebagai entitas yang bersikap netral serta tidak memihak kepada satu sisi pun. Hal ini bertujuan untuk memastikan penyampaian informasi yang seimbang dan adil dalam dunia politik.





BAB IV

ETIKA KOMUNIKASI PEMERINTAHAN

Perspektif Etika Komunikasi

Dalam konteks ini, etika komunikasi hadir sebagai upaya untuk merinci standar etika yang diadopsi oleh komunikator dan komunikan. Setidaknya, terdapat tujuh perspektif etika komunikasi yang dapat diperhatikan dan dielaborasi dalam kerangka pemahaman yang bersangkutan. Etika komunikasi mencoba untuk memahami dan mengatasi potensi tantangan etis yang muncul ketika pesan komunikasi melibatkan nilai, gagasan, dan ide. Tujuh perspektif etika tersebut memberikan kerangka pandang yang kaya

dan kompleks untuk menganalisis serta memahami implikasi etis dalam setiap tahapan komunikasi, dari proses penyampaian pesan hingga pemahaman dan tanggapan yang diterima oleh pihak yang terlibat dalam interaksi komunikatif. Adapun tujuh perspektif etika tersebut adalah sebagai berikut (Mufid, 2009: 185—186).

1. Perspektif sifat manusia

Sifat manusia yang paling mendasar adalah kemampuan berpikir dan kemampuan menggunakan simbol. Artinya, tindakan manusia yang benar-benar manusiawi berasal dari rasionalitas yang sadar terhadap apa yang dilakukan dan memiliki kebebasan untuk memilih melakukannya.

2. Perspektif dialogis

Komunikasi dipahami sebagai proses transaksi dialogal dua arah. Sikap dialogal ditandai oleh kualitas keutamaan, seperti keterbukaan, kejujuran, kerukunan, intensitas, dan lainnya. Setiap partisipan komunikasi diharapkan membawa sikap dialogal untuk menciptakan komunikasi yang efektif.

3. Perspektif situasional

Faktor situasional memiliki relevansi dalam penilaian moral. Etika memperhatikan peran dan fungsi komunikator, standar khalayak, derajat kesadaran, tingkat urgensi pelaksanaan komunikator, tujuan dan nilai khalayak, serta standar khalayak untuk komunikasi etis.

4. Perspektif religius

Ajaran agama dapat digunakan sebagai standar untuk mengevaluasi etika komunikasi. Pendekatan alkitabiah dalam agama membantu manusia menemukan pedoman yang lebih pasti dalam setiap tindakan.

5. Perspektif utilitarian

Standar utilitarian untuk mengevaluasi cara dan tujuan komunikasi dapat dilihat dari aspek kegunaan, kesenangan, dan kegembiraan. Penilaian etis didasarkan pada dampak positif secara umum yang dihasilkan oleh suatu tindakan komunikasi.



6. Perspektif legal

Perilaku komunikasi yang legal dianggap sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dianggap sebagai perilaku yang etis. Kepatuhan terhadap hukum adalah landasan dalam membangun etika komunikasi.

7. Perspektif politik

Dalam perspektif ini, etika berfokus pada pengembangan kebiasaan ilmiah dalam praktik berkomunikasi, memupuk sikap adil dengan membuat pilihan berdasarkan kebebasan, memberikan prioritas pada motivasi yang benar, serta menghargai perbedaan sebagai elemen yang memperkaya komunikasi.

Konsep Etika Pemerintahan

Etimologi etika dapat ditelusuri kembali ke akar kata Yunani, yaitu *ethos*, yang mengacu pada karakter, kebutuhan, dan kebiasaan. Magnis Suseno menyampaikan pandangan lain, menggambarkan etika sebagai analisis filosofis terhadap mata pelajaran yang membawa tanggung jawab moral dan konsep baik serta buruk. Faktor-faktor seperti konvensi, tradisi, lingkungan sosial, ideologi, agama, dan negara memiliki dampak penting pada studi etika sebagai panduan moral.

Pemahaman tentang etika dan etiket sering kali kabur dan memiliki interpretasi yang bervariasi. Ilmu moral yang dikenal sebagai etika mendalami hukum-hukum yang terkait dengan prinsip-prinsip moral yang harus diikuti dan bahkan diwajibkan. Mereka yang patuh pada prinsip-prinsip ini dianggap sangat terpuji, menyadari kesulitan etika ketika mengikuti aturan-aturan tersebut. Aktivitas etis adalah tindakan yang memegang teguh prinsip-prinsip moral serta perilaku etis mencerminkan tindakan tersebut.

Bertens (2007: 4) menyatakan bahwa istilah *ethica* digunakan oleh Aristoteles, menjadi dasar bagi kata etika dalam konteks filsafat moral. Sebaliknya, kata moral berasal dari bahasa Latin *mos*, serupa dengan arti etika dalam bahasa Yunani, yaitu kebiasaan atau tradisi. Oleh karena itu, istilah etika dan moralitas dapat digunakan secara bergantian, menggambarkan satu



sama lain. Contohnya, perilaku yang dianggap benar secara moral adalah tindakan yang menghormati sifat, kehormatan, dan martabat manusia tanpa memandang status atau peran seseorang dalam masyarakat. Di sisi lain, perilaku yang dianggap tidak etis atau tidak bermoral merujuk pada perbuatan yang secara moral dianggap buruk (Mustanir, dkk., 2023).

Menurut Bertens (2007: 6), terdapat tiga definisi etika yang perlu dipertimbangkan sebagai berikut.

1. Etika dapat diartikan sebagai standar moral dan cita-cita yang menjadi teladan bagi seorang individu atau sekelompok individu dalam mengendalikan perilakunya. Dalam konteks ini, etika dapat dianggap sebagai seperangkat nilai yang membimbing tindakan seseorang. Sebagai contoh, dapat merujuk pada etika suku Indian mencerminkan nilai-nilai yang menjadi pedoman bagi anggota suku tersebut.
2. Etika dapat diartikan sebagai sekelompok standar moral atau cita-cita. Dalam hal ini, etika dapat diwujudkan sebagai kode etik yang mengatur perilaku suatu kelompok atau profesi. Sebagai contoh, kode etik rumah sakit Indonesia menciptakan kerangka kerja moral yang harus diikuti oleh para tenaga medis dan staf rumah sakit dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawab.
3. Etika dapat dipahami sebagai studi tentang benar dan salah. Dalam konteks ini, etika menjadi filsafat moral yang mendalami prinsip-prinsip dasar yang mengatur tindakan manusia. Dengan kata lain, etika tidak hanya berfungsi sebagai panduan praktis, tetapi juga sebagai pemahaman filosofis terhadap moralitas.

Sementara itu, menurut Taliziduhu Ndraha (2005: 232), moral diartikan sebagai norma-norma sosial yang penilaiannya sebagian besar dipengaruhi oleh budaya, khususnya pola hidup masyarakat. Meskipun norma-norma ini dapat berasal dari budaya dan masyarakat, hati nurani pelaku juga memegang peranan penting dalam penilaian moral. Dengan kata lain, meskipun terdapat norma-norma yang diakui oleh masyarakat, keputusan moral seringkali dipengaruhi oleh hati nurani individu. Dalam konteks etika, hati nurani dapat dianggap sebagai faktor dominan dalam proses penilaian moral.



Prinsip dasar etika mencakup *beneficence*, yaitu berbuat baik terhadap sesama manusia dan tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia (Sugiharto dan Rachmat, 2000: 35). Dasar aturan ini dapat ditemukan dalam *golden rule*, mengajarkan prinsip “Cintai manusia (orang lain) seperti Anda mencintai diri sendiri”. Prinsip dasar ini sejalan dengan hakikat (*nature*), nilai-nilai kemanusiaan, serta harkat dan martabat.

Golden rule mencerminkan gagasan dasar bahwa orang pada umumnya merasa puas jika diperlakukan dengan baik oleh orang lain, oleh karena itu mereka merasa berkewajiban untuk membalas budi. Sebaliknya, jika seseorang mengalami perlakuan yang tidak adil, ia tidak boleh melakukan perlakuan yang sama kepada orang lain. Kesadaran akan hak dan kewajiban ini menjadi dasar untuk menjunjung tinggi hak diri sendiri serta hak orang lain atas kedamaian, kehormatan, kenyamanan, serta keamanan dalam hidup.

Kewajiban manusia untuk berbuat baik atau tidak, berbuat jahat terhadap orang lain tecermin dalam upaya untuk mempertahankan hak-hak tersebut. Sufianto (2016) menyatakan bahwa untuk mencapai kedamaian, kehormatan, kenyamanan, dan keamanan dalam hidup, yaitu dengan berbuat baik dan menghindari berbuat jahat merupakan kewajiban manusia.

Sejarah mencatat bahwa keinginan untuk hidup bahagia, tertib, teratur, serasi, nyaman, dan aman menjadi dasar terbentuknya etika. Dengan pertumbuhan aktivitas manusia, terutama dalam konteks pemerintahan, muncul kebutuhan akan etika yang lebih beragam. Kode etik administrator publik di Amerika Serikat pada tahun 1924, diadopsi oleh *International City of Management Association* (ICMA) menjadi tonggak penting dalam pengembangan konsep etika pemerintahan. Konsep ini mencerminkan respons terhadap aktivitas manusia dan menunjukkan pentingnya etika dalam mengelola pemerintahan serta kehidupan bersama.

Menurut The Liang Gie, kelompok tersebut telah mengusulkan sebuah kode etik bagi aparatur administrasi negara/pemerintahan yang mencakup berbagai aspek. Rincian permasalahan yang dibahas dalam kode etik tersebut adalah sebagai berikut (Mustanir, dkk., 2023: 6—7).



1. Menjunjung tinggi standar integritas moral, kejujuran, dan ketabahan. Dalam setiap aktivitas publik, aparatur administrasi negara diharapkan untuk menjunjung tinggi integritas moral, kejujuran, dan ketabahan. Hal ini bertujuan untuk membantu petugas menginspirasi masyarakat agar memiliki keyakinan dan kepercayaan pada lembaga pemerintah.
2. Pelayanan kepada masyarakat sebagai prioritas utama. Menyadari bahwa pelayanan kepada masyarakat harus diutamakan sebelum pelayanan kepada diri sendiri. Hal ini diharapkan dapat membantu petugas melayani masyarakat dengan rasa hormat, perhatian, sopan santun, dan tanggap.
3. Pandangan positif dan pembentukan kemitraan, yaitu mendekati organisasi dan tugas profesional dengan pandangan positif; serta menciptakan kemitraan yang terbuka, imajinatif, penuh pengabdian, dan penuh kasih sayang.
4. Pencegahan perolehan keuntungan pribadi yang berlebihan. Melayani dengan cara yang mencegah perolehan keuntungan pribadi yang berlebihan dari pemenuhan komitmen.
5. Menghindari hobi atau kegiatan mengganggu pelaksanaan tugas resmi.
6. Penghormatan dan pelestarian informasi. Berdasarkan hak istimewa yang diperoleh melalui pelaksanaan tugas resmi, menghormati, dan melestarikan informasi.
7. Penggunaan otoritas kebijakan hukum untuk kebaikan bersama.
8. Tanggung jawab terhadap pembaruan informasi dan pengelolaan urusan masyarakat, yaitu menerima tanggung jawab untuk selalu mengikuti perkembangan informasi baru mengenai isu-isu yang muncul; serta mengelola urusan masyarakat dengan kemampuan, kompetensi, ketidakberpihakan, efisiensi, dan efektivitas sebagai kewajiban pribadi.
9. Pemenuhan kesempatan yang sama dalam perekrutan, seleksi, dan promosi, yaitu dengan cara menjamin kesempatan yang sama dalam perekrutan, seleksi, dan promosi bagi semua lapisan masyarakat; serta mendukung, melaksanakan, dan memprioritaskan penempatan pekerja



sesuai dengan penilaian keterampilan serta metode tindakan yang tidak membeda-bedakan.

10. Pemberantasan diskriminasi, penipuan, dan salah penggunaan dana negara, yaitu menghapuskan segala bentuk diskriminasi, penipuan, dan salah urus dana negara yang melanggar hukum; serta membantu petugas lain ketika menghadapi kesulitan sebagai akibat dari upaya yang bertanggung jawab untuk melakukan koreksi atas diskriminasi, penipuan, salah urus, atau penyalahgunaan tersebut.
11. Hormat, dukung, tinjau, dan upayakan perubahan terhadap peraturan dan undang-undang lain yang menentukan bagaimana lembaga pemerintah, pegawainya, kliennya, dan semua warga negara harus berinteraksi.

Menurut Prof. Ryaas Raysid (2002: 55), etika pemerintahan termasuk dalam bidang etika praktis, jika dilihat dari dua sudut pandang, etika pemerintahan dapat dianggap sebagai suatu etika khusus atau terapan yang merupakan bagian dari etika sosial. Hal ini disebabkan karena etika pemerintahan mengandung nilai-nilai moral dan norma-norma yang berlaku bagi komunitas tertentu, yaitu penyelenggara pemerintahan.

Dalam teori, etika pemerintahan diartikan sebagai ilmu yang mempelajari pertimbangan moral dalam urusan pemerintahan (Ndraha, 2003: 320). Hubungan pemerintahan mencakup hubungan antara mereka yang memerintah dan mereka yang diperintah atau antara pemerintah suatu negara atau daerah dengan warga negaranya. Hubungan ini mencerminkan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kerangka negara. Etika diharapkan dapat memastikan bahwa hubungan pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dengan memperhatikan prinsip-prinsip moral.

Taliziduhu Ndraha (2003: 320) memaparkan bahwa pemikiran tentang etika pemerintahan berkembang pada tiga tingkatan yang berbeda, yaitu secara filosofis, secara historis, dan secara kategoris. Etika pemerintahan berada pada tingkatan kategoris yang dapat diturunkan menjadi etika profesi untuk setiap bidang pemerintahan.



Topik etika pemerintahan menyoroti moral dan cita-cita yang dijunjung tinggi oleh pegawai pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Prinsip-prinsip moral tersebut melibatkan pejabat dan pegawai pemerintah dan menjadi fokus etika pemerintahan, terutama ketika negara menjadi subjek etika politik. Etika pemerintahan mencerminkan prinsip-prinsip moral yang harus dijunjung tinggi oleh pejabat sipil (Mustanir, dkk., 2023). Pada pandangan Aristoteles, keutamaan hidup melibatkan berbagai aspek, seperti keberanian, pengendalian diri, kemurahan hati, keluhuran budi, menghargai diri sendiri, kelembutan, kejujuran, kesopanan, keadilan, dan persahabatan.

Hamdi (2002: 27) menjelaskan bahwa etika pemerintahan adalah ukuran kesopanan atau kebajikan dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk perilaku dan aktivitas yang pantas dari pejabat serta lembaga pemerintah. Setiap individu yang menyatakan diri sebagai pejabat pemerintah tunduk pada etika pemerintahan, oleh karena itu individu yang menjalankan tugas di lembaga pemerintahan menjadi fokus utama etika pemerintahan dan etika penyelenggaraan negara (Mustanir, dkk., 2023).

Pengertian etika pemerintahan dapat dipahami dari beberapa sudut pandang. Nurdin (2017) menyatakan bahwa etika pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana berperilaku terhormat dan patut sesuai dengan sifat-sifat yang melekat pada fitrah manusia. Sumaryadi (2010) menyatakan bahwa etika pemerintahan mengacu pada aturan perilaku tertentu bagi para profesional yang bekerja untuk pemerintah. Anggara (2012) mengartikan etika birokrasi sebagai norma atau nilai moral yang menjadi pedoman bagi seluruh pejabat pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya demi kepentingan umum dan masyarakat (Mustanir, dkk., 2023).

Widodo (2001: 241) menyatakan bahwa etika administrasi negara adalah suatu bentuk pengendalian terhadap penyelenggaraan negara agar dapat melaksanakan tugas, wewenang, dan kewenangannya. Etika administrasi negara harus menjadi dasar dalam menjalankan tugasnya dan tugas pokoknya melibatkan pelaksanaan kegiatan serta wewengangnya. Etika administrasi negara berada pada tingkatan kategoris yang menentukan sikap, tindakan, dan tingkah laku yang baik.



Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa mengemukakan beberapa amanat, salah satunya adalah agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian yang tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Aturan ini juga memberikan mandat kepada pejabat pemerintah untuk bersiap mengundurkan diri jika dianggap telah melakukan pelanggaran atau dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara (Mustanir, dkk., 2023).

Dalam konteks aktivitas sehari-hari, seperti merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik, sikap dan tindakan pejabat pemerintah dapat diarahkan oleh seperangkat standar dan norma etika yang terdapat dalam etika pemerintahan. Miftah Thoha (1995) menegaskan bahwa moral dan etika harus menjadi pertimbangan utama saat birokrasi mengambil keputusan atau tindakan untuk melaksanakan kebijakan.

Dengan demikian, ketetapan MPR-RI tersebut menekankan pentingnya pelayanan yang berkualitas dan rasa kepedulian tinggi terhadap masyarakat. Selain itu, mandat untuk mengundurkan diri jika terjadi pelanggaran menunjukkan komitmen untuk mempertahankan integritas dan tanggung jawab terhadap amanah yang diberikan oleh masyarakat, bangsa, dan negara. Etika pemerintahan menjadi landasan dalam mengatur perilaku dan keputusan pejabat pemerintah, memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi.

Pandangan tersebut menyimpulkan bahwa etika pemerintahan memiliki dua pengertian yang saling terkait seperti berikut ini.

1. Penyelidikan teoretis filosofis dan teologis

Etika pemerintahan dipahami sebagai penyelidikan teoretis filosofis dan teologis tentang tindakan pegawai negeri yang benar dan salah secara moral. Dalam konteks ini, etika pemerintahan menjadi subjek kajian yang bersifat filosofis dan teologis untuk memahami dimensi moralitas dari tindakan pegawai negeri.

2. Seperangkat standar moral dan sistem nilai

Etika pemerintahan juga diartikan sebagai seperangkat standar moral yang menjadi panduan perilaku aparat negara sehari-hari. Selain itu,



etika pemerintahan berfungsi sebagai sistem nilai dan norma yang membimbing tindakan dan keputusan para aparat negara dalam melaksanakan tugasnya.

Pentingnya etika pemerintahan dapat dipahami melalui konteks pejabat pemerintah yang bekerja untuk sektor publik, baik terpilih atau tidak dengan tanggung jawab melindungi kepentingan publik. Etika pemerintahan sering disebut sebagai etika pejabat publik karena melibatkan moralitas yang menduduki jabatan publik, yaitu pejabat publik. Oleh karena itu, etika pemerintahan pada hakikatnya merujuk pada moralitas yang menempati jabatan publik dan ini sering digunakan sebagai sinonim untuk etika pejabat publik.

Definisi penyelenggara pemerintahan yang luas mencakup penyelenggaraan di semua tingkatan pemerintahan, termasuk pusat, daerah, dan desa, serta melibatkan seluruh jajaran pemerintahan, baik pegawai negeri sipil maupun bukan serta semua birokrat yang menempati jabatan pejabat yang ditunjuk. Oleh karena itu, penerapan etika pemerintahan melibatkan seluruh lapisan pemerintahan untuk memastikan bahwa moralitas dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi terwujud dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

Secara luas, etika pemerintahan memberikan dua kontribusi utama terhadap pelaksanaan praktik pemerintahan sebagai berikut (Mustanir, dkk., 2023).

1. Petunjuk, acuan, dan referensi

Etika pemerintahan berfungsi sebagai petunjuk, acuan, dan referensi yang memberikan panduan saat melaksanakan penugasan pemerintahan. Dalam hal ini, etika memberikan pedoman moral yang membimbing pejabat pemerintah dalam mengambil keputusan dan menjalankan tugasnya.

2. Pedoman penilaian

Etika pemerintahan juga berperan sebagai pedoman untuk menentukan apakah keputusan dan perilaku pejabat pemerintah dianggap terhormat atau tercela. Etika menjadi dasar penilaian moralitas dalam praktik pemerintahan sehingga tindakan pejabat dapat dinilai dari perspektif moral.



Menurut Widodo (2001: 245), etika memainkan peran penting dalam administrasi negara karena mempertanyakan baik dan buruk, bukan hanya benar dan salah dalam sikap, tindakan, serta perilaku manusia terhadap satu sama lain di masyarakat dan organisasi atau bisnis. Dalam konteks penyelenggaraan negara, etika menjadi faktor penting karena dapat menjadi tolak ukur untuk menilai apakah tindakan penyelenggara negara dalam menjalankan kebijakan politik dapat dikategorikan baik atau buruk.

Etika pemerintahan dipraktikkan dengan mencakup prinsip-prinsip moral yang berlaku bagi individu yang bekerja pada lembaga pemerintah. Selain itu, etika juga mencakup prinsip-prinsip moral berlaku bagi lembaga pemerintah secara keseluruhan, serta prinsip-prinsip profesional yang berlaku bagi lembaga pemerintah. Penerapan ketiga asas ini diharapkan akan membawa pada asas-asas moral yang terwujud dalam peraturan perundang-undangan, nilai-nilai agama, sosial, dan budaya, serta nilai-nilai lain yang terkandung dalam asas penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan demikian, etika pemerintahan memberikan dasar moral yang komprehensif untuk membimbing praktik pemerintahan yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi dalam masyarakat.

Shafritz dan Russell dalam Somali (2012) menyajikan empat derajat etika dalam pemerintahan sebagai berikut.

1. Etika atau moral pribadi

Merujuk pada penilaian baik atau buruk yang berasal dari individu sendiri. Faktor-faktor yang memengaruhi termasuk pengaruh orang tua, keyakinan agama, budaya, norma, dan pengalaman sebelumnya. Etika pribadi bersifat subjektif dan bergantung pada sejumlah variabel yang membentuk pandangan moral individu.

2. Etika profesi

Terkait dengan seperangkat standar atau undang-undang yang mengarahkan perilaku kelompok profesional tertentu. Etika profesi mengatur tindakan dan perilaku individu yang berada dalam suatu profesi tertentu, menetapkan norma-norma moral yang harus diikuti oleh anggota profesi tersebut.



3. Etika organisasi

Etika organisasi merupakan seperangkat pedoman, baik tertulis maupun informal, yang mengarahkan bagaimana anggota suatu organisasi berperilaku dan bertindak. Etika organisasi mencakup norma-norma dan nilai-nilai yang harus diikuti oleh anggota organisasi untuk memastikan konsistensi serta integritas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

4. Etika sosial

Menyangkut aturan yang mengarahkan tingkah laku dan tindakan anggota masyarakat untuk memastikan keutuhan kelompok dan individu selalu ditegakkan serta dilestarikan. Etika sosial melibatkan norma-norma yang diterapkan dalam masyarakat untuk menjaga keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan dalam interaksi sosial.

Dalam konteks etika pemerintahan, terdapat poin-poin yang dikembangkan untuk membimbing perilaku pejabat pemerintah, antara lain sebagai berikut (Mustanir, dkk., 2023: 13).

1. Menegaskan pentingnya menghormati hak-hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan.
2. Menjunjung tinggi kejujuran, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain.
3. Menyoroti pentingnya sikap adil dan penuh kepatutan dalam berinteraksi dengan orang lain.
4. Mendorong memiliki kekuatan moral, ketabahan, dan keberanian dalam menghadapi tantangan moral.
5. Mengutamakan sederhana dan kemampuan untuk mengendalikan diri sebagai nilai-nilai yang dijunjung.
6. Menyertakan nilai-nilai keagamaan dan sosial budaya untuk mendukung tindakan profesional serta usaha semaksimal mungkin dalam masyarakat.



Etika dalam Pemerintahan

Menurut Aristoteles dalam bukunya yang berjudul *Etika Nikomacheia*, pengertian etika dibagi menjadi dua konsep. *Pertama*, *terminus technicus* yang mengartikan etika sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah perbuatan atau tindakan manusia. *Kedua*, *Manner dan Custom* yang membahas etika terkait dengan tata cara dan kebiasaan (adat) yang melekat dalam kodrat manusia, terikat dengan pengertian “baik dan buruk suatu tingkah laku atau perbuatan manusia.”

Irham Fahmi (2013) mendefinisikan etika sebagai hasil dari kata Yunani, yaitu *ethos* yang dalam bentuk jamaknya (*ta etha*) berarti “adat istiadat” atau “kebiasaan”. Adat tersebut membangun aturan kuat dalam masyarakat, mengatur bagaimana setiap tindakan mengikuti aturan-aturan, dan aturan-aturan tersebut membentuk moralitas masyarakat dalam menghargai adat istiadat yang berlaku. Moralitas sendiri mencakup praktik dan kegiatan yang membedakan antara yang baik dan buruk, dengan aturan-aturan yang mengendalikan kegiatan serta nilai-nilainya yang tersymbol di dalamnya, menjadi sasaran dari kegiatan dan praktik tersebut.

Frankena, seperti yang dijelaskan oleh Yosephus (2010), menyatakan bahwa etika (*ethics*) adalah cabang filsafat yang mencakup filsafat moral atau pembenaran-pembenaran filosofi. Sebagai suatu filsafat, etika berhubungan dengan moralitas dan pembenaran filosofis. Nilai-nilai etika mencakup aturan yang tertulis maupun tidak tertulis, mengatur perilaku dan sikap seseorang dalam interaksi dengan orang lain termasuk pemerintah.

Menurut Solomon, etika pada dasarnya merujuk kepada dua aspek yang signifikan, yaitu:

1. etika adalah bagian dari disiplin ilmu yang mendalami nilai-nilai yang dianut oleh manusia serta pembenarannya. Dalam konteks ini, etika menjadi salah satu cabang filsafat yang mendalaminya secara kritis dan filosofis; serta



2. etika juga menjadi inti permasalahan dalam disiplin ilmu itu sendiri, merangkum nilai-nilai hidup, dan hukum yang mengatur tingkah laku manusia (Mustanir, dkk., 2023: 53).

Dalam konteks etika organisasi, individu secara berkelanjutan membentuk pola sikap atau perilaku yang diharapkan oleh kelompok. Proses ini tidak hanya menciptakan dinamika individual, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan budaya organisasi secara menyeluruh yang selaras dengan tujuan kelompok. Dalam konteks ini, etika organisasi mengambil perspektif normatif, di mana sikap dan perilaku diukur serta dibatasi oleh peraturan yang telah ditetapkan.

Beberapa karakteristik organisasi yang dianggap ideal menurut konsep Weber juga dapat ditemukan dalam kajian etika organisasi sebagai berikut (Mustanir, dkk., 2023: 64).

1. Spesialisasi atau pembagian pekerjaan menjadi aspek penting dalam memastikan efisiensi dan keahlian yang optimal.
2. Tingkatan berjenjang (hierarki) menciptakan struktur organisasi yang terorganisir dengan baik, memfasilitasi alur informasi, dan pengambilan keputusan.
3. Organisasi yang mengikuti aturan dan prosedur kerja cenderung lebih dapat diandalkan dan konsisten dalam tindakan mereka. Keempat, hubungan impersonal menekankan pentingnya interaksi yang tidak dipengaruhi oleh faktor personal, mendorong transparansi, dan profesionalisme.
4. Pengangkatan serta promosi anggota atau pegawai berdasarkan kompetensi (sistem merit) menciptakan lingkungan di mana individu dihargai dan diakui berdasarkan kualifikasi serta kinerja mereka.

Menurut Wallis (1989), karakteristik setiap anggota birokrasi dapat diuraikan sebagai berikut (Mustanir, dkk., 2023: 64).

1. Bebas dari segala urusan pribadi.
Anggota birokrasi diharapkan dapat memisahkan urusan pribadi dari tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pekerjaan. Hal ini



bertujuan untuk memastikan fokus dan dedikasi penuh terhadap kinerja organisasi.

2. Mengerti tugas dan jabatan/kedudukan ruang lingkup.
Anggota birokrasi diharapkan memiliki pemahaman yang jelas terkait dengan tugas dan kedudukan ruang lingkup pekerjaan. Pemahaman ini penting untuk menjaga efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas.
3. Mengerti aturan tentang kewajiban dan kewenangan.
Pemahaman yang mendalam terhadap aturan yang mengatur kewajiban dan kewenangan anggota birokrasi menjadi aspek penting dalam memastikan pelayanan yang sesuai dan terorganisir.
4. Bekerja berdasarkan perjanjian kontrak kerja dengan kompetensi sesuai tugas dan kewajiban.
Anggota birokrasi diharapkan bekerja sesuai dengan perjanjian kontrak kerja yang melibatkan kompetensi yang sesuai dengan tugas dan kewajiban yang diemban.
5. Setiap anggota diangkat dan dipromosikan berdasarkan merit atau prestasi dan kompetisi.
Sistem pengangkatan dan promosi dalam birokrasi harus didasarkan pada prestasi serta kompetisi yang sehat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa individu terbaik menduduki posisi yang sesuai.
6. Diberikan kompensasi berdasarkan tarif standar yang sesuai kedudukan dan tupoksinya.
Anggota birokrasi seharusnya menerima kompensasi yang sesuai dengan tarif standar yang mencerminkan kedudukan dan tugas pokok mereka.
7. Wajib mendahulukan tupoksinya dari pada tugas-tugas lain.
Prioritas utama bagi anggota birokrasi adalah memastikan pelaksanaan tupoksinya sehingga tugas pokok menjadi prioritas utama dalam kesehariannya.
8. Ditempatkan dengan struktur karier yang jelas.
Struktur karier yang jelas membantu menciptakan jenjang karier yang terorganisir dengan baik dan memberikan panduan untuk pengembangan profesional anggota birokrasi.



9. Harus berdisiplin dalam perilaku kerjanya.

Disiplin dalam perilaku kerja menjadi landasan penting untuk menjaga etika dan integritas dalam lingkungan birokrasi.

Selain itu, Nicholas Henry menyatakan bahwa etika dalam pemerintahan diharapkan mampu membangkitkan kepekaan birokrasi dalam melayani masyarakat. Asas-asas umum dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Ini membentuk dasar untuk memastikan bahwa aparat pemerintah menjalankan tugasnya dengan integritas dan tanggung jawab dengan membentuk beberapa asas sebagai berikut (Mustanir, dkk., 2023: 65—66).

1. Asas kepastian hukum

Asas ini merujuk pada landasan negara hukum yang mengedepankan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman utama. Kepastian hukum mencakup aspek kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara, menegaskan pentingnya keberlakuan norma hukum untuk mencapai tatanan yang teratur dan adil.

2. Asas tertib penyelenggaraan negara

Asas ini menjadi pijakan bagi keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Tertib ini melibatkan koordinasi dan harmonisasi dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab negara, menciptakan lingkungan yang terstruktur dan seimbang.

3. Asas kepentingan umum

Asas ini menempatkan kesejahteraan umum sebagai prioritas utama dengan pendekatan aspiratif, akomodatif, dan selektif. Mengutamakan kepentingan umum ini berarti mengarahkan kebijakan dan tindakan pemerintah untuk memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

4. Asas keterbukaan

Keterbukaan adalah prinsip yang memastikan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara. Walaupun membuka diri terhadap



publik, asas ini tetap memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

5. Asas proporsionalitas

Asas ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Dalam konteks ini, kebijakan dan tindakan harus proporsional dengan tujuan yang hendak dicapai, tanpa mengorbankan prinsip keadilan.

6. Asas profesionalitas

Asas ini mengedepankan keahlian yang didasarkan pada kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Profesionalitas menjadi kunci dalam memastikan bahwa setiap tindakan penyelenggara negara dilakukan dengan integritas dan kualitas tinggi.

7. Asas akuntabilitas

Asas ini menegaskan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat. Akuntabilitas membentuk dasar untuk memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab kepada pemegang kedaulatan tertinggi, yaitu masyarakat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Asas-asas tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat, tetapi juga menetapkan norma etika yang tinggi dalam fungsi sebagai badan penyelenggara pemerintahan. Hubungan antara pusat dan daerah serta keseimbangan dalam pengambilan keputusan diarahkan untuk menciptakan tatanan pemerintahan yang efektif dan bertanggung jawab. Etika pemerintahan melibatkan tanggung jawab tidak hanya terhadap masyarakat, tetapi juga kepada negara sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan.







BAB V

ELITE POLITIK DALAM PROSES KOMUNIKASI POLITIK

Definisi Elite Politik

Secara umum, elite mencakup orang-orang yang berada dalam lapisan sosial yang tinggi. Namun, dalam konteks khusus, elite politik dapat diartikan sebagai kelompok orang yang sangat berpengaruh di bidang-bidang tertentu, terutama golongan minoritas yang memegang kendali kekuasaan (Syarbaini, 2021: 54).

Dalam studi sosial, golongan minoritas yang menduduki posisi puncak dan memiliki kekuasaan fungsional disebut sebagai elite. Elite ini terdiri dari individu-individu yang secara kolektif diangkat untuk melayani kepentingan suatu kelompok atau masyarakat dengan nilai-nilai sosial tertentu. Dari perspektif sosiologis dan politis, elite dapat dianggap sebagai kelas penguasa, yakni kelompok yang memiliki kendali baik secara formal maupun informal dalam suatu strata sosial.

Kedudukan elite memungkinkan untuk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan masyarakat. Pengaruh ini tidak hanya bersifat formal, melainkan juga informal, memungkinkan mereka untuk memengaruhi dinamika dan arah perubahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, elite politik tidak hanya memiliki kekuasaan formal, tetapi juga kemampuan untuk membentuk opini dan memengaruhi keputusan yang diambil dalam masyarakat.

Pentingnya elite politik dalam suatu masyarakat menciptakan hubungan timbal balik yang kompleks. Sebagai produk dari masyarakatnya, elite terus berkomunikasi dengan masyarakat dalam suatu bentuk hubungan yang dinamis. Proses ini memungkinkan transfer kreativitas dan semangat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa elite politik tidak hanya mencerminkan struktur kekuasaan, tetapi juga merupakan hasil dari interaksi yang terus-menerus dengan masyarakat, di mana ide dan semangat dari satu generasi dapat diteruskan dan dikembangkan oleh generasi berikutnya.

Elite politik dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu elite politik lokal dan elite non-politik non-lokal penjelasannya sebagai berikut.

1. Elite politik lokal merujuk pada individu yang menduduki jabatan politik di tingkat eksekutif dan legislatif dalam lingkup lokal. Mereka memperoleh posisi melalui pemilihan umum dan melalui proses politik demokratis di tingkat lokal. Kelompok ini mencakup tokoh-tokoh, seperti Gubernur, Bupati, Walikota, Ketua DPRD, dan pemimpin partai politik. Para elite politik lokal ini memiliki peran kunci dalam me-



rumuskan dan melaksanakan kebijakan politik di tingkat lokal, menciptakan dampak langsung terhadap masyarakat yang mereka layani.

2. Elite non-politik non-lokal adalah individu yang menduduki posisi strategis dan memiliki pengaruh signifikan untuk memimpin orang lain dalam berbagai aspek masyarakat. Kelompok ini mencakup elite keagamaan, elite organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, serta para profesional di berbagai bidang. Mereka tidak secara langsung terlibat dalam proses politik formal, tetapi memiliki pengaruh dalam pembentukan pandangan dan tindakan masyarakat.

Perbedaan antara kedua tipe elite ini tidak hanya terletak pada ruang lingkup keterlibatan, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hubungan antar-elite politik dan elite masyarakat, terutama dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah di tingkat lokal. Dalam sirkulasi elite, konflik dapat muncul baik dari dalam kelompok sendiri maupun antara kelompok pengusaha dan kelompok pesaing. Hal ini menunjukkan dinamika kompleks dalam interaksi dan persaingan antar-elite yang dapat memengaruhi dinamika politik dan masyarakat setempat.

Klasifikasi Elite Politik

Menurut Vilfredo Pareto, teoritis dan sosiolog Italia abad ke-19 dan awal abad ke-20, struktur masyarakat dapat dianalisis dengan mengategorikan individu ke dalam dua kelas utama sebagai berikut (Syarbaini, 2021).

1. *Governing elite* (elite yang memerintah)
Kelompok ini terdiri dari individu-individu yang menduduki posisi-posisi puncak dalam struktur sosial dan politik, memberikan mereka kendali terhadap pengambilan keputusan dan kekuasaan pemerintahan. Para anggota dari *governing elite* ini memiliki peran kunci dalam membentuk kebijakan, mengarahkan arah perkembangan masyarakat, dan memegang kendali atas sumber daya politik.



2. *Non-governing elite* (elite yang tidak memerintah)

Bagian kedua dari elite, yaitu *non-governing elite*, mencakup individu-individu yang juga berada di lapisan atas masyarakat, namun tidak terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan. Meskipun tidak memiliki peran dalam pemerintahan formal, *non-governing elite* dapat memegang kekuatan dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, budaya, dan sosial. Keanggotaan dalam kelas ini menunjukkan tingkat pengaruh dan status sosial yang tinggi, walaupun tidak terlibat dalam struktur pemerintahan langsung.

Kedua kelas ini kemudian dibandingkan dengan lapisan yang lebih rendah, yaitu non-elite, mencakup masyarakat umumnya. Pendekatan klasifikasi masyarakat Pareto memberikan pemahaman tentang hierarki dan dinamika kekuasaan dalam struktur sosial, menciptakan dasar untuk menganalisis interaksi dan perubahan dalam masyarakat.

Konsep pergantian elite juga dikembangkan oleh Pareto yang mengemukakan berbagai jenis pergantian elite, yaitu:

1. di antara kelompok-kelompok elite yang memerintah itu sendiri; dan
2. di antara elite dengan penduduk lainnya.

Pergantian yang terakhir dapat berupa pemasukan sebagai berikut:

1. individu-individu dari lapisan yang berbeda ke dalam kelompok elite yang sudah ada; dan
2. individu-individu dari lapisan bawah yang membentuk kelompok elite baru serta masuk ke dalam suatu kancah perebutan kekuasaan dengan elite yang sudah ada.

Pareto dan Mosca mendefinisikan elite sebagai kelas penguasa yang secara efektif memonopoli pos-pos kunci dalam masyarakat. Definisi ini kemudian didukung oleh Robert Michel, yakin bahwa “hukum besi oligarki” tak terelakkan. Dalam konteks organisasi apa pun, selalu ada kelompok kecil yang kuat, dominan, dan mampu mendiktekan kepentingannya sendiri. Sebaliknya, Lasswell berpendapat bahwa elite sebenarnya bersifat pluralistik. Sosoknya tersebar, bukan berupa sosok tunggal, dan individu-individu di dalamnya dapat berganti-ganti pada setiap tahapan fungsional dalam proses



pembuatan keputusan. Peran mereka pun dapat naik turun tergantung pada situasinya (Syarbaini, 2021).

Bagi Lasswell situasi menjadi lebih penting dalam konteks tersebut. Peran elite tidak terlalu menonjol dan status elite dapat melekat pada siapa saja yang kebetulan memiliki peran penting. Pareto dan Mosca juga menyebutkan bahwa dalam masyarakat selalu terbentuk kelas yang terbagi menjadi kelas yang memerintah dengan jumlah yang kecil, memegang semua fungsi politik, monopoli kekuasaan, dan mampu mencapai tujuan-tujuan keuntungannya dengan kekuasaan yang dimilikinya. Di sisi lain, ada kelas yang diperintah dengan jumlah yang lebih besar, diatur, dan dikontrol oleh kelas yang memerintah.

Mosca menolak semua klasifikasi bentuk pemerintahan, seperti aristokrasi, demokrasi, atau lainnya, baik pada masyarakat yang sudah maju maupun masyarakat yang kehidupan bernegaranya sedang berkembang. Menurutnyanya hanya ada satu macam bentuk pemerintahan, yaitu oligarki yang dipimpin oleh sekelompok elite.

Pemaparan Pareto dan Mosca memiliki celah lemah yang cukup mengaburkan pemahaman tentang elite karena tidak memperhatikan bidang interaksi lain dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan pada masanya kedua pemikir ini melihat dominasi negara yang begitu kuat atas rakyat. Pandangan yang lebih luwes dikemukakan oleh Dwaine Marvick. Menurutnyanya, terdapat dua tradisi akademik yang membahas elite.

Pertama, dalam tradisi yang lebih tua, elite dipandang sebagai sosok khusus yang menjalankan misi historis, memenuhi kebutuhan mendesak, melahirkan bakat-bakat unggul, atau menampilkan kualitas tersendiri. Mereka dipandang sebagai kelompok pencipta tatanan yang kemudian dianut oleh semua pihak. *Kedua*, dalam tradisi yang lebih baru, elite dilihat sebagai kelompok, baik kelompok yang menghimpun para petinggi pemerintahan atau penguasa di berbagai sektor dan tempat.

Pengertian elite dipadankan dengan pemimpin, pembuat keputusan, atau pihak berpengaruh yang selalu menjadi figur sentral. Field dan Higley menyederhanakan dengan mengemukakan bahwa elite adalah orang-orang



yang memiliki posisi kunci yang secara umum dipandang sebagai sebuah kelompok. Mereka adalah yang membuat kebijakan umum, melakukan koordinasi satu sama lain untuk menonjolkan peran.

Menurut Marvick meskipun elite sering dipandang sebagai satu kelompok yang terpadu, sesungguhnya di antara anggota-anggota elite itu sendiri apalagi dengan elite lainnya sering terjadi persaingan dan perbedaan kepentingan. Persaingan dan perbedaan kepentingan antar-elite sering terjadi dalam perebutan kekuasaan atau sirkulasi elite. Pemikir lain yang ikut mengklasifikasikan dan mendefinisikan elite adalah Robert Michels yang mengemukakan tentang “hukum besi oligarki”, yaitu kecenderungan dominasi oleh sekelompok kecil orang (minoritas) (Syarbaini, 2021).

Oligarki, sebagai suatu bentuk pemerintahan oleh sekelompok kecil orang yang menguasai keputusan-keputusan kunci, muncul dalam empat dimensi politik yang dapat menggambarkan berbagai aspek kehidupan masyarakat sebagai berikut.

1. Terdapat oligarki dari segi organisasi, di mana kekuasaan dan pengaruh terpusat pada sekelompok kecil individu dalam struktur organisasi tertentu.
2. Terdapat oligarki dalam kepemimpinan, menyoroti dominasi sekelompok kecil individu dalam posisi kepemimpinan suatu entitas, baik itu organisasi atau negara.
3. Terdapat oligarki dalam konteks hubungan organisasi dengan rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa sekelompok kecil elite memiliki kendali yang kuat atas hubungan dan interaksi antara organisasi atau pemerintahan dengan masyarakat umumnya.
4. Terdapat oligarki dalam kekuasaan pemerintahan, di mana sekelompok kecil individu memiliki dominasi yang signifikan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan di tingkat pemerintahan.

Pandangan ilmuwan sosial di atas, mengindikasikan bahwa elite memiliki pengaruh yang substansial dalam proses pengambilan keputusan. Pengaruh ini dapat bersumber dari penghargaan masyarakat terhadap kelebihan elite, dianggap sebagai sumber kekuasaan. Dengan demikian, oligarki tidak hanya



menjadi struktur pemerintahan yang terbatas pada level tertentu, tetapi juga mencakup aspek organisasi, kepemimpinan, hubungan dengan masyarakat, dan pengaruh terhadap kebijakan pemerintahan secara keseluruhan.

Miriam Budiardjo mengemukakan bahwa kekuasaan dapat berasal dari berbagai faktor, seperti posisi sosial, kekayaan, kepercayaan, agama, hubungan kekerabatan, kemampuan intelektual, dan keterampilan. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Charles F. Andrain yang menyebutnya sebagai sumber daya kekuasaan. Dalam perspektif Andrain, sumber daya kekuasaan mencakup elemen-elemen, seperti kontrol atas sumber daya fisik, kekayaan ekonomi, pengaruh normatif, karisma personal, dan keahlian khusus.







BAB VI

KOMUNIKASI POLITIK DALAM PEMERINTAHAN

Komunikasi Politik: Pemerintah dan Kebijakan

Komunikasi politik memiliki sifat yang multidisiplin, terutama dalam konteks hubungan antara proses komunikasi dan proses politik. Dalam perspektif politik, seperti yang dijelaskan oleh Graceau dalam karya Dam Nimmo (2005), proses politik diartikan sebagai pola interaksi yang menghubungkan antara warga negara dengan pembuat keputusan. Pola interaksi ini dapat melibatkan berbagai konteks, seperti kesetaraan, kerja sama, atau bahkan dalam konteks konflik. Dengan demikian, interaksi antara warga negara

dan pemerintah dalam suatu arena kebijakan dapat dianggap sebagai sebuah proses komunikasi dalam konteks politik, sebagaimana dikemukakan oleh Yudhatama (2017).

Dalam suatu proses komunikasi politik, tindakan individual sering kali menyatu ke dalam pola-pola tindakan bersama yang dikenal sebagai tindakan lembaga. Soemarno dikutip Lopulalan (2023) menjelaskan bahwa peleburan tindakan spontan individu ke dalam tindakan bersama yang bersifat kelembagaan terwujud melalui penggunaan simbol-simbol komunikasi, khususnya yang terfokus pada lembaga kekuasaan. Soemarno lebih lanjut memaparkan bahwa pengelolaan simbol-simbol ini dapat diakui keberadaannya melalui legalitas normatif, legitimasi demokratis, serta legitimasi moral.

Legalitas normatif memberikan jaminan berdasarkan norma-norma yang berlaku dalam menghasilkan produk kebijakan komunikasi yang mampu mengakomodasi kepentingan publik. Legitimasi demokratis memberikan jaminan karena didasarkan pada pengisian struktur kekuasaan yang dilakukan secara demokratis dengan menggunakan simbol-simbol artikulatif. Sementara itu, legitimasi moral menjadi penjamin keberadaan pengelolaan simbol-simbol kekuasaan dengan dilandasi pertimbangan etika tentang baik atau buruk, serta kemampuan untuk mempertanggungjawabkannya. Dengan demikian, kompleksitas komunikasi politik tecermin dalam dinamika interaksi antara simbol-simbol kekuasaan, norma-norma, legitimasi, dan pertanggungjawaban dalam suatu tatanan politik.

Jack Plano mengungkapkan bahwa komunikasi politik merupakan penyebaran aksi, makna, atau pesan yang terkait dengan fungsi suatu sistem politik, melibatkan elemen-elemen komunikasi seperti komunikator, pesan, dan sebagainya. Mayoritas komunikasi politik umumnya menjadi ranah kekuasaan lembaga-lembaga tertentu, seperti media massa, badan informasi pemerintah, atau partai politik. Walaupun demikian, segala bentuk komunikasi politik dapat ditemukan di berbagai lapisan sosial, mulai dari interaksi dua orang hingga skala ruang kantor parlemen sesuai dengan yang dikutip oleh Lopulalan (2023).



Dengan demikian, komunikasi politik dapat didefinisikan sebagai sistem komunikasi yang terkait dengan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat, bertujuan untuk kebaikan bersama bagi masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu (Saragih, 2017).

Perspektif lain mengenai komunikasi politik melihatnya sebagai suatu sistem di mana individu menyampaikan pesan politik kepada khalayak dengan tujuan tertentu. Pesan yang disampaikan oleh komunikator politik ini berupa informasi, seperti dalam sosialisasi kebijakan pemerintah. Contohnya, informasi mengenai kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) atau pelaksanaan Pilkada beserta kandidatnya. Pentingnya proses pematangan informasi menjadi sorotan karena hasilnya dianggap sebagai produk yang akurat dan dapat dipercaya dalam konteks komunikasi politik.

Komunikator politik dapat diidentifikasi sebagai pihak yang mengawali penyampaian pesan kepada pihak lain dalam kegiatan politik. Dalam konteks komunikasi politik, komunikator dapat dibedakan berdasarkan individu, lembaga, atau kelompok beberapa orang atau banyak orang (kolektif). Seorang tokoh atau pejabat, bahkan warga biasa dapat bertindak sebagai sumber dalam suatu kegiatan komunikasi politik dan dalam beberapa kasus dapat dianggap sebagai sumber individu. Di sisi lain, jika individu tersebut berbicara atas nama suatu lembaga atau organisasi, pada saat itu dapat dianggap sebagai sumber kolektif.

Sumber individu dan sumber kolektif saling terkait. Para pejabat birokrat sebagai sumber individu secara alami beroperasi dalam kerangka pelaksanaan dan pengawasan pemerintah atau birokrasi. Pada tingkat pemerintah, kebijakan direncanakan dan diputuskan untuk dilaksanakan. Katz dan Kahn, seperti yang dikutip oleh Lopulalan (2023) mendefinisikan seorang birokrat sebagai anggota suatu birokrasi yang bertugas melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan.

Birokrat memiliki batasan dalam ruang lingkup pekerjaannya, hanya dapat beroperasi dalam bidang yang telah memiliki aturan. Jika suatu hal belum memiliki dasar peraturan untuk pelaksanaannya, seorang birokrat



mungkin tidak merasa kompeten untuk melaksanakannya. Almond dan Powell, sebagaimana disampaikan oleh Hasmawati (2020), menggambarkan birokrasi pemerintah sebagai kelompok yang terdiri dari para petugas dan jabatan yang dihubungkan melalui hierarki terperinci dan tunduk pada pembuat aturan formal.

Birokrasi ditandai oleh spesialisasi tugas dan tanggung jawab, serta diatur oleh aturan/prosedur formal dan standar. Oleh karena itu, sebagai komunikator, para birokrat dianggap sebagai individu yang memiliki keterampilan teknis dalam bidangnya dan memiliki informasi esensial untuk pembuatan dan penegakan kebijakan publik. Dengan peran mereka, birokrat tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai penghubung yang menyampaikan informasi secara efektif kepada masyarakat terkait dengan kebijakan dan keputusan yang diambil.

Birokrat dan birokrasi memiliki tanggung jawab untuk mendukung kebijakan yang telah diputuskan oleh pemerintah dan menyebarkannya kepada masyarakat. Sebagai contoh, kebijakan tentang kenaikan tarif listrik dan BBM merupakan keputusan pejabat pada tingkat eksekutif yang telah disetujui melalui persetujuan legislatif. Para pejabat di birokrasi bertanggung jawab untuk mengomunikasikan kebijakan tersebut kepada masyarakat. Pemberitahuan tentang kebijakan kenaikan harga tersebut disetujui dan diumumkan oleh pembantu presiden, yaitu para menteri yang terkait. Kebijakan yang telah diputuskan dan disosialisasikan kepada masyarakat menjadi informasi sebagai produk. Informasi yang disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya dari masyarakat kepada pemerintah dapat menghasilkan pemahaman di antara keduanya.

Menurut Nasution, seperti yang dikutip oleh Lopulalan (2023), masyarakat membutuhkan informasi mengenai tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mereka. Sementara pemerintah membutuhkan informasi mengenai apa yang diinginkan dan diharapkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan kritik dan masukan dari masyarakat. Alfian menyatakan bahwa inilah cara kerja komunikasi politik seperti sirkulasi darah di mana tidak boleh ada hambatan dalam demokratisasi, seperti



pembungkaman oleh pemerintah, pembatasan pers, atau ancaman. Rakyat dan pemerintah harus berkomunikasi dengan cara yang santun. Selain itu, isi informasi dari kedua belah pihak harus benar, akurat, dan berkualitas tidak boleh didasarkan pada asumsi atau prasangka.

Fungsi komunikasi politik dalam pemerintahan dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Memberikan informasi kepada masyarakat luas.
Komunikasi politik berfungsi sebagai saluran utama untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas. Melalui berbagai media dan platform komunikasi, pemerintah dapat menyediakan informasi yang relevan dan akurat mengenai kebijakan, program, dan perkembangan terkini yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat.
2. Menjelaskan dan mendukung keputusan yang diambil.
Komunikasi politik juga berperan dalam menjelaskan dan memberikan dukungan terhadap keputusan yang diambil oleh pemerintah. Penjelasan ini mencakup alasan, tujuan, dan manfaat dari kebijakan tertentu agar masyarakat dapat memahaminya dengan lebih baik, sekaligus memperkuat legitimasi keputusan tersebut.
3. Mempertahankan nilai-nilai dan mempromosikan perilaku yang bertanggung jawab.
Komunikasi politik memiliki peran dalam mempertahankan dan mempromosikan nilai-nilai fundamental yang dipegang oleh pemerintah. Selain itu, melalui pesan-pesan komunikasi, pemerintah dapat mendorong perilaku bertanggung jawab di kalangan masyarakat serta menciptakan kesadaran akan norma-norma sosial yang diinginkan.
4. Mendukung dialog antara lembaga dan warga.
Fungsi penting dari komunikasi politik adalah menciptakan dan mendukung dialog antara lembaga pemerintahan dengan warga. Komunikasi yang efektif memungkinkan terciptanya saluran interaksi dua arah, di mana masyarakat dapat menyampaikan pandangan, aspirasi dan kritiknya kepada pemerintah, sementara pemerintah dapat merespons dengan lebih baik terhadap kebutuhan dan harapan warga.



Komunikasi politik dalam pemerintahan adalah proses penyampaian ide, strategi, dan gagasan pemerintah kepada kelompok masyarakat dengan tujuan agar tujuan negara dapat tercapai (Susanto, 2009). Dalam konteks ini, komunikasi pemerintah kategoris diidentifikasi sebagai komunikator, sementara masyarakat menjadi komunikan. Namun, dinamika ini bisa berubah, di mana masyarakat menjadi komunikator saat menyampaikan gagasan kepada pemerintah. Pemerintah berperan sebagai komunikan untuk menganalisis harapan dan aspirasi masyarakat. Pemerintah harus memenuhi keinginan masyarakat dengan mempertimbangkan ketentuan yang telah ditetapkan. Efektivitas komunikasi dalam pemerintahan sangat bergantung pada peran komunikator sehingga pemerintah harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan transparan dan sesuai dengan tuntutan masyarakat untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang baik.

Pola Komunikasi Politik Pemerintah

Pola komunikasi politik pemerintah memiliki peran penting dalam menyatukan dua dimensi utama dalam sistem politik, yaitu suprastruktur politik (ranah politik pemerintahan) dan infrastruktur politik (ranah sosial politik). Infrastruktur politik mencakup berbagai elemen, seperti partai politik, kelompok kepentingan, tokoh politik, dan media komunikasi politik. Hubungan antara suprastruktur dan infrastruktur politik menjadi sangat signifikan dalam konteks komunikasi pembangunan, di mana keberhasilan komunikasi pembangunan sangat dipengaruhi oleh pola komunikasi politik yang diterapkan (Lopulalan, 2023).

Pola komunikasi politik sendiri sangat bergantung pada sistem politik yang ada dalam suatu masyarakat. Aly (2010) menyebutkan bahwa ada dua model pola komunikasi politik yang dikenal dalam studi komunikasi politik sebagai berikut.

1. Pola komunikasi politik horizontal

Dalam pola ini, posisi pelaku komunikasi yang terlibat dalam proses komunikasi politik dianggap relatif setara dan seimbang. Hal ini



menciptakan kondisi di mana informasi dan dialog saling berbagi antarpihak yang terlibat. Model ini cenderung terjadi dalam sistem politik yang bersifat demokratis, di mana partisipasi dan kontribusi dari berbagai elemen masyarakat dihargai.

2. Pola komunikasi politik vertikal atau *top down*

Sebaliknya, pola komunikasi ini menunjukkan arah komunikasi yang cenderung satu arah dari pemerintah ke masyarakat. Model ini mencerminkan nilai-nilai budaya feodalistik dan cenderung memiliki pola kepemimpinan yang totaliter. Dalam konteks ini, kekuasaan dan informasi cenderung mengalir dari pemerintah atau otoritas tinggi ke masyarakat, tanpa adanya interaksi dialogis atau partisipatif.

Dengan memahami perbedaan antara kedua model pola komunikasi politik ini, dapat disimpulkan bahwa pilihan pola komunikasi politik sangat memengaruhi dinamika hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam suatu sistem politik. Pola komunikasi politik yang demokratis cenderung menciptakan partisipasi yang lebih luas dan transparansi, sementara pola *top-down* dapat menciptakan dinamika yang lebih terpusat pada pemerintah.

Pola komunikasi politik dalam pemerintahan mencerminkan dinamika dalam prosesnya dan dapat meliputi beberapa pola hubungan, sebagaimana dijelaskan oleh Mukarom dikutip oleh Lopulalan (2023) sebagai berikut.

1. Pola komunikasi vertikal (*top down*)

Pola ini menggambarkan arah komunikasi yang satu arah, yaitu dari pemimpin atau pemerintah kepada yang dipimpin atau masyarakat. Informasi dan kebijakan cenderung diumumkan dari atas ke bawah tanpa banyak interaksi partisipatif.

2. Pola komunikasi horizontal

Pola ini mencakup interaksi antara individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok. Dalam konteks ini, komunikasi terjadi secara seimbang di antara pihak-pihak yang terlibat, seperti dialog dan pertukaran informasi antarsesama.



3. Pola komunikasi formal

Merujuk pada komunikasi yang terjadi melalui jalur-jalur organisasi formal. Pesan dan informasi diatur oleh struktur organisasi dan prosedur formal diikuti dalam penyebarannya.

4. Pola komunikasi informal

Mengacu pada komunikasi yang terjadi melalui pertemuan atau tatap muka tanpa mengikuti prosedur atau jalur organisasi formal. Interaksi ini lebih fleksibel dan tidak terikat oleh aturan formal.

Dengan memahami berbagai pola hubungan ini, dapat dilihat bahwa dinamika komunikasi politik dalam pemerintahan melibatkan berbagai arah, tingkat formalitas, dan tipe interaksi yang dapat membentuk kerangka kerja yang kompleks dan beragam.

Prinsip-prinsip komunikasi politik dalam pemerintahan memainkan peran kunci dalam membentuk hubungan yang positif antara pemerintah dan masyarakat. Beberapa prinsip tersebut adalah sebagai berikut.

1. Keterbukaan dalam publik.

Pemerintah harus bersikap terbuka dalam menyampaikan informasi kepada publik. Transparansi ini menciptakan kepercayaan dan keterlibatan masyarakat.

2. Komunikasi langsung dengan publik.

Komunikasi pemerintah dilakukan secara langsung untuk memastikan pesan yang disampaikan dapat diterima dengan jelas oleh publik.

3. Keterlibatan masyarakat dalam pembentukan kebijakan.

Masyarakat diikutsertakan dalam pembentukan kebijakan, memastikan bahwa kepentingan dan pandangan mereka diperhitungkan.

4. Presentasi positif dari kebijakan dan prestasi pemerintah.

Komunikasi harus berfokus pada presentasi positif kebijakan dan prestasi pemerintah untuk membangun citra yang baik di mata publik.



5. Penggunaan seluruh saluran komunikasi yang relevan.
Pemerintah menggunakan seluruh saluran komunikasi yang dianggap relevan, tidak hanya terbatas pada media massa nasional.
6. Komunikasi lintas departemen yang terkoordinasi.
Komunikasi lintas departemen harus terkoordinasi, menghindari konflik atau duplikasi pesan di dalam pemerintahan.
7. Mendorong kenetralan posisi politik aparatur pemerintah.
Komunikasi pemerintah harus mengedepankan kenetralan posisi politik aparatur pemerintah untuk menjaga integritas dan profesionalisme.

Menurut Joel Netshitenzhe dalam *Government Communicators' Handbook*, terdapat prinsip dasar komunikasi pemerintahan yang melibatkan pejabat politik sebagai komunikator utama. Beberapa prinsip tersebut adalah sebagai berikut (Lopulalan, 2023).

1. Kegiatan pemerintah harus dilihat sebagai layanan publik.
2. Pusat layanan komunikasi harus memiliki kewenangan penuh untuk melaksanakan kegiatan publik.
3. Pejabat politik memegang peran utama sebagai komunikator dalam konteks komunikasi pemerintahan.
4. Semua individu dalam pemerintahan dianggap sebagai komunikator.
5. Komunikasi pemerintahan harus didasarkan pada program dan strategi yang terpadu.
6. Struktur komunikasi tidak boleh mencerminkan kebijakan. Harus ada pemisahan antara fungsi komunikasi dan kebijakan.
7. Komunikasi bukan hanya sebagai perantara media, tetapi mencakup interaksi langsung dan pertukaran pandangan dengan publik.
8. Upaya untuk memahami lingkungan komunikasi diperlukan dalam mengerjakan kampanye dan program.
9. Kerja sama dengan pihak eksternal di luar pemerintah dapat meningkatkan keberhasilan kampanye komunikasi.



Fungsi komunikasi pemerintahan melibatkan beberapa aspek, seperti memberikan informasi kepada publik, menjelaskan dan mendukung keputusan yang telah ditetapkan, mempertahankan nilai-nilai, serta memfasilitasi dialog antara institusi dan warga negara. Sebagai tambahan, terdapat hambatan dalam komunikasi pemerintahan yang dapat memengaruhi efektivitasnya.

Komunikasi pemerintahan tidak terlepas dari berbagai hambatan. Menurut Simon, Smithburg, dan Thomson dalam *Handbook of Administrative Communication*, hambatan-hambatan komunikasi pemerintahan melibatkan aspek bahasa, kerangka referensi, jarak status, jarak geografis, perlindungan diri dari inisiator, tekanan pekerjaan lainnya, dan pembatasan yang disengaja pada komunikasi.

Komunikasi pemerintahan yang efektif dapat memberikan kontribusi signifikan pada terciptanya pemerintahan yang baik. Kepemerintahan yang baik, menurut United Nations Development Programme (UNDP), mencakup hubungan saling membantu dan membangun antara negara, sektor swasta, dan masyarakat. Setiap entitas memiliki peran masing-masing dalam konsep pemerintahan yang baik sebagai berikut.

1. Negara/pemerintah bertanggung jawab dalam menciptakan iklim politik, hukum, dan ekonomi yang sehat guna mendorong perkembangan dunia usaha dan masyarakat.
2. Swasta berperan dalam menciptakan lapangan pekerjaan.
3. Masyarakat memegang peran penting dalam memberikan kemudahan hubungan timbal balik melalui kelompok dalam masyarakat, untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.
4. Kepemerintahan yang baik sendiri membutuhkan tiga unsur kunci, yaitu kemampuan negara (*state capability*), akuntabilitas (*accountability*), dan responsivitas (*responsiveness*).

Secara konseptual, Cangara dalam (Mukarom, Z., 2020) menguraikan tiga pola komunikasi politik, dijelaskan sebagai berikut.



1. Pola sistemik

Model ini merupakan pola komunikasi politik yang utuh, satu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian di dalamnya dan saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Teori dalam model ini mengacu pada serangkaian pernyataan mengenai hubungan di antara variabel dependen dan independen yang diasumsikan berinteraksi satu sama lain. Artinya, perubahan dalam satu atau lebih dari satu variabel dapat menyebabkan perubahan variabel lain atau kombinasi variabel.

2. Model proses

Dinamika komunikasi politik sangat berkaitan dengan model komunikasi, khususnya model transaksi simultan dari Melvin L DeFleur. Dengan karakteristik non-linear, model ini menggambarkan tiga faktor yang memengaruhi proses komunikasi politik. *Pertama*, faktor lingkungan fisik menekankan aspek “*what and how*” komunikasi berlangsung. *Kedua*, faktor situasi sosio-kultural mencakup aspek situasi sosial yang mengandung makna budaya dan menciptakan identitas bagi pelaku komunikasi. *Ketiga*, faktor hubungan sosial menekankan bahwa status hubungan para pelaku komunikasi sangat berpengaruh baik terhadap isi pesan maupun proses pengiriman dan penerimaan pesan. Proses komunikasi politik juga dapat melibatkan proses komunikasi persuasif dan kampanye media.

3. Model efektivitas

Kemampuan seorang tokoh dalam mengirimkan pesan atau informasi yang baik, menjadi pendengar yang baik, serta keterampilan menggunakan berbagai media atau alat audio visual merupakan bagian penting dalam melaksanakan komunikasi yang efektif. Komunikasi politik juga memiliki hubungan erat dengan pemasaran politik. Komunikasi politik yang efektif dan tepat sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan politik, sejalan dengan pemenuhan kebutuhan politik sebagai strategi persaingan dalam dunia politik.







BAB VII

KOMUNIKASI POLITIK GLOBAL

Komunikasi Politik dan Hubungan Internasional

Peran komunikasi politik dalam hubungan internasional memiliki dampak yang sangat signifikan, tidak hanya dalam skala global, namun juga dalam konteks organisasi, termasuk negara sebagai entitas besar. Manusia sebagai makhluk sosial secara kodratnya cenderung untuk berkumpul dengan individu lain yang memiliki visi, misi, atau tujuan serupa. Dalam konteks organisasi besar seperti negara, sistem komunikasi yang efektif menjadi suatu keharusan. Setiap negara memiliki peraturan yang mengatur kehidupan

warganya dan perbedaan-perbedaan inilah yang menciptakan keragaman dalam struktur hukum antarnegara (Syarbaini, 2021).

Sejak merdeka pada tahun 1945, Negara Indonesia terlibat dalam berbagai hubungan internasional. Hubungan ini dapat bersifat bilateral, antara dua negara, regional di antara negara-negara anggota ASEAN, atau bersifat multilateral melibatkan lebih dari dua negara. Pentingnya hubungan internasional menjadi jelas dan keberhasilannya sangat bergantung pada sejumlah faktor yang kompleks dan dinamis.

Komunikasi dalam konteks hubungan internasional dapat diartikan sebagai komunikasi internasional. Dalam era kecanggihan teknologi saat ini, batas antarnegara menjadi semakin samar karena dunia menjadi lebih terhubung. Studi mengenai hubungan internasional atau yang dikenal sebagai studi internasional menjadi semakin relevan. Bidang ini mencakup berbagai entitas, termasuk organisasi pemerintah internasional, organisasi non-pemerintah, dan perusahaan internasional.

Hubungan internasional bukan hanya sebatas bidang akademik dan kebijakan publik, namun juga dapat bersifat positif atau normatif. Meskipun sering dianggap sebagai cabang ilmu politik, hubungan internasional sebenarnya lebih bersifat interdisipliner. Studi ini melibatkan berbagai bidang ilmu, seperti hukum internasional, sejarah, filsafat, geografi, sosiologi, kriminologi, studi gender, psikologi, dan masih banyak lagi.

Dengan demikian, komunikasi politik dalam hubungan internasional tidak hanya mencakup interaksi verbal antara negara-negara, tetapi juga melibatkan pemahaman mendalam tentang berbagai disiplin ilmu yang saling terkait. Kompleksitas hubungan internasional membutuhkan pendekatan yang holistik dan pemahaman yang mendalam terhadap faktor-faktor yang dapat memengaruhi dinamika hubungan antarnegara.

Peran komunikasi politik dalam hubungan internasional mencakup berbagai aspek penting untuk memastikan interaksi antarnegara berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Adapun jbaran dari peran-peran tersebut adalah sebagai berikut (Syarbaini, 2021: 108—109).



1. Media informasi
Komunikasi politik berfungsi sebagai sarana untuk pertukaran informasi antarnegara. Hubungan antarnegara, seperti Indonesia dengan Malaysia atau Singapura, memerlukan informasi yang cukup mengenai ekonomi, politik, sosial budaya, hukum, dan perundang-undangan di masing-masing negara.
2. Menghindari kesalahan persepsi
Komunikasi politik membantu menghindari kesalahan persepsi, seperti yang terjadi dalam kasus klaim ibu kota Israel oleh Amerika. Komunikasi yang efektif memungkinkan klarifikasi dan koreksi untuk mencegah konflik yang mungkin timbul akibat pemahaman yang salah.
3. Memutuskan suatu kebijakan
Dalam kasus klaim ibu kota Israel, komunikasi politik menjadi kunci dalam pembuatan keputusan. Proses komunikasi di forum internasional, seperti sidang PBB, memainkan peran vital dalam menentukan kebijakan yang sah di mata hukum internasional.
4. Menjalin kerja sama
Komunikasi politik juga digunakan untuk menjalin kerja sama antarnegara dalam berbagai bidang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Hal ini memungkinkan negara-negara untuk bekerja sama dalam mengatasi berbagai tantangan atau mencapai tujuan bersama.
5. Membuat negara semakin dekat
Komunikasi politik membantu mengatasi perbedaan pemahaman dan kecurigaan antarnegara, menciptakan kedekatan, dan bahkan membuka pintu menuju bentuk kerja sama yang lebih erat.
6. Menyosialisasikan kebijakan dan program negara
Peran komunikasi politik mencakup menyosialisasikan kebijakan dan program negara ke negara lain, memastikan penghargaan terhadap kebijakan yang diimplementasikan, termasuk aspek ekspor, impor, dan kebijakan kompleks lainnya.



7. Pencitraan

Komunikasi politik bertugas menciptakan citra positif tentang suatu negara dalam hubungan internasional. Citra yang baik dapat mendorong negara lain untuk bekerja sama atau memberikan bantuan ketika dibutuhkan.

8. Mempromosikan kelebihan negara

Melalui komunikasi politik, negara dapat mempromosikan kelebihannya, menarik minat investor asing, dan mengembangkan pasar yang lebih luas untuk kemajuan ekonomi.

9. Melindungi warga negara

Komunikasi politik yang baik dapat digunakan untuk melindungi warga negara, terutama dalam situasi di luar negeri, seperti hubungan dengan negara di mana terdapat Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Tenaga Kerja Wanita (TKW).

10. Sarana mediasi

Dalam hubungan internasional, komunikasi berperan sebagai sarana mediasi untuk menyelesaikan konflik antara negara-negara yang sedang bertikai, seperti Israel dan Palestina atau Korea Selatan dengan Utara.

Sedangkan tujuan komunikasi politik dalam hubungan internasional sangat terkait dengan pesan politik yang disampaikan oleh komunikator politik. Oleh karena itu, berikut adalah penjabaran tujuan komunikasi dalam konteks hubungan internasional yang melibatkan pembentukan sebagai berikut (Pureklolon, 2016: 204—205).

1. Citra politik

Komunikasi politik bertujuan untuk membentuk citra politik suatu negara atau pemimpinnya. Meskipun tidak secara langsung menciptakan pendapat atau perilaku tertentu, komunikasi politik dapat memengaruhi cara masyarakat membentuk citra mereka tentang lingkungan politik. Citra politik ini terbentuk melalui persepsi yang bermakna, termasuk kepercayaan, nilai, dan pengharapan.



2. Pendapat umum

Komunikasi politik bertujuan untuk membentuk pendapat umum atau opini publik tentang suatu masalah atau kebijakan tertentu. Pendapat umum dihasilkan dari interaksi antara individu dalam suatu kelompok dan mencerminkan sikap masyarakat terhadap masalah yang berkaitan dengan kepentingan umum atau persoalan sosial.

3. Partisipasi politik

Tujuan komunikasi politik melibatkan partisipasi warga negara dalam menyampaikan kepentingan kepada pejabat publik atau melalui kegiatan yang bertujuan memengaruhi pembuatan keputusan pemerintah. Partisipasi politik dapat bersifat spontan atau terorganisasi, damai atau kekerasan, legal atau ilegal, dan efektif atau tidak efektif.

4. Sosialisasi politik

Komunikasi politik bertujuan untuk mengembangkan orientasi politik dan pola tingkah laku seseorang. Ini melibatkan proses belajar dan pemahaman terhadap peristiwa politik sehingga individu dapat memiliki pemahaman yang lebih baik terkait dengan konteks politik.

5. Pendidikan politik

Tujuan komunikasi politik mencakup pendidikan politik, yaitu usaha untuk menanamkan, mengubah, atau mempertahankan sistem nilai politik atau orientasi politik. Hal ini dilakukan dengan mengaktifkan sikap, perilaku, sistem berpikir, dan pandangan politik individu atau kelompok.

6. Rekrutmen politik

Komunikasi politik diarahkan untuk mengajak individu masuk ke dalam orientasi dan nilai politik tertentu yang pada akhirnya membuat mereka menjadi anggota politik. Hal ini dimulai dari simpatisan hingga kader politik dan pengurus organisasi politik. Rekrutmen politik merupakan upaya konkret untuk memperluas basis dukungan politik.

Komunikasi politik dalam hubungan internasional memiliki tujuan utama untuk mewujudkan kepentingan nasional suatu negara. Tujuan ini



mencakup gambaran atau keadaan yang diinginkan di masa mendatang dan kondisi masa depan yang diharapkan oleh pemerintah negara tersebut. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah menetapkan berbagai sarana yang diusahakan melalui tindakan-tindakan yang mencerminkan kebutuhan, keinginan, dan tujuan nasional.

Setiap kebijakan luar negeri yang dirancang memiliki fokus untuk mencapai kepentingan nasional. Tujuan nasional yang hendak dijangkau melalui kebijakan luar negeri merupakan formulasi konkret yang dirancang dengan mempertimbangkan situasi internasional yang sedang berlangsung, serta daya yang dimiliki untuk mencapainya. Pembuat keputusan menentukan, merancang, dan memilih tujuan-tujuan ini, dapat berupa upaya mengubah kebijakan (*revisionist policy*) atau mempertahankan kebijakan yang sudah ada (*status quo policy*) terkait dengan posisi negara tersebut di lingkungan internasional.

Ada tiga kriteria utama untuk mengklasifikasikan tujuan-tujuan komunikasi politik dalam hubungan internasional berikut ini (Pureklolon, Thomas Tokan, 2016: 206).

1. Nilai (*values*)

Tujuan-tujuan tersebut mencerminkan nilai-nilai yang menjadi landasan para pembuat keputusan dalam menyusun kebijakan luar negeri.

2. Jangka waktu

Tujuan-tujuan dapat diklasifikasikan berdasarkan jangka waktu yang dibutuhkan untuk mencapainya, seperti tujuan jangka pendek, menengah, atau panjang.

3. Tipe tuntutan

Tujuan-tujuan juga dapat diklasifikasikan berdasarkan tuntutan yang diajukan suatu negara kepada negara lain, baik itu dalam konteks revisi kebijakan atau mempertahankan status *quo*.

Dalam konteks pengambilan keputusan dalam politik luar negeri, pemerintah perlu mempertimbangkan faktor-faktor nasional dan internasional. Faktor internal seperti aspirasi konstituen domestik, elemen masyarakat



sipil (*civil society*), dan faktor eksternal seperti peta kepentingan kekuatan internasional menjadi pertimbangan penting. Dalam pelaksanaan politik luar negeri, pemilihan teknik atau instrumen yang sesuai juga harus disesuaikan dengan kekuatan nasional (*national power*) untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Komunikasi Politik dan Globalisasi

Dalam konteks komunikasi politik dan globalisasi, setiap organisasi politik memiliki tujuan yang menjadi fokus dalam proses politik. Keinginan untuk memperoleh manfaat satu sama lain sering kali menjadi pemicu konflik dalam berbagai bentuk, termasuk dalam dimensi ekonomi, diplomatik, dan militer. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, setiap organisasi politik mengandalkan berbagai alat kekuasaan atau “senjata andalan” yang dimilikinya (McNair, 2011).

Komunikasi politik dan demokrasi memiliki keterkaitan erat, terutama karena dalam demokrasi peran rakyat sangat besar dalam menjalankan suatu pemerintahan. Oleh karena itu, semua kegiatan politik harus secara transparan dipaparkan kepada rakyat sehingga terwujud konsep pemerintahan “dari rakyat, untuk rakyat.”

Sebelum era globalisasi, di mana komunikasi massa menjadi peran kunci dalam kehidupan masyarakat, hubungan politik antara suatu organisasi dan organisasi lainnya hanya dapat diketahui oleh kaum elite berpendidikan. Pada saat itu, jumlah elite ini masih terbatas sehingga kebanyakan orang tidak memiliki pengetahuan tentang kegiatan pemerintahan di sekitar mereka. Namun, dengan berkembangnya media massa, jeda waktu antara peristiwa politik dan sampainya berita ke masyarakat dapat diperpendek. Saat ini, kebijakan politik dengan mudah terpapar di hadapan mata masyarakat.

Selain memberikan pengetahuan kepada masyarakat, pemaparan mengenai peristiwa politik juga dapat membentuk opini publik. Opini publik ini kemudian dapat digunakan sebagai salah satu “senjata andalan” oleh suatu organisasi politik dalam mengejar kepentingan masing-masing.



Oleh karena itu, kemajuan media massa memainkan peran penting dalam memperkuat hubungan antarorganisasi politik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik.

Di Amerika Serikat, masalah utamanya adalah sikap sinis yang meluas di kalangan masyarakat terhadap institusi politik dan para pemimpin yang berperan di dalamnya. Sikap sinis ini menimbulkan kekhawatiran akan adanya penarikan diri masyarakat dari keterlibatan dalam pemerintahan. Masalah serupa juga terjadi di Eropa dan penarikan diri masyarakat ini dapat secara signifikan dihubungkan dengan komunikasi politik, terutama melalui media massa yang sering kali membawa kritik terhadap institusi politik (Norris, 2004).

Selain media massa, kampanye politik oleh partai sendiri juga dapat menyebabkan penarikan diri masyarakat. Dalam demokrasi modern, konsep komunikasi politik dikenal sebagai *political marketing*. Dalam konsep ini, perkembangan utamanya melibatkan cara seorang kandidat, partai, pemerintahan, atau kelompok tertentu menggunakan teknik komunikasi yang dipinjam dari sektor swasta untuk mencapai tujuan strategis, seperti memenangkan dukungan masyarakat, membentuk opini publik, atau bahkan memengaruhi undang-undang (Bartle, dkk., 2001).

Meskipun konsep ini sering dihubungkan dengan “amerikanisasi” dan tampaknya berasal dari Amerika, sebenarnya praktik seperti iklan negatif selama pemilihan, *personalized politics*, atau pengeluaran dana kampanye yang besar telah menjadi proses yang diekspor dari satu negara ke negara lain menyebar ke seluruh dunia. Meski demikian, efektivitas komunikasi politik yang mengadopsi konsep pemasaran tetap terbatas karena respons masyarakat terhadap berita media dan dinamika sistem politik secara keseluruhan turut memengaruhi respons tersebut.

Dengan luasnya penggunaan internet saat ini dan hubungan yang kurang erat antara partai politik dan pemilihnya. Hal ini dapat menjadi lebih sulit atau justru memberikan kesempatan bagi para politikus yang ingin mengontrol agenda berita dalam lingkungan komunikasi yang tidak dapat diprediksi.



Dalam konteks keinginan sebuah negara untuk menyatakan perang, hubungan antara politikus dan media menjadi penting. Kepentingan pemerintah perlu disampaikan dengan cara yang dapat memengaruhi opini masyarakat, walaupun mungkin tidak selalu sejalan dengan kepentingan umum. Jika terjadi ketidaksesuaian antara kepentingan pemerintah dan masyarakat, pemerintah harus memperoleh dukungan dan izin dari masyarakat untuk menyatakan perang, serta membangun opini publik yang mendukung agar tujuan dari perang tersebut dapat tercapai. Dalam negara demokrasi, opini masyarakat yang mendukung perang memiliki dampak yang setara dengan keberhasilan pasukan militer yang terkait.

Dalam konteks ini, dampak dari liputan media massa harus diperhitungkan secara serius dalam pembentukan strategi pemerintah. Sebagai contoh, usaha AS dan Britania dalam menghentikan rezim Saddam Hussein yang menolak mentaati resolusi PBB tentang senjata pemusnah massal merupakan sebuah kasus yang mencolok. Kedua negara ini secara intensif berupaya membangun opini publik mereka untuk mendukung kampanye melawan diktator Irak. Dalam upaya tersebut, bahkan dokumen-dokumen (yang kemudian terbukti palsu) disusun sedemikian rupa untuk membuktikan kepada para pejabat dan masyarakat bahwa senjata pemusnah massal yang dimiliki Irak merupakan ancaman besar. Dokumen-dokumen palsu tersebut berhasil memengaruhi keputusan para pejabat di Britania, termasuk mendukung keputusan Tony Blair untuk menyatakan perang, dengan meyakinkan bahwa ini merupakan ancaman serius bagi Britania dan negara-negara Barat lainnya.

Dapat disimpulkan bahwa komunikasi politik dan globalisasi memiliki keterkaitan erat dalam konteks kebijakan luar negeri, pembentukan opini publik, dan dinamika politik internasional. Globalisasi mempercepat aliran informasi, memungkinkan interaksi yang lebih cepat antarnegara yang memengaruhi komunikasi politik di tingkat global. Dalam proses ini, media massa memainkan peran kunci dalam membentuk opini publik global terhadap isu-isu politik. Hubungan antara politikus, media, dan masyarakat menjadi semakin kompleks dalam konteks globalisasi, melibatkan



pemahaman dan interaksi dengan audiens internasional. Globalisasi juga membawa perubahan dalam strategi komunikasi politik, terutama dengan adopsi konsep-konsep dari sektor swasta, seperti *political marketing*. Dalam situasi di mana keputusan politik dapat berdampak pada hubungan antar-negara serta pemahaman dinamika Komunikasi Politik dan Globalisasi menjadi kunci. Pemerintah dan organisasi politik harus memperhitungkan konsekuensi dari liputan media massa, opini publik global, dan adopsi strategi komunikasi politik yang efektif untuk mencapai tujuan dalam panggung politik yang semakin terglobalisasi.

Isu-Isu Komunikasi Politik Global

Isu-isu global mencakup masalah-masalah yang memiliki dampak secara global dan melintasi batas negara. Beberapa dari isu-isu tersebut yang sering menjadi sorotan melibatkan perubahan iklim, kemiskinan, ketidaksetaraan, konflik internasional, keamanan siber, dan krisis kesehatan global. Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, diperlukan kerja sama internasional yang melibatkan berbagai pihak, termasuk negara-negara dan organisasi internasional.

Salah satu pendekatan yang terbukti efektif dalam mengatasi isu-isu global tersebut adalah melalui komunikasi politik. Komunikasi politik adalah suatu proses kompleks yang melibatkan pertukaran informasi, gagasan, dan pandangan antara para pemimpin politik, masyarakat, serta media massa. Tujuan dari komunikasi politik ini adalah mencapai kesepakatan dan solusi yang efektif untuk mengatasi isu-isu global yang kompleks.

Dalam konteks isu-isu global, komunikasi politik bukan hanya sekadar penyampaian informasi, tetapi juga melibatkan aspek negosiasi, diplomasi, dan dialog yang intensif. Negara-negara yang terlibat dan organisasi internasional yang berkaitan dengan isu-isu global ini perlu berkomunikasi secara efektif. Hal ini bertujuan untuk mencapai pemahaman bersama, membentuk konsensus, dan mengimplementasikan langkah-langkah konkret untuk menangani tantangan-tantangan tersebut. Dengan demikian, komunikasi



politik menjadi landasan penting untuk membangun kerja sama internasional yang kokoh dalam menghadapi kompleksitas isu-isu global.

Beberapa strategi komunikasi politik yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi isu-isu global mencakup berbagai pendekatan yang melibatkan penggunaan media dan interaksi internasional sebagai berikut.

1. Diplomasi publik

Diplomasi publik melibatkan pemanfaatan media massa dan komunikasi *online* sebagai sarana untuk mempromosikan ide, nilai, dan kebijakan yang dapat berkontribusi dalam mengatasi isu-isu global. Melalui strategi ini, upaya komunikasi dapat disusun untuk membentuk opini publik yang mendukung langkah-langkah konkret dalam menanggapi tantangan global.

2. Pertemuan dan konferensi internasional

Pertemuan dan konferensi internasional menjadi forum penting, di mana negara-negara dan organisasi internasional dapat berdiskusi, berbagi pandangan, dan membangun konsensus terkait tindakan yang diperlukan untuk mengatasi isu-isu global. Komunikasi politik di tingkat ini menjadi kunci untuk memastikan koordinasi dan kerja sama yang efektif.

3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan serta tindakan yang diambil oleh negara-negara dan organisasi internasional menjadi strategi penting dalam membangun kepercayaan dan kerja sama. Komunikasi politik harus fokus pada penyampaian informasi yang jelas dan terbuka sehingga masyarakat dapat memahami serta mendukung langkah-langkah yang diambil.

4. Kampanye sosial

Melalui media sosial dan aktivisme *online*, kampanye sosial dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan publik terkait isu-isu global. Dengan memberikan informasi yang relevan dan memobilisasi masyarakat secara *online*, kampanye sosial dapat menjadi



kekuatan pendorong untuk mendesak tindakan dari pihak yang berwenang dalam menangani isu-isu tersebut.

Dengan mengintegrasikan strategi ini secara holistik, komunikasi politik dapat menjadi alat yang kuat dalam membentuk opini publik, memperkuat kerja sama internasional, dan mendukung implementasi solusi yang efektif terhadap isu-isu global yang kompleks.





BAB VIII

STUDI KASUS: KOMUNIKASI POLITIK DI ERA MEDIA SOSIAL

Pengaruh Media Sosial terhadap Komunikasi Politik

Media sosial memiliki dampak signifikan dalam dunia politik, terutama dalam konteks komunikasi politik, seperti yang terungkap dalam sejumlah penelitian (Anshari, 2013). Institusi politik diharapkan berpartisipasi secara aktif dalam komunikasi politik berbasis media sosial, khususnya dalam kampanye Pemilu. Media sosial dianggap sebagai sarana ideal untuk mendapatkan informasi tentang opini publik terkait kebijakan dan posisi

politik, sekaligus untuk membangun dukungan komunitas terhadap politisi yang sedang berkampanye.

Sejumlah studi menunjukkan bahwa politisi di berbagai belahan dunia telah mengadopsi media sosial untuk menjalin hubungan dengan konstituen, berinteraksi langsung dengan masyarakat, dan membentuk diskusi politik. Media sosial memiliki kemampuan untuk menciptakan ruang dialog antara politisi dan publik, khususnya menarik minat pemilih pemula atau pemilih muda, menjadikannya semakin penting dalam ranah politik (Stieglitz dan Dang-Xuan, 2012).

Sebelum maraknya media sosial, politisi telah menggunakan internet sebagai alat kampanye. Internet dianggap sebagai cara potensial untuk mengubah politik demokrasi massa yang dapat menjadi opresif dengan memberikan suara dari bawah ke atas. Internet diharapkan dapat menjadi media yang memfasilitasi aliran informasi dua arah yang interaktif antara politisi dan pendukungnya. Dalam konteks Indonesia, penggunaan internet dalam politik telah dimulai sejak Pemilu 1997, di mana partai politik seperti Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia, dan Partai Persatuan Pembangunan memiliki situs resmi yang berisi program partai, pernyataan politik, struktur pengurus, AD/ART, serta peluang dialog dengan pengurus. Pada Pemilu 2004 dan 2009, penggunaan internet semakin meningkat di kalangan partai politik, calon legislator, calon presiden, dan calon wakil presiden (Putra, 2011).

Keberhasilan Barack Obama dalam memenangkan pemilihan presiden Amerika Serikat sebagian besar dipandang sebagai hasil dari penggunaan efektif media sosial. Sekitar 30% pesan kampanye Obama disampaikan melalui media baru, seperti yang diungkapkan dalam riset (Riaz, 2010). Sebelum Obama, Howard Dean juga mencuat sebagai figur yang dapat memanfaatkan internet untuk menarik perhatian publik Amerika Serikat, meskipun Dean mengalami kegagalan di konvensi nasional Partai Demokrat (Chavez, 2012). Di Inggris, anggota parlemen semakin banyak menggunakan blog dan Yahoo Groups sebagai sarana untuk berkomunikasi, menyampaikan ide, dan mendengarkan pandangan orang lain (Gurevitch, dkk., 2009).



Bagaimana dengan di Indonesia? Media sosial mulai mendapatkan perhatian dalam dua tahun terakhir. Para pendukung Joko Widodo dan Basuki Tjahja Purnama, dalam kampanye pemilihan gubernur DKI Jakarta, secara kreatif memanfaatkan YouTube untuk memposting video kampanye mereka. Bahkan, terdapat *game online* yang mengadopsi alur cerita mirip dengan permainan Angry Birds, dengan tokoh utama Jokowi. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial menjadi semakin signifikan dalam arena politik Indonesia, terutama sebagai sarana untuk menyampaikan pesan kampanye secara inovatif dan menarik perhatian publik.

Tantangan Media Sosial bagi Aktor Politik

Di bagian sebelumnya, telah dijelaskan bahwa media sosial masih belum dimanfaatkan secara optimal oleh aktor politik di Indonesia. Tantangan pertama yang dihadapi adalah hilangnya batasan-batasan status sosial di dunia media sosial. Menurut Coutts dan Gruman (2005: 254), dalam komunikasi yang di intermediasi oleh komputer, peserta komunikasi akan mendapatkan kesetaraan partisipasi yang lebih luas daripada komunikasi tatap muka. Meskipun pandangan ini merujuk pada aktivitas komunikasi dalam organisasi, namun dapat diterapkan dalam konteks komunikasi politik era media sosial.

Dengan adanya media sosial, para aktor politik harus menyadari bahwa mereka memiliki posisi sebagai pejabat tinggi atau perwakilan partai politik yang berkuasa dalam kehidupan nyata. Namun di media sosial, posisi mereka akan setara dengan pengguna lain. Oleh karena itu, para aktor politik perlu bersiap-siap menghadapi kritik, bahkan kritik yang terkadang bisa sangat tajam dari pengguna lain. Media sosial diibaratkan sebagai sebuah rimba raya tanpa peraturan dan jika tantangan ini tidak dihadapi dengan bijak, aktor politik berisiko menjadi objek cemoohan di dunia maya.

Perlu dicontohkan melalui kasus ibu negara, yaitu Ibu Ani Yudhoyono, yang beberapa kali terlibat dalam perdebatan di Instagram, bahkan mengenai hal-hal yang tidak substansial. Hal ini menjadi contoh bagaimana penggunaan media sosial oleh aktor politik dapat berisiko mengundang perhatian



negatif dan bahkan menciptakan polemik yang tidak perlu. Selain itu, para aktor politik juga tidak lagi dapat menggunakan media sosial sebagai sarana untuk “curahan hati,” mengingat konten yang terlalu pribadi dapat memicu respons yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, kebijakan yang bijak dan strategi komunikasi yang matang perlu diterapkan oleh aktor politik agar dapat mengoptimalkan potensi media sosial tanpa terjerumus pada risiko dan kontroversi yang tidak diinginkan (Anshari, 2013).

Media sosial telah menciptakan kebingungan dalam memahami apakah apa yang dikatakan oleh aktor politik merupakan sikap resmi atau hanya ungkapan pemikiran atau perasaan pribadi. Sikap resmi atau *institutional rhetoric* dan ungkapan pribadi atau *everyday talk* sering kali tumpang tindih, menciptakan kesulitan bagi orang untuk membedakan antara curahan hati pribadi dan posisi resmi seorang politisi (Finet, 2001: 274—276).

Para aktor politik di Indonesia belum sepenuhnya menyadari bahwa berkomunikasi di media sosial memerlukan keterampilan khusus, bukan hanya dari segi teknis, tetapi juga mentalitas. Kehadiran media sosial menuntut pelaku politik untuk beradaptasi, namun banyak di antara mereka kesulitan dalam fase adaptasi ini (Chavez, 2012). Salah satu kendala yang terkait dengan mentalitas lama adalah ketidakmampuan untuk memahami sifat interaktif media sosial.

Banyak pelaku politik dan organisasi politik di Indonesia masih terpaku pada mentalitas lama yang mengabaikan sifat interaktif media sosial. Dalam politik kontemporer, politisi harus mempertimbangkan audiens yang interaktif dan kemampuan mereka untuk merespons, mendistribusikan, dan memodifikasi pesan yang mereka terima. Namun, dalam konteks ini menunjukkan bahwa sebagian besar partai politik di Indonesia belum memaksimalkan potensi media sosial dan belum memanfaatkan interaktifitasnya secara optimal (Asih, 2011). Situs web partai politik biasanya tidak menyediakan forum interaktif dan media sosial seperti facebook dan twitter digunakan terutama sebagai sarana kampanye tanpa interaksi yang signifikan atau aspiratif.

Di era digital yang interaktif, produksi pesan dan citra politik menjadi rentan terhadap gangguan. Pelaku politik harus mempertimbangkan



kemungkinan bahwa pesan-pesan mereka dapat dimodifikasi oleh pihak lain ketika disampaikan melalui media sosial. Media sosial yang seharusnya menjadi sarana mendengarkan suara masyarakat masih banyak dimanfaatkan sebagai alat kampanye dan belum sepenuhnya bersifat interaktif atau aspiratif. Lingkungan media digital juga tidak selalu menghargai integritas informasi karena informasi yang dipublikasikan *online* dapat dengan bebas dimodifikasi oleh siapa pun (Gurevitch, 2009). Selain itu, di masa kampanye Pemilu, internet kadang-kadang digunakan untuk mengolok-olok politisi dan menyerang mereka yang tidak disukai oleh sebagian kelompok masyarakat (Anshari, 2013).

Media Sosial Sebagai Sarana *Branding*: Sebuah Tawaran

Kelemahan partai politik dan politisi di Indonesia adalah terbatasnya interaksi yang diberikan kepada konstituen, terutama yang berasal dari golongan biasa atau pendukung biasa hanya menjelang pemilihan umum setiap lima tahun. Saat tidak mendekati pemilihan umum, partai atau politisi cenderung hanya berinteraksi dengan pendukung yang memiliki kekayaan. Hal ini menjadi sebuah kekurangan karena masyarakat biasa juga perlu mendapatkan perhatian dan interaksi dari para politisi. Dalam proses *branding* kepada masyarakat, diperlukan berbagai strategi agar pesan yang disampaikan dapat efektif tertanam di benak publik. Salah satu strategi yang dianggap efektif dan efisien saat ini adalah melalui penggunaan *new media*, khususnya media sosial (Anshari, 2013).

Branding melalui *new media*, terutama media sosial dianggap efektif karena mampu menyebarkan pesan *many to many* dengan cepat, menggunakan kemampuan internet. Hal ini memberikan efek positif yang dapat dirasakan oleh tokoh politik secara cepat. *Branding* menggunakan media sosial juga efektif untuk menjangkau masyarakat yang sebelumnya terabaikan melalui metode *branding* konvensional. Media sosial memiliki kemampuan menggunakan bahasa yang akrab dengan masyarakat sehingga pesan dapat tersebar luas (Aino Majja Toppi, 2012).



Keberhasilan *branding* melalui media sosial ditentukan oleh pengelolaan media sosial yang *up to date* dan konsisten dalam menjaga komunikasi. Menjaga media sosial yang selalu terkini dan memberikan pelayanan informasi konsisten tidaklah mudah, konsistensi menjadi faktor kunci dalam pembentukan citra. Politisi juga dihadapkan pada tantangan untuk menampilkan diri sesuai dengan harapan masyarakat (Guervitch, 2009).

Berdasarkan penelitian yang berkembang, penggunaan media sosial dalam *branding* memiliki beberapa keuntungan strategis. Secara umum, keuntungan yang dihasilkan dari *branding* melalui media berbasis internet adalah kemudahan, biaya yang rendah, praktis, dan efektif (Anshari, 2013). Konsep kemudahan ini terkait dengan keunggulan sistem internet dan media sosial, memungkinkan pesan disebar dengan cepat dan merata dengan sekali tekan *push* dari satu tempat. Dalam konteks ini, media sosial memberikan keleluasaan dalam menjangkau masyarakat secara luas dengan biaya yang terjangkau.

Harga yang dikeluarkan menjadi faktor pertimbangan utama dalam menggunakan media sosial sebagai alat *branding*. Dengan mengoptimalkan fitur di media sosial, pesan dapat secara efektif sampai ke benak masyarakat. Kelebihan utama media sosial terletak pada kemampuan internet untuk menyebarkan satu pesan kepada banyak pihak sesuai dengan sifatnya yang *many to many*. Meskipun demikian, masih banyak tokoh politik yang lebih memilih pendekatan *branding* klasik dengan menggunakan baleho, spanduk, dan poster yang menonjolkan kemampuan serta kelebihan diri mereka jika terpilih. Alasan di balik pemilihan ini adalah keyakinan bahwa pemilih di daerah pedesaan mungkin tidak mahir atau belum paham penggunaan internet.

Beberapa tokoh politik masih memilih metode *branding* lama dengan alasan bahwa pemilih di pelosok tidak mahir atau belum memahami penggunaan internet. Namun, dengan penggunaan media sosial, biaya pemasangan spanduk dan materi promosi sejenis dapat diminimalisir dengan memberikan informasi secara efektif di platform tersebut.



Praktisitas menjadi keuntungan tersendiri dalam penggunaan media sosial sebagai alat *branding*. Dengan sifat praktis, *branding* dapat menjangkau seluruh kalangan tanpa perlu membatasi atau mengkotak-kotakkan warga ke dalam kelompok tertentu. Hal ini berbeda dengan metode *branding* lama yang harus mempertimbangkan jenis pesan dan cara penyampaian yang berbeda untuk golongan warga kelas atas, menengah, dan bawah yang belum mampu. Dengan jumlah pengguna media sosial di Indonesia mencapai 75 juta penggunaan media sosial menjadi cara yang lebih praktis untuk menyampaikan pesan (Anshari, 2013).

Meskipun dari sisi efektivitas belum dapat diukur secara tepat, banyak penelitian dan studi kasus menunjukkan bahwa penggunaan media sosial sebagai alat *branding* dapat berjalan dengan lancar. Studi kasus pemilihan gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012 yang berhasil meloloskan Jokowi-Ahok sebagai pemenang, menunjukkan bahwa penggunaan media sosial seperti Facebook, Twitter, dan YouTube telah memberikan kontribusi positif dalam kampanye dan *branding* mereka. Dengan demikian, terdapat potensi bahwa *branding* melalui media sosial dapat memberikan hasil yang positif.

Konklusi Kajian

Penggunaan media sosial sebagai platform untuk mem-*branding* tokoh politik menawarkan berbagai keuntungan, namun beberapa kunci penting perlu diperhatikan untuk memastikan efektivitasnya. Sebagai alat komunikasi dengan audiens dan calon pemilih, komunikasi harus tetap menjadi fokus utama. Variabel kritis dalam hal ini mencakup konten pesan yang harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan target audiens. Pentingnya komunikasi dua arah juga menjadi variabel yang signifikan, di mana interaksi dengan audiens sebagai calon pemilih harus tercipta (Anshari, 2013).

Ada risiko bahwa tim sukses tokoh politik dapat terlalu terburu-buru dalam menyampaikan pesan melalui media sosial tanpa memperhatikan aspek kualitas dan hanya berfokus pada kuantitas pesan. Kampanye diri atau *branding* yang disampaikan melalui media sosial harus sesuai dengan keinginan dan target audiens. Platform seperti twitter, path, dan facebook



memerlukan pesan yang menggunakan bahasa yang sesuai dengan masing-masing target audiens. Khususnya karena mayoritas pengguna media sosial adalah remaja yang akan menjadi pemilih pemula, penggunaan bahasa yang akrab dan sesuai dengan bahasa gaul mereka menjadi penting.

Bahasa yang fleksibel dan mendekati bahasa keseharian, bahkan dengan penggunaan kata-kata tidak baku seperti “ngga” sebagai alternatif dari “tidak”, dapat membantu pesan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Pemilihan bahasa yang sesuai dengan audiens dapat mengoptimalkan efektivitas komunikasi politik melalui media sosial sehingga pesan yang disampaikan dapat mencapai tujuannya dengan lebih efisien.

Pada penggunaan media sosial untuk mem-*branding* tokoh politik, selain penggunaan bahasa yang sesuai dengan situasi lingkungan sekitar, gambar yang memiliki nuansa motivasi dan keunikan juga sebaiknya diikutsertakan dalam pesan. Disarankan agar tidak hanya menyampaikan kelebihan tokoh secara terang-terangan, melainkan disampaikan melalui konten tulisan pesan. Kata-kata motivasi dapat digunakan secara tersirat untuk menggambarkan kebijaksanaan tokoh tersebut. Pesan seharusnya disusun untuk menggambarkan esensi pesan itu sendiri.

Gaya hidup atau *lifestyle* juga menjadi salah satu strategi untuk masuk dan beradaptasi dengan audiens. Dengan mengikuti tren pesan yang sedang populer pada zamannya, pesan akan lebih cepat diterima oleh audiens. Sebagai contoh, penggunaan video parodi “One Direction” di YouTube yang ditujukan untuk mendukung Jokowi dan Ahok pada pemilihan Jakarta baru mencerminkan gaya hidup generasi muda sebagai pemilih baru. Video tersebut menggabungkan elemen keunikan (parodi), lagu populer dari boyband One Direction dan platform YouTube.

YouTube menjadi representasi media sosial yang menyampaikan pesan melalui format video, bukan hanya dalam bentuk tulisan. Penggunaan video unik memikat minat pengguna YouTube yang lebih tertarik pada konten yang kreatif dan lucu. Strategi memanfaatkan parodi lagu melalui YouTube menjadi titik balik penting dalam kemenangan Jokowi-Ahok dalam pemilihan gubernur DKI.



Selain penggunaan bahasa, dimensi komunikatif juga harus diakomodasi oleh tokoh politik yang mem-*branding* dirinya melalui media sosial. Terkadang, pesan yang disampaikan hanya berbentuk komunikasi satu arah tanpa mempertimbangkan masukan atau kritik dari audiens sebagai penerima pesan. Banyak tokoh politik yang lebih fokus pada tulisan terkait diri sendiri di media sosial, jarang memberikan tanggapan atau balasan terhadap pertanyaan dan masukan dari audiens atau pengikutnya. Komunikasi yang efektif dalam media sosial harus bersifat dua arah, walaupun penanggapiannya terhadap kritik dan masukan dapat menjadi tantangan tersendiri bagi tokoh politik.

Dalam pelaksanaan komunikasi dua arah yang melibatkan balasan pesan dari audiens, perlu memperhatikan dengan seksama bahasa dan rangkaian kata yang digunakan. Penyusunan kalimat dapat mencerminkan karakter seorang tokoh politik. Adapun rangkaian kalimat tersebut memiliki potensi untuk membentuk pandangan atau citra yang positif atau bahkan dapat disalahartikan oleh audiens, kemudian dapat memicu celaan dan hujatan yang terus-menerus, fenomena yang dikenal sebagai media sosial *bullying*.

Selain itu, terdapat peluang penelitian lanjutan dalam konteks *branding* melalui media sosial seperti pengukuran kecepatan penyampaian pesan. Pengukuran ini dapat dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif untuk memahami sejauh mana efektivitas penyampaian pesan oleh tokoh politik. Penelitian lebih lanjut juga dapat mengeksplorasi aspek lain seperti pengukuran jumlah pesan yang harus disampaikan setiap harinya untuk menilai efektivitasnya.







Daftar Pustaka

- Aly, B. “Komunikasi Pembangunan dengan Aksentuasi Komunikasi Politik.” *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 8(2). Juli 2010.
- Anggara, S. 2013. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Anshari, F. “Komunikasi Politik di Era Media Sosial”. *Jurnal Komunikasi*, 8(1): 91—101. Oktober 2013.
- Azed, Abdul Bari. 2000. *Sistem-Sistem Pemilihan Umum*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Bertens, K. 2007. *Etika*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Budiardjo, Miriam. 1982. *Masalah Kenegaraan*. Jakarta: Gramedia.
- Guervitch, Michael, dkk. “Political Communication—Old and New Media Relationships”. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 625(1): 164—181. Agustus 2009.
- Hamdi, Muchlis. 2002. *Bunga Rampai Pemerintahan*. Makassar: Yarsif Watampone.
- Hasmawati, F. “Karakteristik Komunikator yang Efektif dalam Komunikasi Antar Pribadi.” *Jurnal Komunikasi Islam dan Kehumasan (JKPI)*, 4(2): 69—95. Desember 2020.

- Heryanto dan shulhan 2013. *Komunikasi Politik Sebuah Pengantar*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Lopulalan, D. L. 2023. “Komunikasi Politik dalam Pemerintahan”. *Hipotesa-Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 17(2): 11—22. 2023.
- McNair, Brian. 2011. *An Introduction to Political Communication*. London: Taylor and Francis.
- Mufid, Muhamad. 2009. *Etika dan Filsafat Komunikasi*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Mukarom, Z. 2020. *Teori-Teori Komunikasi*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
- Mustanir, Ahmad, dkk. 2023. *Etika Pemerintahan*. Bandung: Penerbit Sains Indonesia.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Nimmo, Dam. 1989. *Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek*. Bandung: Remadja Karya W.
- Nimmo, Dan. 2005. *Komunikasi Politik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pureklolon, Thomas Tokan. 2016. *Komunikasi Politik Mempertahankan Integritas Akademisi, Politikus, dan Negarawan*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Putra, Afdal Makkuraga. 2011. “Media Baru dan Fenomena Komunikasi Politik pada Pemilu di Propinsi Banten 2011”. *Jurnal UMN*, 3(2): 23—24. Desember 2011.
- Rasyid, M. Ryaas. 2002. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Riaz, Saqib. 2010. “Effects on New Media Technologies on Political Communication”. *Journal of Political Studies*, 1(2): 161—173. 2010.
- Rush, Michael dan Philip Althoff. 1997. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali Press.



- Saragih, R. dan S. A. 2017. “Peran Komunikasi Politik Pemerintahan dalam Upaya Peningkatan Partisipatif Masyarakat dalam Pemanfaatan Dana Desa”. *REFORMASI*, 7(1): 59—69. 2017.
- Sugiharto, dkk. 2000. *Wajah Baru, Etika dan Agama*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sutomo. 2019. *Komunikasi Politik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Konstituen*. Malang: Literasi Nusantara
- Syarbaini, S., dkk. 2021. *Teori, Media, dan Strategi Komunikasi Politik*. Jakarta: Esa Unggul.
- Taliziduhu, Ndraha. 2005. *Teori Budaya Organisasi*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Toppi, Aino Maijja. 2012. “Corporate Brand Communication Through Social Media in Industrial Setting.” *Journal University of Honolulu*, 2: 36—45. 2012.
- Widodo, J. 2001. *Good Governance: Telaan dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendikia.
- Yosephus, L. Sinuor. 2010. *Etika Bisnis: Pendekatan Filsafat Moral terhadap Perilaku Pebisnis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Yudhatama, I. “Komunikasi Politik dan Partisipasi Warga dalam Arena Perencanaan dan Penganggaran Dana Keistimewaan DIY”. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 15(3): 205—214. Desember 2017.







Profil Penulis



Amalia Syauket, seorang dosen dalam bidang ilmu pemerintahan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jaya. Saat ini menjabat sebagai Lektor Kepala sejak tahun 2023. Selain itu, penulis juga menjabat sebagai Assesor Beban Kerja Dosen dengan Nomor Induk Dosen NIRA: 212010310360043323149. Penulis dapat dihubungi melalui alamat email amalia.syauket@dsn.ubharajaya.ac.id.

Penulis aktif terlibat dalam Tridarma perguruan tinggi, khususnya dalam bidang ilmu pemerintahan-politik dan anti-korupsi. Gelar Sarjana Hukum diperoleh pada tahun 1990 dari Universitas Jendra Soedirman Purwokerto. Kemudian, pada tahun 2000 penulis menyelesaikan program Magister Ilmu Pemerintahan di Universitas Satyagama Jakarta. Gelar Doktor diraih pada tahun 2013 dari Universitas Padjajaran Bandung.

Selain sebagai dosen, penulis juga aktif sebagai peneliti di Pusat Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi Universitas Bhayangkara Jaya serta menjadi anggota Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (ADIPSI).

Beberapa karya terbaik penulis yang dipublikasikan pada tahun 2023, yaitu menerbitkan buku referensi dengan judul *Analisis Trend Koalisi Antar*

*Partai Politik Jelang Pemilu 2024 Menggunakan Metode ISM (Interpretive Structural Modeling) dan Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati bagi Bandar Narkoba. Selain itu, terdapat juga jurnal nasional terakreditasi dengan judul *Meaningful Participation dalam Pembentukan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Membangun Open Governance, Fintech dan Bitcoin Modus Pencuci Uang Hasil Korupsi, Efforts To Eradicate Narcotics In The National Police: A Case Study Of Teddy Minahasa, Jual Beli Jabatan Sebagai Area Rawan Korupsi Mengganggu Reformasi Birokrasi, Building an Anti-Corruption Village with Local Wisdom in Tourism Towards the Richest Village in Indonesia (A Closer Look at Kutuh-Badung-Bali Village), Penjatuhan Hukuman bagi Pelaku Suap Menyuap dalam Proses Rekrutmen Aparatur Sipil Negara dengan Modus Jual Beli Jabatan, Flexing Harta di Media Sosial: Anak Kunci Pembuka Kotak Pandora, Analisis terhadap Krisis Regulasi Pengaturan Crypto Currency yang Mengancam Human Security di Indonesia, serta Jurisdiction Overview of Cyber Troops in Digital Campaigns.**



Ratna Indriasari, berkarier di bidang pendidikan diawali sebagai TENDIK di bagian Akademik pada program Pascasarjana MIP Universitas Satyagama tahun 1999, Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara sejak tahun 2003. Penulis menjadi dosen tetap program studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN) sejak tahun 2017. Penulis mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sejak tahun 2018—sekarang

Penulis aktif melaksanakan Tridharma dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan, Asas-Asas Manajemen, Filsafat, Logika dan Etika, Filsafat dan Etika Pemerintahan, serta Pendidikan Anti Korupsi. Menyelesaikan Pendidikan Diploma-3 (Diploma tiga) Manajemen



Informatika pada Universitas Gunadarma Jakarta Tahun 1998 dan Sarjana Manajemen SDM pada Universitas Mercubuana Jakarta Tahun 2009. Menyelesaikan Pendidikan Magister Administrasi Pendidikan pada Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta tahun 2014. Saat ini penulis sedang menempuh pendidikan Doktor Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Beberapa publikasi yang dilakukan penulis, yaitu menerbitkan buku dengan judul *Searvant Leadership: Model Kepemimpinan Alternatif Pembentukan Karakter Organizational Citizenzhip Behavior (OCB) dan Budaya Organisasi Sekolah* (deepublish 2022). Selain itu, terdapat beberapa publikasi jurnal nasional penelitian dan pengabdian pada masyarakat dengan judul *Model Administrasi Keuangan Berbasis Spesial Jurnal untuk Paud Kasuwari, Local Marginalization in Batam Island As Industrial Cities in Border Region Indonesia: Where is the Role?*, *Budaya Anti Korupsi bagi Peserta Didik di MA Nurul Yaqien Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor*, *Analisis Praktikalitas Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Swishmax dalam Materi Hukum Newton dan Penerapannya Kelas VIII SMP*, *The Impact of Transformational Leadership on Employee Performance: an Intermediary Function of Organizational Commitment and Job Satisfaction*, *Sosialisasi Penanaman dan Pemahaman dalam Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila serta Budaya Anti Korupsi bagi Peserta Didik Sekolah Dasar di SDN Bekasi Jaya VII*, *Implementasi E-Government Melalui Aplikasi Depok Single Windows di Kota Depok*, *Implementasi Pemberantasan Korupsi di Tingkat Rukun Tetangga*, *Sinergi Kepemimpinan Kolaboratif: Etika Sebagai Pilar Mencerahkan dalam Tata Kelola Pemerintahan*, serta *Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Cibeureum Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat*.





Rahadi Budi Prayitno, dosen tetap dalam bidang Ilmu Politik. Berhome base pada program studi Ilmu Politik-Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara 2007. Aktif melaksanakan Tridarma dalam bidang politik dan pemerintahan sebagai peneliti pada pusat penelitian dan pengabdian masyarakat STIPAN. Selain itu, penulis juga sebagai

kordinator mata kuliah Pengantar Ilmu Politik Teori Politik Kontemporer, Ekonomi Politik dan Politik Luar Negeri Indonesia di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara. Pada tahun 2004 penulis menyelesaikan pendidikan magister Ilmu Politik dari Universitas Indonesia Jakarta. Menyelesaikan sarjana dari fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik program studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Satyagama Jakarta tahun 1996.

Beberapa publikasi yang dilakukan penulis, yaitu menerbitkan buku dengan judul *Teori Demokrasi Memahami Teori dan Praktik (Deepublish (CV. Budi Utama tahun 2023)*, *Bureaucratic Transformation with Entrepreneurial Spirit in the Public Service Sector to Meet the Needs of the Community as Customers (Vol. 12 No. 03 (2023): Education, Sosial science and Planning Technique, 2023 (June-August)*. Selain itu, terdapat beberapa publikasi jurnal dengan judul *Partisipasi Pemilih Pemula dalam Menghadapi Pemilu 2024 Di SMA 1 Cisarua Desa Leumalanng Kabupaten Bogor* (jurnal GEMBIRA) (Pengabdian Kepada Masyarakat) tahun 2023 *Peran Stake Holder dalam pemenuhan Prinsip Business Judgement Rule (BJR) Direksi BUMN* (Jurnal Pendidikan Tambusai tahun 2024).





Definitif Endrina Kartini Mendrofa, sebagai dosen tetap di S-1 prodi Ilmu Pemerintahan STIPAN. Penulis menyelesaikan S-1 jurusan Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN) tahun 2018. Semasa menjalani pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara, penulis selalu aktif baik di bidang akademik maupun di bidang kemahasiswaan. Selain itu, penulis mendapat predikat lulusan terbaik dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tertinggi. Kemudian setelah lulus sarjana Ilmu Pemerintahan, penulis bekerja dan juga menyelesaikan pendidikan magister Ilmu Pemerintahan dengan predikat lulusan terbaik.

Beberapa publikasi jurnal terakreditasi SINTA yang dilakukan penulis bersama dengan penulis lainnya, yakni *Analisis Personalisasi Partai Politik di Era Reformasi*, *Analisis Pelaksanaan Keterwakilan Perempuan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Klapanunggal*, dan *Utilization of Social and Moral Capital by Female Legislative Candidates for East Java's Regional Legislative Assembly in the 2019 General Elections*.



Cornelia Evelin Cabui, sebagai dosen tetap di S-1 prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Sutomo. Penulis menyelesaikan S-1 jurusan Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN). Kemudian, menyelesaikan pendidikan magister Ilmu Pemerintahan di STIPAN. Beberapa publikasi yang dilakukan penulis bersama dengan penulis lainnya, yakni: *Refleksi Kinerja Pemerintahan Presiden Jokowi Selama Tiga Tahun Pada Periode Kedua Pemerintahan*, *Korupsi Kebijakan Pejabat Publik*, *Strategi Manajemen Sumber Daya Melalui Peningkatan Produktivitas Kerja Pegawai Negeri Sipil Kelurahan (Studi Kasus: Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa*,



*Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta), dan Sextortion
Fenomena Pemerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan.*





EXPRESS DEALS

Paket Penerbitan Buku

1-2 MINGGU
SELESAI



**literasi
nusantara**

Anggota IKAPI
No. 209/JTI/2018

Fasilitas:

Design Cover Eye Catching

Sertifikat Penulis

Layout Berstandar Tinggi

ISBN

Buku Cetak

Link E Book



Spesifikasi:

- Ukuran UNESCO/A5 • Cover Art Paper/Ivory 230 Gr • Standar 150 Halaman
- Warna Cover Full Colour 1 Sisi • Kertas Isi Bookpaper/HVS
- Warna Isi Black & White • Laminasi Doff/Glossy • Jilid Perfect Binding

Harga Paket Cetak Terbatas

Paket 3 Buku
800.000

Paket 5 Buku
900.000

Paket 10 Buku
1.250.000

Paket 25 Buku
1.950.000

Paket 50 Buku
2.850.000

Paket 100 Buku
4.750.000

*Harga spesial untuk cetak buku di atas 250 eksemplar

Narahubung

+6282347110445 (Tomy Permana)

+6285755971589 (Febi Akbar Rizki)

+6289605725749 (Gusti Harizal)

+6285887254603 (Faizal Arffin)

Kantor Pusat

Perumahan Puncak Jayo Agung
Residence Kav. B11, Merjasari, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65144.

Kantor Cabang Lampung

Jl. Utama I No. 29 RT 024/RW 011.
Kelurahan Iringmulyo, Kec. Metro Timur,
Kota Metro. Lampung 34112.



@penerbit_fitrus



Penerbit Litrus



@literasinusantara_



www.penerbitlitrus.co.id

JASA KONVERSI

SKRIPSI, TESIS, DISERTASI DAN BAHAN PENELITIAN

MENJADI BUKU BER-ISBN

Penulis cukup mengirim filenya saja, selebihnya kami yang akan memproses editing dan penerbitannya dengan fasilitas:

Layanan Editing:

- ✓ Restruktur Kerangka Naskah
- ✓ Editing Naskah
- ✓ Proofreading
- ✓ Komunikasi Intensif
- ✓ Penerbitan Buku + Bisa mengurus HKI

Layanan Penerbitan:

- ✓ ISBN
- ✓ Desain Cover
- ✓ Layout standar tinggi
- ✓ Buku Cetak & Sertifikat Penulis
- ✓ Link URL e-book

PAKET BRONZE

Rp2.300.000

Fasilitas:

- Konversi Artikel Ilmiah
- Editing Ringan
- ISBN
- Desain Cover
- Layout Berstandar Tinggi
- Sertifikat Penulis
- Buku Cetak 10 eksemplar
- Gratis Link E-book

PAKET GOLD

Rp3.800.000

Fasilitas:

- Konversi Artikel Ilmiah
- Editing Sedang
- ISBN
- Desain Cover
- Layout Berstandar Tinggi
- Sertifikat Penulis
- Buku Cetak 25 eksemplar
- Gratis Link E-book

PAKET DIAMOND

Rp5.000.000

Fasilitas:

- Konversi Artikel Ilmiah
- Editing Berat
- ISBN
- Desain Cover
- Layout Berstandar Tinggi
- Sertifikat Penulis
- Buku Cetak 50 eksemplar
- Gratis Link E-book

Cetak 1000 eksemplar:

Free Layanan Launching buku, tim Litnus akan menjadi fasilitator, admin, dan host dalam virtual launching buku penulis.

PENDAFTARAN HKI

Express 1—2 Jam Selesai

Rp700.000

Hindari klaim orang lain atas karya Anda. Amankan setiap karya dengan mengurus Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) bersama Literasi Nusantara. Dosen yang memiliki legalitas sertifikat HKI dapat mengajukan tambahan angka kredit poin KUM hingga 40 poin.

PENGADAAN BUKU FISIK MAUPUN E-BOOK UNTUK PERPUSTAKAAN DAN DIGITAL LIBRARY

- Harga Ekonomis
- Pilihan Buku Melimpah
- Buku-Buku Terbitan Tahun Terbaru
- Bisa dibantu penyusunan list judul sesuai kebutuhan
- Jaminan Garansi

FREE INSTALASI Digital Library

(Kubuku, Gramedia Digital, Aksaramaya, Henbuk, dll)

Layanan Cetak OFFSET

*Harga Ekonomis *Pengerjaan Cepat *Hasil Berkualitas Tinggi

Telah dipercaya para guru, dosen, lembaga,
dan penulis profesional di seluruh Indonesia



PAKET PENERBITAN BUKU + HKI

1-2 MINGGU
SELESAI



Anggota IKAPI
No. 209/JTI/2018

Fasilitas:

Design Cover Eye Catching

Sertifikat Penulis

Layout Berstandar Tinggi

ISBN

Buku Cetak

Link E Book

Royalti

HKI



Spesifikasi:

- Ukuran UNESCO/A5 • Cover Art Paper/Ivory 230 Gr • Standar 150 Halaman
- Warna Cover Full Colour 1 Sisi • Kertas Isi Bookpaper/HVS
- Warna Isi Black & White • Laminasi Doff/Glossy • Jilid Perfect Binding

Harga Paket Cetak + HKI

Paket 3 Buku

1.400.000

Paket 5 Buku

1.500.000

Paket 10 Buku

1.850.000

Paket 25 Buku

2.550.000

Paket 50 Buku

3.450.000

Paket 100 Buku

5.350.000

*Harga spesial untuk cetak buku di atas 250 eksemplar

Narahubung



0858-8725-4603
0882-0099-32207
0899-3675-845

Alamat Kantor

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence
Kav. B11 Merjosari, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65144.



@penerbit_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara_



www.penerbitlitnus.co.id



IKAPI
IKATAN PENERBIT INDONESIA

Promo Penerbitan **BUKU + HKI**

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Rp 1.400.000 | Ukuran Unesco/B5 Cetak 3 eks |
| Rp 1.500.000 | Ukuran Unesco/B5 Cetak 5 eks |
| Rp 1.850.000 | Ukuran Unesco/B5 Cetak 10 eks |
| Rp 2.550.000 | Ukuran Unesco/B5 Cetak 25 eks |
| Rp 3.450.000 | Ukuran Unesco/B5 Cetak 50 eks |
| Rp 5.350.000 | Ukuran Unesco/B5 Cetak 100 eks |



FASILITAS

- ✔ ISBN
- ✔ Layout Berstandar Tinggi
- ✔ Desain Kover
- ✔ Sertifikat Penulis
- ✔ HKI
- ✔ Link E-Book
- ✔ Buku Cetak

KEUNTUNGAN



CEPAT
Proses Penerbitan
1-2 Minggu



EKONOMIS
Hemat 25%



BERKUALITAS
Hasil berkualitas tinggi
dan berstandar Dikti

Narahubung



0858-8725-4603
0882-0099-32207
0899-3675-845



@penerbit_litrus



Penerbit Litrus



@literasinusantara



www.penerbitlitrus.co.id